

**PERANAN PKK KABUPATEN DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KAMPUNG DI KABUPATEN MAPPI
(Studi Pada Kampung Soba Distrik Obaa Kabupaten Mappi)**

**RUDOLF BERNARD RENYUT
PO204208578**



**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR
2012**

**PERANAN PKK KABUPATEN DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KAMPUNG DI KABUPATEN MAPPI
(Studi Pada Kampung Soba Distrik Obaa Kabupaten Mappi)**

Tesis

Sebagai Salah Satu Syarat untuk Mencapai Gelar Magister

Program Studi

Manajemen Perencanaan

Disusun dan diajukan oleh

RUDOLF BERNARD RENYUT

Kepada

**PROGRAM PASCASARJANA
UNIVERSITAS HASANUDDIN
MAKASSAR**

2012

**PERANAN PKK KABUPATEN DALAM PEMBERDAYAAN
MASYARAKAT KAMPUNG DI KABUPATEN MAPPI
(Studi Pada Kampung Soba Distrik Obaa Kabupaten Mappi)**

Oleh

RUDOLF BERNARD RENYUT
PO204208578

Menyetujui :
Komisi Penasehat

Prof. Dr. Hamka Naping, MA
Ketua

Prof. T.R. Andi Lolo, Ph.D
Anggota

Ketua Program Studi
Perencanaan Pembangunan Wilayah,

Direktur Program PascaSarjana
Universitas Hasanuddin

PERNYATAAN KEASLIAN TESIS

Yang bertanda tangan dibawah ini :

Nama : Rudolf Bernard Renyut
Nomor Mahasiswa : PO204208578
Program Studi : Perencanaan Pembangunan Wilayah

Menyatakan dengan sebenarnya bahwa Tesis yang saya tulis ini benar-benar merupakan hasil karya saya sendiri, bukan merupakan pengambilan tulisan atau pemikiran orang lain. Apabila di kemudian hari terbukti atau dapat dibuktikan bahwa sebagian atau keseluruhan Disertasi ini hasil karya orang lain, maka saya bersedia menerima sanksi atas perbuatan tersebut.

Makassar, Mei 2012

Yang Menyatakan

Rudolf Bernard Renyut

ABSTRAK

Rudolf Bernard Renyut, 2012. Peranan PKK Kabupaten dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Mappi (Studi pada Kampung Soba Distrik Obaa Kabupaten Mappi). Dibawah bimbingan Hamka Naping dan T. R. Andi Lolo.

Penelitian ini menggunakan metode pendekatan kualitatif dan kuantitatif. Pertimbangan bahwa fokus penelitian ini adalah deskripsi dari proses interpretasi makna dengan tujuan memperoleh keterangan ilmiah melalui (1) Eksistensi kelembagaan PKK Kabupaten pada tingkat kelompok masyarakat di Kampung Soba, (2) Factor determinan yang mempengaruhi eksistensi PKK Kabupaten dalam melakukan peran pemberdayaan masyarakat kampung, (3) arahan manajemen perencanaan program PKK Kabupaten dalam mengefektifkan pemberdayaan masyarakat kampung. Strategi penelitian adalah studi kasus pada Kampung Soba Distrik Obaa. Data dikumpulkan melalui wawancara mendalam, pengamatan terlibat, penggunaan kusieoner dan penggunaan dokumen. Analisis data menggunakan pendekatan skala likker dan analisis kualitatif.

Hasil penelitian ditemukan bahwa eksistensi kelembagaan PKK Kabupaten pada tingkat kelompok masyarakat belum optimal berdasarkan pada penilaian terhadap kesadaran masyarakat, pengorganisasian dan peningkatan kapasitas sebagai indicator keberdayaan masyarakat di Kampung Soba. Faktor determinan yang mempengaruhi eksistensi PKK Kabupaten dalam melakukan peran pemberdayaan masyarakat di Kampung Soba diantaranya program yang dijalankan pendekatannya otoritas monoton yang tidak bersifat lokalitas sebagai kelemahan dan organisasi yang ada dalam semua tingkatan wilayah sebagai potensi yang dapat melembaga dalam masyarakat. Arahan manajemen perencanaan program PKK dalam melakukan pemberdayaan harus berlandaskan kepada penyadaran masyarakat, pengorganisasian sampai level kampung, kaderisasi pendamping, bantuan teknis/penghataran sumberdaya dan pengelolaan sistem yang memberikan penguatan terhadap dimensi sosial dan ekonomi masyarakat yang menunjang pembangunan wilayah.

Kata Kunci : PKK, Pemberdayaan, Masyarakat Kampung.

PRAKATA

Puji dan Syukur kehadirat Tuhan Yang Maha Esa karena atas rahmat dan karunianya, tesis ini dapat terwujud dalam sebuah manifestasi karya ilmiah untuk memenuhi syarat akademi dalam bidang Manajemen Perencanaan pembangunan . dalam memperoleh derajat Master dengan judul **PERANAN PKK KABUPATEN DALAM PEMBERDAYAAN KAMPUNG DI KABUPATEN MAPPI (Study Pada Kampung Soba Distrik Obaa Kabupaten Mappi)** “ dapat terselesaikan dengan baik.

Perkenankanlah saya selaku Penulis untuk menyampaikan hal – hal menyangkut Peranan PKK Kabupaten Mappi Dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung di Kabupaten Mappi sebagai prioritas utama dalam meningkatkan kesejahteraan masyarakat di Distrik Obaa dan lebih khusus pada Kampung Soba dengan melaksanakan 10 program Pokok PKK.

Tesis ini dapat Penulis selesaikan karena sumbangsih dan pelibatan berbagai pihak , baik secara langsung maupun tidak langsung , oleh karena itu Penulis mengucapkan terima kasih yang setinggi tingginya kepada Prof.Dr. Hamka Namping .MA selaku Pembimbing satu , dan Prof .T.R Andi Lolo. Ph.D selaku pembimbing dua atas segala bimbingannya dan arahan yang diberikan kepada Penulis baik secara konsep,teori maupun teknis serta dorongan moral dan sprit selama penulisan tesis ini. Terima kasih dan penghargaan yang setinggi tingginya disampaikan kepada para Tim penguji/ pengarah tesis ini.ucapan terima kasih juga penulis sampaikan kepada kedua orang Tua yang tercinta serta kakak dan adik- adik yang telah memberikan semangat kepada penulis sehingga dapat menyelesaikan Study ini.Tak lupa

juga Penulis sampaikan terima kasih kepada Ibu Tien Jumame sebagai Ketua PKK Kabupaten Mappi yang telah membantu Penulis sehingga dapat menyelesaikan Study.

Terkhusus kepada istriku tercinta Mery Maryanti. S.Sos sebagai sumber inspirasi yang senantiasa setia mendampingi dalam suka dan duka tanpa lela dan penuh pengertian dan kesebarannya selalu memberikan kasih sayang serta cintanya kepada Penulis. Kepada anakku Christian Calvin T Renyut harapan penurus keluarga yang telah memberikan sangat kepada Penulis hingga dapat menyelesaikan Study ini

Kepada semua pihak yang tidak sempat Penulis sebutkan satu persatu namun telah membantu Penulis, baik moril maupun materiil, Penulis sampaikan terima kasih semoga Tuhan Yesus selalu memberikan balasan yang setimpal. Penulis menyadari sepenuhnya bahwa yang Penulis sajikan dalam tesis ini bukanlah karya ilmiah yang sempurna, masih terdapat kekurangan dan kelemahan di berbagai sisi yang disebabkan dari keterbatasan dan kekhilafan Penulis. Oleh karena itu dengan penuh kerendahan hati, sumbang saran dan arahan yang konstruksi dan berbagai pihak dalam rangka pemyempurnaan karya ini senantiasa Penulis harapkan dan nantikan. Semoga tesis ini dapat bermanfaat dan bernilai bagi semua pihak yang sangat membutuhkan

Harapan Penulis dengan semangat Usuby Hokuda Tako Bayaman

Makassar, 15 Juni 2012

RUDOLF B RENYUT

DAFTAR ISI

	Halaman
PRAKATA	i
ABSTRAK	iii
<i>ABSTRACT</i>	iv
DAFTAR ISI	v
DAFTAR TABEL	viii
DAFTAR GAMBAR	x
BAB I. PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang	1
B. Rumusan Masalah	6
C. Tujuan Penelitian	7
D. Kegunaan Penelitian	7
BAB II. TINJAUAN PUSTAKA	
A. PKK Sebagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan	9
B. Konsep dan Kerangka Pemberdayaan Masyarakat	13
C. Konsep Kampung	26
D. Pemberdayaan Masyarakat Kampung	37
E. Peran Perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat	51
F. Kerangka Konseptual	59
BAB III. METODE PENELITIAN	
A. Pendekatan dan Jenis Penelitian	62

B. Pengelolaan Peran sebagai Peneliti	62
C. Waktu dan Tempat Penelitian	63
D. Sumber Data	64
E. Teknik Pengumpulan Data	65
F. Teknik Analisis Data	68
G. Konsep Operasional	69
BAB IV. HASIL DAN PEMBAHASAN	
A. Keadaan Geografis dan Luas Wilayah Administratif	71
1. Letak Geografis Distrik Obaa	71
2. Topografi Wilayah	72
3. Keadaan Iklim	72
4. Demografi Wilayah	73
5. Infrastruktur Distrik	75
6. Perekonomian Lokal	75
7. Sejarah dan Keadaan Umum	76
8. Potensi SDA dan Mata Pencaharian	79
9. Sumberdaya Manusia	81
10. Akses Kelembagaan	82
11. Aspirasi dan Kebutuhan	82
B. Eksistensi Kelembagaan PKK Kabupaten Pada Tingkat Kelompok Masyarakat Kampung	83
1. Sejarah Singkat Lahirnya Kelembagaan PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga)	83
2. Analisis Peranan PKK Kabupaten dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung	88

C. Faktor Determinan Terhadap Eksistensi PKK Kabupaten dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat Kampung	125
1. Konkritisasi 10 Program PKK di Kampung Soba sebagai Realitas Peranan PKK Kabupaten dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat	126
2. Faktor Determinan PKK Kabupaten dalam Melakukan Pemberdayaan Pada Masyarakat	139
D. Arahana Manajemen Perencanaan Program PKK Kabupaten dalam Mengefektifkan Pemberdayaan Masyarakat.	149
1. Penyadaran Sosial	151
2. Pengembangan Organisasi ke Skala yang Lebih Mikro	152
3. Kaderisasi Pendamping	152
4. Dukungan Teknis atau Penghantaran Sumberdaya	153
5. Pengelolaan Sistem	153
 BAB V. KESIMPULAN DAN SARAN	
A. Kesimpulan	155
B. Saran	156
 DAFTAR PUSTAKA	
 LAMPIRAN	

DAFTAR TABEL

nomor	halaman
1. Teknik Analisis Data Penelitian	68
2. Matriks Kegiatan Penyuluhan yang Pernah Dilakukan di Kampung Soba Distrik Obaa	115
3. Kongkritisasi 10 Program PKK Kabupaten di Kampung Soba dalam Implementasi Pemberdayaan Masyarakat	138
4. Matriks Faktor Kelemahan Kelembagaan PKK dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Soba.	142
5. Matriks Faktor Potensi Kelembagaan PKK dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Soba.	146

DAFTAR GAMBAR

nomor	halaman
1. Mekanisme Struktural Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) secara Hirarki	12
2. Pola Pemelihan dan Pengangkatan Kepala Kampung	29
3. Kerangka Pikir Penelitian	61
4. Peta Wilayah Penelitian di Kabupaten Mappi Distrik Obaa	63
5. Dena Kampung Soba Distrik Oba	78
6. Transek Kampung Soba Distrik Oba	81
7. Struktur Organisasi Tim Pembina PKK Kabupaten Mappi	98

BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang

Tujuan pembangunan nasional adalah untuk memajukan kesejahteraan umum dan mencerdaskan kehidupan bangsa, guna mewujudkan suatu masyarakat adil dan makmur yang merata materil dan spiritual berdasarkan Pancasila dan Undang-Undang Dasar 1945. Terjelaskan bahwa setiap kegiatan pembangunan unsur manusia merupakan salah satu faktor yang memegang peranan penting terhadap keberhasilan atau pencapaian tujuan dari pelaksanaan pembangunan itu sendiri. Dalam konteks ini, masyarakat harus ditempatkan sebagai subyek sekaligus sebagai obyek dari kegiatan pembangunan sebagai perubahan yang direncanakan untuk perwujudan visi sebuah tatanan. Menurut Salman (2009) bahwa seandainya perubahan yang berlangsung alamiah sudah dengan sendirinya mewujudkan visi tatanan, maka tidak diperlukanlah pembangunan itu, lalu sejumlah kebajikan tinggal ditunggu penjelmaannya. Persoalannya, perubahan alamiah kita belum bisa dengan sendirinya mewujudkan visi tatanan, karena itu kita masih tetap memerlukan perubahan yang direncanakan.

Secara kontekstual lembaga PKK (Pembinaan Kesejahteraan Keluarga) sebagai sebuah entitas adalah aplikasi pengetahuan kedalam tindakan dalam mempengaruhi perubahan masyarakat, baik arah maupun kecepatannya, untuk perwujudan visi tatanan (kesejahteraan keluarga). Kualitas dari eksistensi lembaga yang dimaksud terletak pada kedalaman dan keluasan

pengetahuan tentang tatanan yang akan dipengaruhi perubahannya. Hal ini dilandasi oleh pengetahuan yang cukup tentang suatu keadaan perubahan dimana cara (*means*) diaplikasikan untuk mencapai tujuan (*ends*).

Upaya mengarahkan dan mempercepat perubahan menuju perwujudan pembinaan kesejahteraan keluarga dapat melibatkan dua jenis pengetahuan yang berbeda. *Pertama*, perencanaan yang mengandalkan pengetahuan berbasis ilmiah yang dirumuskan berdasarkan teori dan metode ilmiah sedemikian rupa sehingga prediksi dan proyeksi jangka menengah dan panjang bisa diformulasikan, dan berdasarkan itu tahapan tindakan diskenariokan, serta kebutuhan input diperhitungkan.

Kedua, pengetahuan berbasis pengalaman sehari-hari, bahwa melalui “proses belajar dari pengalaman” masyarakat dapat mengkreasi pengetahuan, dan berdasarkan pengetahuan itu dapat mengidentifikasi masalah/kebutuhan lokalitasnya, serta dapat merumuskan tujuan dan cara mencapai tujuan bagi pemecahan masalah/pemenuhan kebutuhan tersebut. Dalam arti, masyarakat dapat diandalkan untuk berprakarsa dan berswadaya bagi pemecahan masalah/kebutuhan tingkat lokalitas, dan dengan itu mereka juga berkontribusi atas perwujudan dalam pencapaian tujuan.

Dengan pendasaran demikian, dapat digarisbawahi bahwa idealnya implementasi semua program dan keterlibatan sejumlah pihak, dalam pembangunan seyogianya diorientasikan bagi pengkapasitasan tatanan atas tiga dimensi, yaitu (1) kapasitas untuk dapat menerapkan pengetahuan berbasis ilmiah (oleh para perencana) guna menjamin validitas arahan jangka panjang dan jangka menengah bagi perwujudan pencapaian tujuan; (2)

kapasitas untuk menerapkan pengetahuan berbasis pengalaman (pada diri masyarakat) untuk bisa berprakarsa dan berswadaya bagi pemecahan masalah/kebutuhan lokalnya; (3) kapasitas untuk mensinergikan arahan sosial dari keduanya.

PKK sebagai salah satu organisasi masyarakat yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai penggerakannya. Untuk membangun keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat, PKK merekrut anggota sampai lapisan bawah masyarakat yang diharapkan mampu membawa pada kondisi keluarga yang sejahtera, yaitu keluarga yang mampu memenuhi kebutuhan dasar manusia baik secara material, sosial, mental dan spiritual serta keluarga yang berdaya, hidup sejahtera, maju dan mandiri yang terjawantahkan secara meluas ke wilayahnya dalam lingkup yang makro (provinsi, distrik/kabupaten dan kampung/desa). Olehnya itu dalam pencapaian tujuan pembangunan nasional, peranan PKK Kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat kampung dapat menjadi lokomotif perubahan yang potensial di samping sasaran PKK adalah keluarga dalam lingkup mikro.

Sesuai dengan sifat gerakan PKK yang universal dan independen, maka PKK berjuang untuk semua lapisan masyarakat dan tidak untuk kepentingan politik praktis, tetapi berpihak pada masyarakat. Untuk itu, ruang lingkup gerakan PKK mulai dari tingkat pusat sampai pada unit terkecil seperti kampung, terbangun dalam konteks; penyuluhan dan sosialisasi; komunikasi, informasi dan edukasi, serta fasilitasi dan pendampingan. Dengan demikian, PKK membutuhkan pemerintah dan pemerintahpun membutuhkan PKK, karena keterlibatan PKK dalam mendukung keberhasilan pemerintah untuk

menyelesaikan permasalahan-permasalahan [antara](#) lain; pengentasan kemiskinan, pemerataan pendidikan dasar, persamaan jender dan pemberdayaan perempuan, mengurangi tingkat kematian anak, meningkatkan kesehatan Ibu dan perlawanan terhadap HIV/AIDS, malaria dan penyakit lainnya serta mengembangkan kemitraan untuk pembangunan. Dalam hal mekanisme pelaksanaan program – program sebagai upaya peningkatan kualitas kerja dan memperkuat kelembagaan, maka secara keseluruhan diperlukan kemampuan dan profesionalisme dalam pengelolaan Gerakan PKK dalam hal; Merencanakan, melaksanakan dan membina pelaksanaan program-program kerja PKK sesuai dengan keadaan dan kebutuhan masyarakat; Menghimpun, menggerakkan dan membina potensi masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program-program PKK; Memberikan bimbingan, motivasi dan memfasilitasi Tim Penggerak PKK/kelompok-kelompok PKK dibawahnya; membuat laporan tentang pelaksanaan tugas kepada Ketua Dewan Penyantun Tim Penggerak PKK pada jenjang yang sama dan kepada Ketua Tim Penggerak PKK setingkat di atasnya; serta Mengadakan supervisi, pelaporan, evaluasi dan monitoring (SPEM) terhadap pelaksanaan program-program pokok PKK yang telah dilaksanakan.

Meskipun demikian, dari hasil observasi yang dilakukan di Kampung Soba Distrik Obaa sebagai contoh kasus penelitian ini yang telah menjadi obyek atau sasaran kebijakan pemberdayaan masyarakat termasuk kegiatan program PKK Kabupaten, fakta empiriknya belum memperlihatkan mekanisme pemberdayaan masyarakat yang terlaksana secara optimal dan bahkan dapat diasumsikan belum berjalan sesuai dengan tujuan dari gerakan PKK itu sendiri.

Indikatornya adalah masyarakat kampung belum terfasilitasi dengan baik dalam merubah tingkat kesejahteraan masyarakat. yang masih diliputi oleh kemiskinan, tingkat pendidikan dan kesehatan masyarakat masih memprihatinkan. Artinya, 10 program PKK (Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; Gotong Royong; Pangan; Sandang; Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga; Pendidikan dan Ketrampilan; Kesehatan; Pengembangan Kehidupan Berkoperasi; Kelestarian Lingkungan Hidup serta Perencanaan Sehat) belum sepenuhnya mampu memberdayakan perempuan secara khusus dan masyarakat kampung secara umum dalam upaya pencapaian kesejahteraan.

Dalam mengantisipasi tantangan ke depan itulah, maka penelitian ***Peranan PKK Kabupaten dalam Pemberdayaaan Masyarakat Kampung Di Kabupaten Mappi (Studi Pada Kampung Soba Distrik Obaa Kabupaten Mappi)*** disusun dan dilaksanakan. Hal ini didorong oleh kesadaran intelektual bahwa hanya dengan pendekatan yang tepat dalam suatu perencanaan kebijakan yang terpadu dan komprehensif maka upaya pengembangan masyarakat menuju kesejahteraan melalui mekanisme pemberdayaan dapat terwujud.

B. Perumusan Masalah

Berdasarkan fenomena yang telah diuraikan di atas, maka masalah penelitian dapat diidentifikasi, bahwa peranan PKK Kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat kampung di Kabupaten Mappi, khususnya di Kampung Soba Distrik Obaa diasumsikan belum dilaksanakan secara optimal,

sehingga belum dapat merubah tatanan kehidupan masyarakat kearah yang lebih baik.

Dari identifikasi masalah di atas, maka diajukan perumusan masalah dalam sejumlah pertanyaan penelitian sebagai berikut :

1. Bagaimana eksistensi kelembagaan PKK Kabupaten pada tingkat kelompok masyarakat di Kampung Soba
2. Faktor determinan apa saja yang mempengaruhi eksistensi PKK Kabupaten dalam melakukan peran pemberdayaan masyarakat di Kampung Soba.
3. Bagaimana arahan manajemen perencanaan program PKK Kabupaten dalam mengefektifkan pemberdayaan masyarakat di Kampung Soba.

Rincian masalah tersebut adalah pokok-pokok pertanyaan yang merupakan unsur dari permasalahan utama, dan apabila tiga rincian masalah itu terjawab dengan baik, maka diharapkan masalah utama (*main problem*) dapat terungkap secara baik.

C. Tujuan dan Kegunaan Penelitian

1. Tujuan Penelitian

Adapun tujuan dari penelitian ini adalah sebagai berikut :

1. Untuk mendeskripsikan eksistensi kelembagaan PKK Kabupaten pada tingkat kelompok masyarakat di Kampung Soba.
2. Untuk menjelaskan factor determinan yang mempengaruhi eksistensi PKK Kabupaten dalam melakukan peran pemberdayaan masyarakat di Kampung Soba

3. Merekomendasikan arahan manajemen perencanaan program PKK Kabupaten dalam mengefektifkan pemberdayaan masyarakat di Kampung Soba.

2. Kegunaan Penelitian

Dalam kegunaan akademik, keterangan ilmiah yang diperoleh dimaksudkan untuk menunjang teori-teori perencanaan wilayah khususnya pada teori pemberdayaan masyarakat.

Sementara dalam kegunaan praktis, hasil penelitian ini diharapkan memberikan informasi dalam perumusan kebijakan dalam mengimplementasikan gerakan program PKK melalui pendekatan yang mengakomodasi karakteristik lokal masyarakat kampung, pembenahan kelembagaan dalam kerangka pemberdayaan masyarakat yang konseptual dan akomodatif.

BAB II

TINJAUAN PUSTAKA

A. PKK sebagai Lembaga Sosial Kemasyarakatan

Berdasarkan Keputusan Menteri Dalam Negeri tahun 1984 tentang PKK sebagai suatu gerakan pembangunan yang tumbuh dari bawah, dikelola oleh, dari dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang sejahtera. Tim Penggerak PKK dibentuk di semua tingkat administrasi : Pusat, Provinsi, Kabupaten, Kecamatan, Desa dan Kelurahan, yang diketuai oleh isteri Pimpinan Daerah setempat. Sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai PKK sebagai gerakan pembangunan melalui keluarga sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat dengan wanita sebagai pemeran utamanya, maka tim penggerak pembinaan kesejahteraan keluarga mempunyai peran yang cukup penting di dalam masyarakat terutama kaum wanita.

Tujuan PKK adalah membantu pemerintah untuk ikut memperbaiki dan membina tata kehidupan dan penghidupan keluarga yang dijiwai oleh Pancasila menuju terwujudnya keluarga yang dapat menikmati keselamatan dan kesenangan dan ketentraman hidup lahir batin.

Sementara sasaran PKK adalah keluarga, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan yang diarahkan dalam mengembangkan kepribadian dan kemampuan dalam bidang :

- a. Mental dan Spiritual yang meliputi sikap dan perilaku sebagai Insan Hamba Tuhan, warga masyarakat dan warga Negara yang bermanfaat berdasarkan Pancasila dan Undang – Undang Dasar 1945.
- b. Fisik material meliputi sandang, pangan, papan kesehatan, kesempatan kerja yang layak, serta lingkungan hidup yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan (PP No 6 1988)

Sesuai dengan Keputusan Menteri Dalam Negeri tentang Pembinaan Kesejahteraan Keluarga pada Bab I kesatuan Umum pasal satu dalam keputusan ini yang dimaksud adalah :

1. Pembinaan Kesejahteraan Keluarga selanjutnya di singkat PKK, adalah gerakan pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah, dengan wanita sebagai penggeraknya untuk membangun keluarga sebagai unit kelompok terkencil dalam masyarakat guna menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan dan membina untuk mewujudkan keluarga sejahtera.
2. Keluarga Sejahtera adalah keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan kepuasan batiniah berdasarkan Pancasila dan undang - Undang Dasar 1945, yaitu keluarga yang tata kehidupannya dan penghidupannya diliputi oleh rasa saling pengertian, tenggang rasa gotong royong, dalam suasana kekeluargaan yang harmonis, merasa keamanan dan ketertibannya terjamin, mejunjung tingi hak-hak asasi dan ketentuan hukum serta melaksanakan kewajibannya sebagai warga negara yang baik dan insan sosial seperti yang diamanatkan oleh Pancasila .
3. Tim Penggerak PKK adalah unsur pimpinan, pembinaan perencanaan, pelaksanaan, pengendalian dan penggerak PKK pada masing-masing

tingkat pemerintah untuk terlaksananya Program PKK (PP No 6 1988).

Adapun Kedudukan , Tugas dan Fungsi dari PKK adalah sebagai berikut :

a) Kedudukan

Tim Pengerak Pembina Kesejahteraan Keluarga dibentuk di Pusat, Provinsi Kabupaten /Kota, Kecamatan / Distrik dan Desa / Kampung. Tim Pengerak Pembina Kesejahteraan Keluarga mempunyai Tugas :

1. Mengerakan dan membina pelaksanaan program pembinaan kesejahteraan keluarga.
2. Mengkoordinasi gerakan masyarakat dari tingkat bawah dalam melaksanakan program pembinaan kesejahteraan keluarga.

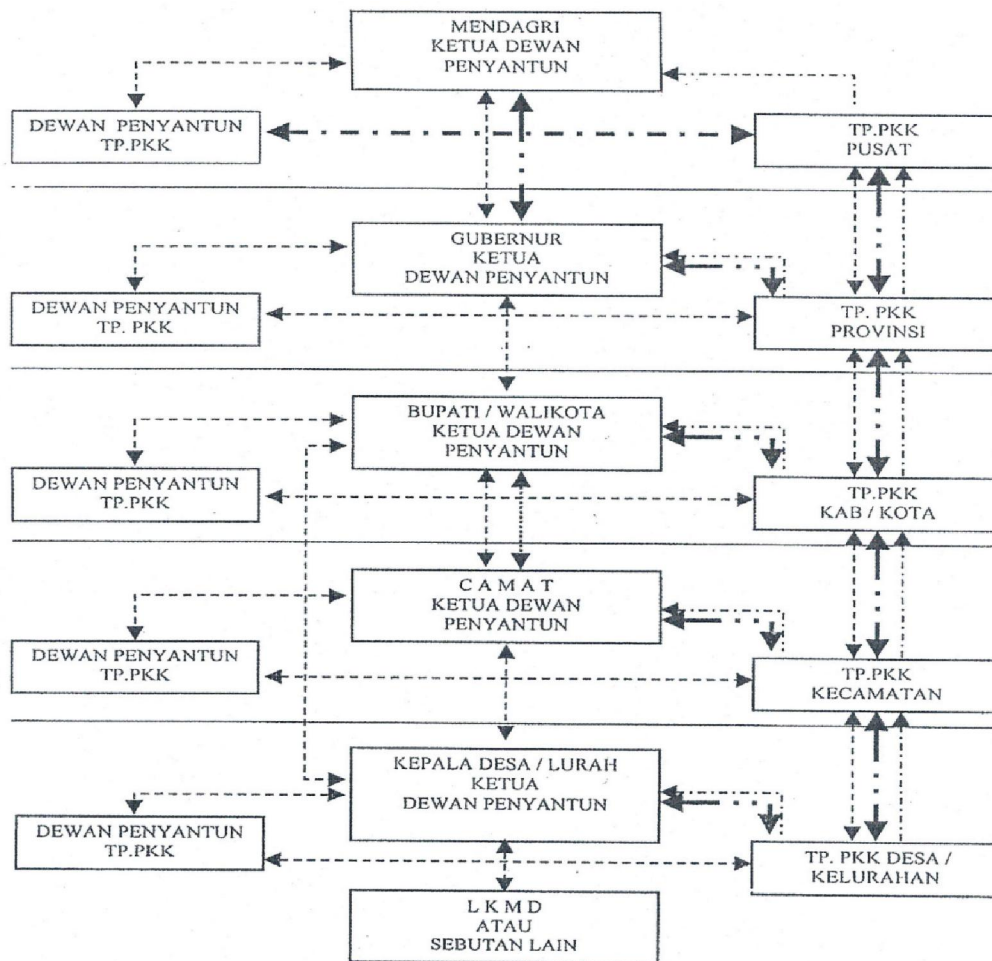
Sementara fungsi Tim Pengerak Pembinaan Kesejahteraan Keluarga adalah :

1. Merencanakan, menggerakkan dan membina program kerja PKK
2. Menghimpun, menggerakkan dan membina program masyarakat khususnya keluarga untuk terlaksananya program PKK.
3. Memberikan bimbingan, motivasi dan petunjuk kepada Tim pengerak PKK setingkat di bawahnya.
4. Menyampaikan laporan dalam pelaksanaan tugas kepada pembina PKK pada tingkat yang sama dan kepada Tim pengerak PKK setingkat lebih di atas.

Tugas dan fungsi PKK ini terkongritkan dalam 10 program PKK yang mencakup secara keseluruhan dalam ruang lingkup; peranan, ketertiban,

keadilan, pelayan pembangunan, kesejahteraan social, peningkatan ekonomi dan pemeliharaan alam.

Dalam hal mekanisme gerakan PKK secara hirarkhi dapat dilihat pada gambar berikut.



Gambar 1. Mekanisme Struktural Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) secara Hirarkhi.

B. Konsep dan Kerangka Pemberdayaan Masyarakat

1. Definisi Pemberdayaan Masyarakat

Pemberdayaan masyarakat (*community empowerment*) adalah sebuah konsep dan kerangka yang ditujukan untuk mengikis fenomena kemiskinan dan mempromosikan keadilan serta keberlanjutan dalam perkembangan masyarakat. Dalam konsep dan kerangka pemberdayaan, kemiskinan dimaknakan secara structural, kemiskinan terjadi karena bekerjanya struktur yang memiskinkan, bukan sepenuhnya karena ketidakmampuan dari pihak miskin tersebut. Lebih tajam lagi, diasumsikan bahwa kemiskinan terjadi karena berlangsungnya pelemahan daya kemampuan (*capability deprivation*) melalui ekspansi kapitalisme global pada struktur internasional dan melalui praktek pembangunan negara berkembang pada struktur nasional dan lokal (Sen, 2002).

Menurut Sen, terdapat tiga jenis daya kemampuan pada golongan miskin yang telah terlemahkan yakni : (1) daya sosial (*social capability*), berupa akses pada basis produksi rumah tangga seperti lahan, sumber keuangan, informasi, pengetahuan dan keterampilan, serta partisipasi dalam organisasi sosial; (2) daya politik (*political capability*), berupa akses individu dalam pengambilan keputusan politik, bukan hanya dalam hal memilih melainkan juga dalam menyuarakan aspirasi dan untuk bertindak secara kolektif; (3) daya psikologis (*psicological capability*), berupa kesadaran tentang potensi diri baik dalam ranah sosial maupun ranah politik. Pemberdayaan adalah proses dimana golongan miskin difasilitasi, didukung dan diperkuat untuk memperoleh kembali sejumlah daya yang terlemahkan tersebut.

Praktek pembangunan yang berlangsung selama ini, termasuk yang dinamai pembangunan masyarakat desa sekalipun, mengasumsikan bahwa

pelaku pembangunan terletak pada dua tangan actor yakni pasar (kapitalis) dan negara (pemerintah). Pengikisan kemiskinan diasumsikan akan berlangsung melalui aliansi antara pemerintah dan kapitalis dalam menghela pertumbuhan ekonomi. Menurut konsep dan kerangka pemberdayaan, terdapat aktor lain yang juga harus dipertimbangkan eksistensinya yakni masyarakat (*civil society*) (Friedman, 2002). Masyarakat sendiri adalah pelaku dari praktek pembangunan, dan karena pembangunan selama ini hanya menguatkan negara dan pasar, maka masyarakat adalah pelaku perlu diberdayakan (Salman, 2003).

Secara sederhana, pemberdayaan (*empowerment*) dapat didefinisikan sebagai “peningkatan asset dan kemampuan orang miskin untuk terlibat, bernegosiasi, mempengaruhi, mengontrol dan mendorong akuntabilitas pada kelembagaan yang mempengaruhi kehidupannya” (Naraya, 2002). Diasumsikan bahwa dengan peningkatan asset dan kemampuan tersebut, daya kemampuan orang miskin yang sebelumnya terlemahkan, dapat kembali meningkat.

Asset berkaitan dengan sumberdaya fisik dan financial dalam suatu komunitas, baik secara individual maupun kolektif, yang berfungsi untuk perluasan pilihan bagi orang miskin dalam kehidupannya. Kapabilitas berkaitan dengan kemampuan orang miskin dalam memanfaatkan asset dalam kehidupan, mencakup daya produksi, tingkat pendidikan, kualitas kesehatan, kebebasan berorientasi, akses politik, dan sebagainya. Kelembagaan berkaitan dengan aturan dan perilaku terpola, baik terorganisir maupun tidak, yang mempengaruhi kehidupan orang, termasuk orang miskin. Kelembagaan ini tersebar di sektor Negara, sektor swasta dan sektor sipil; dan berada di level

local, nasional dan global. Peningkatan asset dan kemampuan tersebut diasumsikan tercapai sebagai efek dari berlangsungnya sejumlah program/kegiatan pembangunan yang menempatkan orang miskin sebagai targetnya. Artinya, sebuah program/kegiatan didesain sedemikian rupa sehingga dari program/kegiatan tersebut orang miskin memperoleh efek peningkatan memperoleh efek peningkatan asset dan kemampuan, terlepas apakah program/kegiatan tersebut berisi peningkatan prasarana fisik, pemberian layanan dasar, perbaikan ekonomi kerakyatan, atau lainnya. Di sini, keberdayaan diasumsikan lahir sebagai efek dari proses berlangsungnya program/kegiatan (Salman, 2003).

Prinsip utama dalam mengembangkan konsep pemberdayaan masyarakat menurut Drijver dan Sajise (dalam Sutrisno, 2005) ada lima macam, yaitu: **1) Pendekatan dari bawah** (*bottom up approach*): pada kondisi ini pengelolaan dan para *stakeholder* setuju pada tujuan yang ingin dicapai untuk kemudian mengembangkan gagasan dan beberapa kegiatan setahap demi setahap untuk mencapai tujuan yang telah dirumuskan sebelumnya. **2) Partisipasi** (*participation*): dimana setiap aktor yang terlibat memiliki kekuasaan dalam setiap fase perencanaan dan pengelolaan. **3) Konsep keberlanjutan**: merupakan pengembangan kemitraan dengan seluruh lapisan masyarakat sehingga program pembangunan berkelanjutan dapat diterima secara sosial dan ekonomi. **4) Keterpaduan**: yaitu kebijakan dan strategi pada tingkat lokal, regional dan nasional. **5) Keuntungan sosial dan ekonomi**: merupakan bagian dari program pengelolaan. Sedangkan dasar-dasar pemberdayaan masyarakat adalah: mengembangkan masyarakat khususnya

kaum miskin, kaum lemah dan kelompok terpinggirkan, menciptakan hubungan kerjasama antara masyarakat dan lembaga-lembaga pengembangan, memobilisasi dan optimalisasi penggunaan sumber daya secara keberlanjutan, mengurangi ketergantungan, membagi kekuasaan dan tanggung jawab, dan meningkatkan tingkat keberlanjutan.

2. Proses dan Upaya Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Suharto (2006) pemberdayaan adalah sebuah proses dan tujuan. Sebagai proses, pemberdayaan adalah serangkaian kegiatan untuk memperkuat kekuasaan atau keberdayaan kelompok lemah dalam masyarakat, terutama individu-individu yang mengalami kemiskinan. Sebagai tujuan, maka pemberdayaan menunjuk pada keadaan atau hasil yang ingin dicapai oleh sebuah perubahan sosial; yaitu masyarakat yang berdaya, memiliki kekuasaan atau mempunyai pengetahuan dan kemampuan dalam memenuhi kebutuhan hidupnya baik yang bersifat fisik, ekonomi, maupun sosial seperti memiliki kepercayaan diri, mampu menyampaikan aspirasi, mempunyai mata pencaharian, berpartisipasi dalam kegiatan sosial, dan mandiri dalam melaksanakan tugas-tugas kehidupannya. Pengertian pemberdayaan sebagai tujuan seringkali digunakan sebagai indikator sebuah keberhasilan pemberdayaan.

Proses pemberdayaan dapat dilakukan secara individual maupun kolektif (kelompok). Proses ini merupakan wujud perubahan sosial yang menyangkut relasi atau hubungan antara lapisan sosial yang dicirikan dengan adanya polarisasi ekonomi, maka kemampuan individu “senasib” untuk saling berkumpul dalam suatu kelompok cenderung dinilai sebagai bentuk

pemberdayaan yang paling efektif (Friedman, 1993). Hal tersebut dapat dicapai melalui proses dialog dan diskusi di dalam kelompoknya masing-masing, yaitu individu dalam kelompok belajar untuk mendeskripsikan suatu situasi, mengekspresikan opini dan emosi mereka atau dengan kata lain mereka belajar untuk mendefinisikan masalah menganalisis, kemudian mencari solusinya.

Menurut *United Nations* (1956 dalam Tampubolon, 2006), proses-proses pemberdayaan masyarakat adalah sebagai berikut:

(1) *Getting to know the local community*; Mengetahui karakteristik masyarakat setempat (lokal) yang akan diberdayakan, termasuk perbedaan karakteristik yang membedakan masyarakat desa yang satu dengan yang lainnya. Mengetahui artinya untuk memberdayakan masyarakat diperlukan hubungan timbal balik antara petugas dengan masyarakat.

(2) *Gathering knowledge about the local community*; Mengumpulkan pengetahuan yang menyangkut informasi mengenai masyarakat setempat. Pengetahuan tersebut merupakan informasi faktual tentang distribusi penduduk menurut umur, sex, pekerjaan, tingkat pendidikan, status sosial ekonomi, termasuk pengetahuan tentang nilai, sikap, ritual dan custom, jenis pengelompokan, serta faktor kepemimpinan baik formal maupun informal.

(3) *Identifying the local leaders*; Segala usaha pemberdayaan masyarakat akan sia-sia apabila tidak memperoleh dukungan dari pimpinan/tokoh-tokoh masyarakat setempat. Untuk itu, faktor "*the local leaders*" harus selau diperhitungkan karena mereka mempunyai pengaruh yang kuat di dalam masyarakat.

(4) *Stimulating the community to realize that it has problems*; Di dalam masyarakat yang terikat terhadap adat kebiasaan, sadar atau tidak sadar mereka tidak merasakan bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan. Karena itu, masyarakat perlu pendekatan persuasif agar mereka sadar bahwa mereka punya masalah yang perlu dipecahkan, dan kebutuhan yang perlu dipenuhi.

(5) *Helping people to discuss their problem*; Memberdayakan masyarakat bermakna merangsang masyarakat untuk mendiskusikan masalahnya serta merumuskan pemecahannya dalam suasana kebersamaan.

(6) *Helping people to identify their most pressing problems*; Masyarakat perlu diberdayakan agar mampu mengidentifikasi permasalahan yang paling menekan. Dan masalah yang paling menekan inilah yang harus diutamakan pemecahannya.

(7) *Fostering self-confidence*; Tujuan utama pemberdayaan masyarakat adalah membangun rasa percaya diri masyarakat. Rasa percaya diri merupakan modal utama masyarakat untuk berswadaya.

(8) *Deciding on a program action*; Masyarakat perlu diberdayakan untuk menetapkan suatu program yang akan dilakukan. Program *action* tersebut perlu ditetapkan menurut skala prioritas, yaitu rendah, sedang, dan tinggi. Tentunya program dengan skala prioritas tinggilah yang perlu didahulukan pelaksanaannya.

(9) *Recognition of strengths and resources*; Memberdayakan masyarakat berarti membuat masyarakat tahu dan mengerti bahwa mereka

memiliki kekuatan-kekuatan dan sumber-sumber yang dapat dimobilisasi untuk memecahkan permasalahan dan memenuhi kebutuhannya.

(10) *Helping people to continue to work on solving their problems;* Pemberdayaan masyarakat adalah suatu kegiatan yang berkesinambungan. Karena itu, masyarakat perlu diberdayakan agar mampu bekerja memecahkan masalahnya secara kontinyu.

(11) *Increasing people's ability for self-help;* Salah satu tujuan pemberdayaan masyarakat adalah tumbuhnya kemandirian masyarakat. Masyarakat yang mandiri adalah masyarakat yang sudah mampu menolong diri sendiri. Untuk itu, perlu selalu ditingkatkan kemampuan masyarakat untuk berswadaya. Ide menempatkan manusia lebih sebagai subjek dari dunianya sendiri mendasari dibakukannya konsep pemberdayaan (*empowerment*).

Menurut Oakley dan Marsden (1984) proses pemberdayaan mengandung dua kecenderungan. Pertama, proses pemberdayaan yang menekankan kepada proses memberikan atau mengalihkan sebagian kekuasaan, kekuatan atau kemampuan kepada masyarakat agar individu menjadi lebih berdaya. Proses ini dapat dilengkapi pula dengan upaya membangun asset material guna mendukung kemandirian mereka melalui organisasi. Kecenderungan kedua atau kecenderungan sekunder menekankan pada proses menstimulasi, mendorong atau memotivasi individu agar mempunyai kemampuan dan atau keberdayaan untuk menentukan apa yang menjadi pilihan hidupnya melalui proses dialog.

Kartasasmita (1995), menegaskan bahwa upaya memberdayakan rakyat harus

dilakukan melalui tiga cara:

1. Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
2. Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkahlangkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.
3. Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

3. Teknik dan Pola Pendekatan Pemberdayaan Masyarakat

Teknik pemberdayaan masyarakat saat ini sangat diperlukan semua pihak, karena banyak proyek-proyek pembangunan yang berasal dari

pemerintah atau dari luar komunitas masyarakat setempat mengalami kegagalan. Kegagalan tersebut biasanya karena tidak pernah mengikutsertakan partisipasi masyarakat (*top down*), sehingga si pemberi proyek tidak mengetahui secara pasti kebutuhan masyarakat yang sesungguhnya. Oleh sebab itu sudah saatnya potensi masyarakat didayagunakan yaitu bukan hanya dijadikan obyek tetapi subyek atau dengan kata lain memanusiakan masyarakat sebagai pelaku pembangunan yang aktif.

Menurut Adimihardja dan Harry (2001) konsep gerakan pemberdayaan masyarakat dalam pembangunan adalah mengutamakan inisiatif dan kreasi masyarakat dengan strategi pokok memberi kekuatan kepada masyarakat (dari, oleh, dan untuk masyarakat). dan salah satu cara yang dipakai dalam teknik pemberdayaan ialah: *Participatory Rural Appraisal* (PRA). Lebih lanjut Harry menyatakan bahwa untuk memasyarakatkan gerakan pemberdayaan ada beberapa aspek dan tingkatan yang perlu diperhatikan, seperti: (1) Perumusan konsep, (2) Penyusunan model, (3) Proses perencanaan, (4) Pemantauan dan penilaian hasil pelaksanaan dan (5) Pengembangan pelestarian gerakan pemberdayaan. Selanjutnya Wahab dkk. (2002) menjelaskan bahwa ada 3 (tiga) pendekatan yang dapat dilakukan dalam *empowerment*, yaitu:

- 1) *The welfare approach*, pendekatan ini mengarahkan pada pendekatan manusia dan bukan memperdaya masyarakat dalam menghadapi proses politik dan kemiskinan rakyat, tetapi justru untuk memperkuat keberdayaan masyarakat dalam pendekatan *centrum of power* yang dilatarbelakangi kekuatan potensi lokal masyarakat.

2) *The development approach*, pendekatan ini bertujuan untuk mengembangkan proyek pembangunan untuk meningkatkan kemampuan, kemandirian dan keberdayaan masyarakat.

3) *The empowerment approach*, pendekatan yang melihat bahwa kemiskinan sebagai akibat dari proses politik dan berusaha memberdayakan atau melatih rakyat untuk mengatasi ketidakberdayaan.

Sedangkan Ross (1987) mengemukakan 3 (tiga) pola pendekatan pemberdayaan dalam rangka peningkatan partisipasi masyarakat di dalam pembangunan, yaitu: 1) Pola pendekatan pemberdayaan masyarakat *the single function* adalah program atau teknik pembangunan, keseluruhannya ditanamkan oleh agen pembangunan dari luar masyarakat. Pada umumnya pola ini kurang mendapat respon dari masyarakat, karena program itu sangat asing bagi mereka sehingga inovasi prakarsa masyarakat tidak berkembang. 2) Pola pendekatan *the multiple approach*, dimana sebuah tim ahli dari luar melaksanakan berbagai pelayanan untuk memecahkan masalah yang dihadapi masyarakat. Pola ini, juga tidak mampu memberdayakan masyarakat secara optimum, karena segala sesuatu tergantung pada tim ahli yang datang dari luar. 3) Pola pendekatan *the inner resources approach* sebagai pola yang paling efektif untuk memberdayakan masyarakat. Pola ini menekankan pentingnya merangsang masyarakat untuk mampu mengidentifikasi keinginan-keinginan dan kebutuhan- kebutuhannya dan bekerja secara kooperatif dengan pemerintah dan badan-badan lain untuk mencapai kepuasan bagi mereka. Pola ini mendidik masyarakat menjadi *concern* akan pemenuhan dan pemecahan masalah yang dihadapi dengan

menggunakan potensi yang mereka miliki. Sedangkan menurut Suharto (1997) pelaksanaan proses dan pencapaian tujuan pemberdayaan masyarakat dapat dicapai melalui penerapan.

Pendekatan pemberdayaan yang disingkat menjadi 5P, yaitu:

- 1) Pemungkinan; menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang secara optimal. Pemberdayaan harus mampu membebaskan masyarakat dari sekat-sekat kultural dan struktural yang menghambat.
- 2) Penguatan; memperkuat pengetahuan dan kemampuan yang dimiliki masyarakat dalam memecahkan masalah dan memenuhi kebutuhankebutuhannya. Pemberdayaan harus mampu menumbuhkembangkan segenap kemampuan dan kepercayaan diri masyarakat yang menunjang kemandirian.
- 3) Perlindungan; melindungi masyarakat terutama kelompok-kelompok lemah agar tidak tertindas oleh kelompok yang kuat, menghindari terjadinya persaingan yang tidak seimbang (apalagi tidak sehat) antara yang kuat dan yang lemah dan mencegah terjadinya eksploitasi kelompok kuat terhadap kelompok lemah. Pemberdayaan harus diarahkan pada penghapusan segala jenis diskriminasi dan dominasi yang tidak menguntungkan rakyat kecil.
- 4) Penyokongan; memberikan bimbingan dan dukungan agar masyarakat mampu menjalankan peranan dan tugas-tugas kehidupannya. Pemberdayaan harus mampu menyokong masyarakat agar tidak terjatuh ke dalam posisi yang semakin lemah dan terpinggirkan.

- 5) Pemeliharaan; memelihara kondisi yang kondusif agar tetap terjadi keseimbangan distribusi kekuasaan antara berbagai kelompok dalam masyarakat. Pemberdayaan harus mampu menjamin keselarasan dan keseimbangan yang memungkinkan setiap orang memperoleh kesempatan berusaha.

Selanjutnya Sulistiyani (2004) menyatakan bahwa proses belajar dalam rangka pemberdayaan masyarakat akan berlangsung secara bertahap. Tahap-tahap yang harus dilalui tersebut meliputi : (1) Tahap penyadaran dan pembentukan perilaku menuju perilaku sadar dan peduli sehingga merasa membutuhkan peningkatan kapasitas diri. (2) Tahap transformasi kemampuan berupa wawasan pengetahuan, kecakapan ketrampilan agar terbuka wawasan dan pemberian ketrampilan dasar sehingga dapat mengambil peran di dalam pembangunan. (3) Tahap peningkatan kemampuan intelektual, kecakapan-ketrampilan sehingga terbentuklah inisiatif dan kemampuan untuk mengantarkan pada kemandirian.

C. Konsep Kampung

Pengertian Desa atau Kampung tidak terlepas dari pengertian masyarakat hukum adat. Soekanto (1982: 24) mengatakan bahwa: " Suatu masyarakat hukum adat atau persekutuan hukum adat merupakan kesatuan kemasyarakatan yang mempunyai kelengkapan-kelengkapan untuk berdiri sendiri, yakni mempunyai kesatuan hukum, kesatuan penguasa dan kesatuan lingkungan hidup berdasarkan hak bersama atas tanah dan air bagi semua warganya." Pengertian ini menekankan mengenai adanya suatu kesatuan

masyarakat sebagai suatu organisasi dimana terdapat peran-peran tertentu yang mempengaruhi anggota-anggota masyarakat lainnya.

Luasnya wilayah Indonesia menyebabkan keanekaragaman suku dan adat istiadat. Geertz (1956:3) dalam hasil penelitiannya membagi masyarakat Nusantara dalam tiga tipe umum, yaitu : (i) daerah persawahan yang kuat pengaruh hindupnya, (ii) rakyat pantai yang berorientasi dagang dan kuat keislamannya dan kelompok-kelompok suku yang umumnya menyembah berhala dan mendiami daerah-daerah pedalaman yang bergunung-gunung. Ketiga katagori di atas telah meringkas secara kasar dan tentatif, bentuk-bentuk dasar yang merupakan latar belakang dari keragaman Indonesia. Pembagian tipe masyarakat menurut Geertz tersebut dapat menjadi latar belakang pemahaman mengenai bagaimana adat istiadat dan tipikal masyarakat mempengaruhi pula tata pemerintahan yang dapat diterapkan di suatu daerah.

Pemerintah memiliki tugas untuk membangun setiap daerah di seluruh wilayah Republik Indonesia dengan profit yang berbeda tersebut seadil-adilnya. Isu nasional yang berkembang dalam kaitannya dengan pembangunan yang adil adalah kenyataan bahwa telah terjadi ketertinggalan pembangunan di daerah-daerah yang memiliki sumber daya alam yang melimpah. Hal ini telah mendorong kecemburuan sosial antar daerah dan berpotensi memecah persatuan bangsa. Bentuk penerapan kebijakan publik di Indonesia juga perlu untuk mencakup kepentingan masyarakat banyak. Meskipun telah mengalami banyak kemajuan, pembangunan sebaiknya tetap memperhatikan bagaimana bentuk interaksi antara birokrasi dan keperluan otonomi disamping faktor

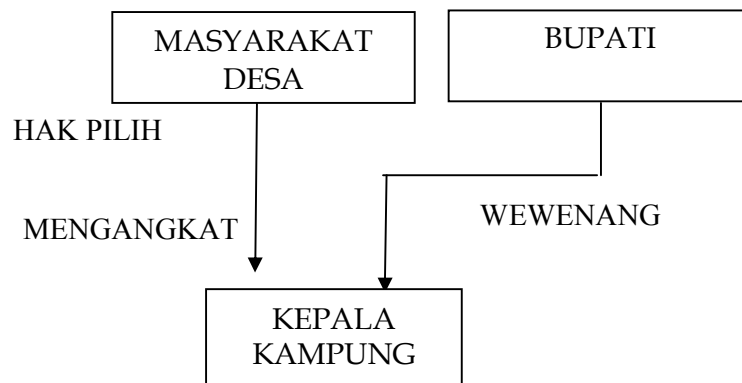
inisiatif masyarakat sendiri (Soedjatmoko dalam Alfian, dkk.; 1980:57). Kebijakan publik yang diterapkan dalam kaitannya dengan pemerintahan desa penting untuk memikirkan bagaimana memaksimalkan pembangunan masyarakat mengingat struktur dan kultur pedesaan (Ndraha, 1990:83).

1. Status Pemerintahan Kampung

Dalam UU 32/2004, dicantumkan dasar pertimbangan dikeluarkannya undang-undang tersebut; yaitu : (a) bahwa sistem pemerintahan Negara Kesatuan Republik Indonesia menurut Undang-undang Dasar 1945 memberikan keleluasaan kepada Daerah untuk menyelenggarakan otonomi daerah; (b) bahwa dalam penyelenggaraan otonomi daerah, dipandang perlu untuk lebih menekankan pada prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan keadilan serta memperhatikan potensi dan keanekaragaman daerah; (c) bahwa dalam menghadapi perkembangan keadaan, baik di dalam maupun di luar negeri, serta tantangan persaingan global, dipandang perlu menyelenggarakan otonomi daerah dengan memberikan kewenangan yang luas, nyata dan bertanggung jawab kepada daerah secara proporsional, yang diwujudkan dengan pengaturan, pembagian dan pemanfaatan sumberdaya nasional serta perimbangan keuangan Pusat dan Daerah sesuai dengan prinsip-prinsip demokrasi, peran serta masyarakat, pemerataan dan keadilan, serta potensi dan keanekaragaman daerah yang dilaksanakan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia.

Selain asas Desentralisasi, UU 32/2004 juga mencantumkan asas-asas pemerintahan lainnya yang diterapkan dalam Pemerintahan Daerah, yaitu asas

Dekonsentrasi dan asas Tugas Pembantuan. Dekonsentrasi didefinisikan sebagai pelimpahan wewenang dari Pemerintah Pusat kepada Gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat dan atau perangkat pusat di Daerah. Tugas Pembantuan adalah penugasan dari Pemerintah Pusat kepada Daerah dan Desa, dan dari Daerah ke Desa untuk melaksanakan tugas tertentu yang disertai pembiayaan, sarana dan prasarana serta sumber daya manusia dengan kewajiban melaporkan pelaksanaannya dan mempertanggung jawabkannya kepada yang menugaskan.



Gambar 2. Pola Pemilihan dan Pengangkatan Kepala kampung

Otonomi Daerah menurut UU 32/2004 adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Daerah Otonom adalah kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai batas daerah tertentu berwenang mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat dalam ikatan negara kesatuan Republik Indonesia. Selain Daerah Otonom, UU 32/2004 juga mengenai beberapa

batasan daerah, yaitu (i) Wilayah Administrasi, (ii) Kecamatan, (iii) Kelurahan, (iv) Kampung, (v) Kawasan Perkotaan.

Wilayah Administrasi adalah wilayah kerja Gubernur selaku wakil Pemerintah Pusat yang disebut pula sebagai Daerah Propinsi. Kecamatan adalah wilayah kerja Camat sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan Daerah Kota. Kelurahan adalah wilayah kerja Lurah sebagai perangkat Daerah Kabupaten dan atau Daerah Kota dibawah Kecamatan. Desa atau yang disebut dengan nama lain adalah kesatuan masyarakat hukum yang memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat berdasarkan asal-usul dan adat istiadat setempat yang diakui dalam sistem Pemerintahan Nasional dan berada di Daerah Kabupaten.

Kawasan perkampungan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama pertanian, termasuk pengelolaan sumber daya alam dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat permukiman, pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi. Kawasan Perkotaan adalah kawasan yang mempunyai kegiatan utama bukan pertanian, dengan susunan fungsi kawasan sebagai tempat pemukiman perkotaan, pemusatan dan distribusi pelayanan jasa pemerintahan, pelayanan sosial dan kegiatan ekonomi.

Desa atau kampung berdasarkan UU 32/2004 adalah kampung atau yang disebut dengan nama lain sebagai suatu kesatuan masyarakat hukum yang mempunyai susunan asli berdasarkan hak asal usul yang bersifat istimewa, sebagaimana dimaksud dalam penjelasan pasal 18 UUD 1945. Landasan pemikiran dalam pengaturan mengenai pemerintahan adalah

keanekaragaman, partisipasi, otonomi asli, demokratisasi dan perbedayaan masyarakat.

Kebijakan pemerintahan yang tampak dalam UU 32/2004 menempatkan Kampung/Desa sebagai salah satu pilar otonomi daerah. Ditinjau dari aspek administrasi publik sebagai proses pemerintahan, maka Pemerintah kampung telah dikukuhkan sebagai pemerintah suatu daerah otonom yang langsung bertanggung jawab kepada masyarakat pemilihnya. Meskipun penyelenggaraan pemerintahan desa/kampung tetap ditegaskan sebagai subsistem dari sistem penyelenggaraan pemerintahan, namun diberikan memiliki kewenangan untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakatnya, sehingga orientasi penyelenggaraan pemerintah akan sangat dipengaruhi oleh kewajiban Pemerintah untuk mempertanggungjawabkan pelaksanaan dari pada tugas-tugasnya kepada masyarakat kampung. Apabila terdapat pertentangan antara kepentingan masyarakat kampung dengan kepentingan daerah lain yang cakupannya lebih luas seperti kepentingan propinsi atau kabupaten, maka Pemerintah kampung akan mengalami dilema dalam melaksanakan tugasnya.

Posisi Pemerintah Kampung di Papua dapat dibandingkan dengan pemerintahan daerah di beberapa bagian dunia, seperti di Amerika Serikat dan Brazil, dimana masyarakat suatu kota langsung memilih baik walikotanya (mayor) maupun dewan kota (S.H. Sarundajang, 2001: 93-94). Hal ini merupakan penegasan terhadap bentuk pemilihan langsung yang diterapkan pula dalam pemilihan kepala pemerintah di berbagai negara maju di dunia. Undang-undang nomor 5 tahun 1974 yang mengatur mengenai Pokok-pokok

Pemerintahan di Daerah (UU No. 5/1974) maupun undang-undang nomor 5 tahun 1979 tentang Pemerintahan Desa (UU No5/1979) telah dihapus keberlakuannya oleh UU 22/ 1999 dan di revisi UU No.32/2004

Perubahan yang diatur dalam UU 32/2004 belum dapat mengubah secara menyeluruh kondisi pemerintahan di daerah yang telah terbentuk selama ini. Masalah lain yang terkait dengan pemberlakuan UU 32/2004 adalah belum lengkapnya peraturan-peraturan pelaksanaannya dan masalah sosialisasi undang-undang tersebut kepada masyarakat yang selama ini telah dibentuk sesuai dengan undang-undang yang lama.

2. Konsep Pembangunan Kampung Terpadu

Pembangunan Kampung Terpadu adalah suatu strategi pembangunan yang merupakan perkembangan lebih lanjut dari strategi Pembangunan. Dalam pembangunan kampung dilakukan usaha yang intensif dengan tujuan dan kecenderungan memberikan fokus perhatian kepada kelompok maupun daerah tertentu, melalui penyampaian pelayanan, bantuan dan informasi kepada masyarakat kampung/desa (Poostchi,1986). Dengan demikian, strategi ini lebih banyak menaruh perhatian pada proses penyampaian (*delivery*) daripada mengembangkan kapasitas dan respons masyarakat. Karena masyarakat mempunyai banyak aspek, usaha pembangunan yang bersifat menyeluruh semestinya juga meliputi keseluruhan aspek tersebut. Apabila usaha pembangunan untuk masing-masing aspek ditangani oleh instansi yang berbeda, akan dijumpai sejumlah instansi yang melakukan aktivitas di kampung dalam rangka melaksanakan programnya masing-masing. Untuk

menghindari duplikasi dan tumpang tindih serta untuk mewujudkan proses yang saling mendukung, maka perlu dilakukan suatu pendekatan yang mampu mengkoordinasikan dan mensinergikan program-program yang bersifat sektoral tersebut. Untuk maksud tersebut kemudian dikembangkan strategi yang kemudian dikenal sebagai *integrated Rural Development* (Pembangunan Kampung Terpadu).

Dalam pandangan ini Pembangunan Kampung Terpadu merupakan suatu strategi untuk mencapai tujuan melalui sinkronisasi yang lebih baik dari berbagai kegiatan, mata rantai, usaha serta koordinasi yang efektif dari berbagai instansi terkait (FAO,1977: 3). Dari sumber yang sama juga disebutkan, bahwa Pembangunan Kampung Terpadu merupakan tema kegiatan yang melibatkan bukan saja perubahan fisik dan ekonomi, melainkan juga perubahan sosial psikologis. Di samping itu, program ini juga berisi muatan dan prosedur perubahan dalam organisasi sosial. Oleh sebab itu, dalam pendekatan ini tidak hanya berarti beberapa instansi menjalankan fungsi masing-masing secara bersama-sama, tetapi di dalamnya terkandung unsur integrasi dari lembaga-lembaga multisektoral. Dalam hal ini istilah integrasi mempunyai pengertian yang lebih luas dibanding koordinasi. Dari beberapa pengertian tersebut dapat dipahami apabila sementara pihak mengatakan bahwa Pembangunan Kampung Terpadu adalah suatu strategi yang mengadopsi *system approach* dalam pelaksanaan pembangunan masyarakat. Strategi ini memandang pembangunan sebagai suatu kesatuan proses di mana aspek ekonomi hanya merupakan salah satu bagiannya. Dalam proses tersebut, selain aspek ekonomi terdapat aspek sosial, politik, kultural,

psikologis, teknis yang saling berinterrelasi, berinterdependensi dan saling mendukung.

Dengan melihat karakteristiknya seperti itu, maka untuk mengembangkan konsep pembangunan kampung terpadu tidak cukup menggunakan kontribusi dari satu disiplin ilmu pengetahuan, tetapi berbagai disiplin ilmu pengetahuan yang relevan dan terkait dengan aspek-aspek yang terdapat dalam proses pembangunan desa tersebut. Demikian juga halnya dalam pelaksanaannya, pendekatan ini akan melibatkan sejumlah instansi atau departemen yang terkait. Oleh sebab itu, tidak salah apabila dikatakan bahwa strategi ini bersifat multidisiplin dalam pendekatan dan multisektoral dalam pelaksanaannya. Sebagai suatu kebulatan yang di dalamnya mengandung berbagai aspek, proses pembangunan yang menggunakan pendekatan ini akan mengandung unsur-unsur yang sangat esensial berupa: multifungsi, intersektoral dan interaksi. Sehubungan dengan hal itu, Honadle dan Van Sant (1985:3) merumuskan pengertian pembangunan desa terpadu sebagai suatu aktivitas pembangunan yang bersifat multisektoral dan multifungsi yang dilaksanakan pada suatu lokasi atau beberapa lokasi tertentu. Integrasi dibutuhkan karena pada dasarnya kemiskinan di daerah pedesaan khususnya di kalangan petani yang merupakan sumber masalah utama, penanganannya membutuhkan suatu paket tindakan dalam berbagai aspek yang terkoordinasi.

Mengingat karakteristiknya seperti itu persoalan yang paling mendasar dan sering muncul dalam pengembangan strategi ini baik dalam pengembangan konsep maupun pelaksanaannya adalah masalah integrasi

dan koordinasi. Kedua hal itu ternyata lebih mudah dikatakan sebagai retorika dibandingkan mewujudkannya dalam pelaksanaannya. Sebagai sebuah konsep, pengembangan pendekatan pembangunan desa terpadu membutuhkan kontribusi dari berbagai disiplin ilmu pengetahuan, sehingga dalam penyiapannya secara teoretik harus melibatkan sejumlah orang yang berasal dari disiplin dan keahlian yang berbeda. Persoalan yang tidak selalu mudah dipecahkan adalah bagaimana mengintegrasikan pemikiran-pemikiran dari beberapa orang yang mempunyai latar belakang disiplin ilmu yang berbeda tersebut ke dalam suatu konsep yang utuh.

Apabila persoalan ini tidak dapat diatasi, konsep yang dihasilkan memang merupakan suatu strategi pembangunan desa yang menyeluruh karena telah memperhitungkan segenap aspek yang terkait, tetapi tidak lebih sebagai kompilasi dari berbagai pemecahan masalah berdasarkan sudut pandang beberapa ilmu yang terkait. Masalah yang sama juga tidak jarang dijumpai dalam pelaksanaannya. Sebagai suatu pendekatan terpadu, pelaksanaannya harus melibatkan berbagai instansi yang terkait dengan aspek-aspek pembangunan desa yang akan dilaksanakan. Apabila masing-masing instansi telah terbiasa bekerja sendiri-sendiri dalam pendekatan pembangunan sektoral, maka koordinasi apalagi integrasi, bukan barang yang terlalu mudah. Lebih-lebih apabila di kalangan mereka cukup kuat tertanam rasa fanatisme instansi atau departemen.

Berdasarkan berbagai hal yang sudah diuraikan tadi, barangkali cukup bermanfaat untuk memerhatikan tiga persoalan yang dikemukakan oleh Honadle dan Van Sant (1985:5) di sekitar pelaksanaan strategi pembangunan

desa terpadu ini. *Pertama*, pernyataan formal tentang tujuan program, filosofi dari pendekatan pembangunan desa terpadu serta dimensi teknis dari pendekatan terintegrasi sendiri jarang memperoleh penjelasan yang cukup memadai. *Kedua*, proses dalam mengimplementasikan pendekatan pembangunan desa terpadu sering mengandung kontradiksi yang mendasar, misalnya *trade-off* antara harapan perolehan hasil fisik dengan segera dengan pengembangan kapasitas masyarakatnya. *Ketiga*, kegagalan program seringkali bukan disebabkan kurangnya kemauan politik (*political will*), tetapi lebih disebabkan oleh adanya konflik serta dampak dari konflik dalam organisasi dan manajemen pelaksanaannya.

Lebih lanjut, konsep pembangunan kampung terpadu juga dapat memberikan penampakan dilihat dari berbagai dimensi. Pembangunan kampung terpadu dapat dilihat sebagai suatu metode, proses dan sasaran dari proses itu sendiri. Sebagai suatu metode, karena pendekatan ini merupakan salah satu cara untuk melaksanakan pembangunan kampung dengan melibatkan seluruh lapisan masyarakat dan mengait seluruh aspek kehidupan. Sebagai suatu proses, karena pendekatan ini mencoba mentransformasikan kehidupan masyarakat desa yang berorientasi tradisional menuju suatu kehidupan yang lebih berorientasi pada perkembangan ilmu pengetahuan dan teknologi dalam setiap aspek kehidupan masyarakatnya. Sebagai sasaran, karena proses yang menggunakan pendekatan ini menuju pada suatu peningkatan kualitas hidup yang lebih baik, peluang yang semakin terbuka untuk mengembangkan diri dan pengembangan institusi sosial ekonomi dan pelayanan yang setara dengan masyarakat kota (Honadle dan Van Sant, 1985)

D. Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Berbagai strategi pembangunan selama ini telah dilakukan oleh pemerintah dalam upaya mewujudkan masyarakat desa menjadi masyarakat yang mandiri. Salah satu yang dikenal saat ini adalah kebijakan pemberdayaan masyarakat desa, yang fokus perhatiannya adalah masyarakat desa. Sebagai strategi, kebijakan Pemberdayaan masyarakat desa telah berkembang sejak awal kemerdekaan Republik Indonesia dan telah melalui sejarah yang amat panjang. Sebagaimana Tjokrowinoto (1996 : 34) mengungkapkan bahwa :

Pada awalnya pembangunan desa di Indonesia dikenal sebagai “Rencana Kesejahteraan Kasimo” atau *Kasimo Welfare Plan* yang dicanangkan pada tahun 1952. *Kasimo welfare plan* lebih berorientasi pada peningkatan produksi pangan. Strategi ini dipengaruhi oleh apa yang dilakukan oleh pemerintah kolonial, yang dikenal dengan strategi *olie vlek* atau percikan minyak. Pada perkembangan berikutnya pada tahun 1959 pembangunan desa lebih dititik beratkan pada pembangunan masyarakat-nya. Pembangunan waktu itu dilaksanakan berdasarkan pada Rencana Pembangunan Lima Tahun 1956-1960 (Undang-undang Nomor 85 Tahun 1958) yang dirumuskan oleh Biro Perancang Negara.

Demikian juga Ndraha (1990 : 81-83) mengemukakan bahwa :

Pada tahun 60-an orang lebih mengarahkan perhatian pada usaha pembangunan masyarakat di perdesaan dengan alasan :

- 1) bagian terbesar penduduk tinggal di daerah perdesaan;
- 2) keadaan perdesaan yang dianggap timpang jika dibandingkan dengan keadaan perkotaan. ... ; dan
- 3) kenyataan bahwa dalam pembangunan masyarakat (*community development*) sampai saat itu, masyarakat, lebih-lebih masyarakat perdesaan tidak segera mampu menunjukkan prakarsa yang berarti.

Hal-hal di ataslah yang menjadi pendorong bagi banyaknya negara berkembang untuk meningkatkan perhatian pada pembangunan masyarakat perdesaan yang disebut pembangunan perdesaan atau pembangunan desa (*rural development*). Strategi pembangunan masyarakat yang digunakan diilhami oleh konsep *community development*. Konsep ini telah dirumuskan oleh Dewan Sosial Ekonomi Perserikatan Bangsa-Bangsa (PBB) pada tahun 1956. Rumusan definisi pembangunan masyarakat sebagai berikut (Bhattacharyya, dalam Ndraha, 1990 : 72-73) bahwa :

Community development is the processes by which the efforts of the people themselves are united with those of governmental authorities to improve the economic, social and cultural conditions of communities, to integrate these communities into the live of the nation and to enable them to contribute fully to national progress.

This complex of processes is thus made up of two essential element : the participation of the people themselves in efforts to improve their level of living with as much reliance as possible on their own initiative ; and the provisions of technical and other services in ways which encourage initiative, self-help and mutual help and make these more effective. It is expressed in programmes designed to achieve a wide variety of specific improvements.

These programmes are usually concerned with local communities because of the fact that the people living together in a locality have many and varied interests in common. Some of their interests are expressed in functional groups organized to further a more limited range of interests not primarily determined by locality."

Rumusan itu mengandung pengertian sebagai berikut :

1) Dalam artian "*proses*" pembangunan masyarakat merupakan semua usaha swadaya digabungkan dengan usaha-usaha pemerintah setempat guna meningkatkan kondisi masyarakat di bidang ekonomi, sosial dan budaya, serta mengintegrasikan masyarakat yang ada ke dalam kehidupan berbangsa dan bernegara, dan memberi kesempatan yang memungkinkan masyarakat itu

sendiri dalam usaha penuh pada kemajuan dan kemakmuran bangsa. Proses ini mengutamakan dua unsur penting, yakni (a) partisipasi masyarakat itu sendiri dalam usaha meningkatkan taraf hidup masyarakat; dan (b) pembentukan pelayanan teknis dan bentuk-bentuk pelayanan yang mendorong timbulnya inisiatif, serta berswadaya dan gotong royong masyarakat.

2) Dalam artian "*metode*", pembangunan masyarakat menekankan pada aspek "partisipasi dan keterlibatan langsung masyarakat dalam proses pembangunan", dapat diartikan sebagai "gerakan"

Definisi pembangunan masyarakat di atas telah mewarnai kebijakan awal pembangunan masyarakat desa di Indonesia yang bertujuan :

... meningkatkan taraf penghidupan masyarakat desa, dengan berdasarkan azas kekuatan sendiri daripada masyarakat desa, dengan bimbingan serta bantuan alat-alat pemerintah yang bertindak sebagai suatu keseluruhan (kebulatan) dalam rangka kebijakan umum yang ada." (Ndraha, dalam Tjokrowinoto, 1986 :

3) Berdasarkan rumusan serta tujuan pembangunan masyarakat desa tersebut, maka pengelolaan pembangunan masyarakat desa senantiasa didasarkan pada asas-asas : aspirasi masyarakat, swadaya masyarakat, partisipasi masyarakat dan pemufakatan masyarakat, serta bimbingan, pembinaan dan bantuan pemerintah. Diletakkannya strategi pemberdayaan masyarakat sebagai paradigma baru pembangunan, menurut dasar pandangan Kartasmita (1996 : 141-142) bahwa :

Upaya yang dilakukan harus diarahkan pada akar persoalannya, yaitu meningkatkan kemampuan rakyat. Bagian yang tertinggal dalam masyarakat harus ditingkatkan kemampuannya dengan mengembangkan dan mendominasikan potensinya , dengan kata lain, memberdayakannya. Secara praktis upaya yang merupakan penggerakan sumber daya untuk mengembangkan potensi ekonomi

rakyat ini akan meningkatkan produktivitas rakyat sehingga baik sumber daya manusia maupun sumber daya alam di sekitar keberadaan rakyat dapat ditingkatkan produktivitasnya. Dengan demikian, rakyat dan lingkungannya mampu secara partisipatif menghasilkan dan menumbuhkan nilai tambah ekonomis. Rakyat miskin atau yang berada pada posisi belum termanfaatkan secara penuh potensinya akan meningkat bukan hanya ekonominya, tetapi juga harkat, martabat, rasa percaya diri, dan harga dirinya. Dengan demikian, dapatlah diartikan bahwa pemberdayaan tidak saja menumbuhkan dan mengembangkan nilai tambah ekonomis, tetapi juga nilai tambah sosial dan nilai tambah budaya.

Pandangan itu menunjukkan suatu kenyataan bahwa terjadi ketidakseimbangan dalam proses pembangunan di masa-masa lalu. Ketidakseimbangan dimaksud tentunya dalam kesempatan dan kemampuan masyarakat dalam memanfaatkan peluang dalam setiap proses pembangunan, yang mengakibatkan makin lebarnya jurang kesenjangan. Kondisi tersebut telah terjadi pada tingkatan masyarakat yang paling bawah, yaitu masyarakat desa.

Seperti yang ditegaskan oleh Johnston dan Clark (dalam Rondinelli, 1990 : 21-22) dalam analisa mereka tentang program pembangunan wilayah perdesaan, bahwa :

Persepsi yang umumnya diyakini tentang problema pembangunan ternyata jauh berbeda dengan realitas sosial yang sebenarnya. Berbicara tentang masalah pembangunan tentulah bersentuhan dengan tujuan-tujuan padu yang dirumuskan secara mantap, pilihan-pilihan eksklusif yang bersifat timbal-balik, pengambilan keputusan yang bersifat otoritatif dan adanya penanggung jawab yang jelas.

Rondinelli (1990 : 22) berpendapat pula bahwa :

Persepsi tentang dinamika pembangunan yang demikian akhirnya menguak suatu pendekatan alternatif terhadap analisa kebijaksanaan, perencanaan dan pelaksanaan dibanding dengan apa yang sebelumnya dicetuskan oleh orang-

orang yang menganut pandangan rasional, teknokratik dan secara intelektual sangat terarah

Dalam melihat implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa, setidaknya-tidaknya dapat dilihat dari dua sudut pandang. *Pertama*, menyangkut “strategi” yang dilakukan oleh pemerintah yaitu upaya pemerintah dalam menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang dan memperkuat potensi/daya yang dimiliki masyarakat melalui pemberian input berupa bantuan dana, pembangunan prasarana dan sarana baik fisik maupun sosial, serta pengembangan lembaga pendanaan, penelitian dan pemasaran di daerah serta melindungi melalui pemihakan kepada masyarakat yang lemah untuk mencegah persaingan yang tidak seimbang. *Kedua*, menyangkut pemberdayaan masyarakat desa sebagai suatu “kebijakan.” Dalam hal ini, bahwa implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa sekurang-kurangnya telah melalui tahap perumusan kebijakan, tahap pelaksanaan dan selanjutnya akan melalui tahap penilaian atau evaluasi kebijakan.

Sudut pandang yang pertama yang paling sering dibahas dalam berbagai literatur maupun penelitian tentang pembangunan desa. Ruang lingkup pembahasannya pun hanya berkisar pada bagaimana kebijakan pemberdayaan itu dilakukan pada kondisi tertentu ; apakah kebijakan pemberdayaan masyarakat desa itu berhasil atau tidak ; program apa yang cocok bagi pemenuhan kebutuhan masyarakat desa ; atau bagaimana dan strategi apa yang dipakai sehingga masyarakat desa dapat mandiri tanpa ada lagi ketergantungan dengan program atau bantuan dari pemerintah. Disadari atau tidak, kondisi tersebut merupakan penyebab sering terjadinya perubahan strategi pemerintah yang telah beberapa kali terjadi dalam merespon berbagai kebutuhan dan kepentingan masyarakat. Sependapat dengan hal tersebut, Rondinelli (1990 : 22) mengemukakan bahwa :

Di bawah kondisi interaksi yang sangat kompleks dan kebijakan pembangunan yang serba tidak pasti, program dan proyek paling banter hanya dapat

dirancang untuk menyingkirkan aspek-aspek negatif pembangunan yang sangat sederhana dan dapat dikendalikan sekaligus melakukan intervensi yang secara strategis dinilai sebagai cara penting dalam menanggulangi secara inkremental.

Jadi walaupun secara implisit kebijakan pemberdayaan masyarakat Kampung merupakan kelanjutan dari kebijakan pembangunan desa sebelumnya, namun kenyataannya sangat dirasakan bahwa perubahan kebijakan akan membuat masalah semakin rumit. Contoh kongkrit adalah perubahan istilah kebijakan dan kelembagaan pemerintah yang secara teknis melakukan pembinaan dan memfasilitasi proses penyelenggaraan pembangunan desa, yang saat ini dikenal sebagai “Pemberdayaan Masyarakat Desa.” Paling tidak sudah tiga kali terjadi perubahan yaitu : “pembangunan masyarakat desa (PMD), “Pembangunan Desa (Bangdes)” dan yang terakhir Pemberdayaan Masyarakat Desa (PMD). Perubahan tersebut dilatarbelakangi oleh perubahan konsep tentang pembangunan yang juga berubah, namun apabila ditelaah dari sudut kebijakan, maka di antara ketiganya produk kebijakannya hampir sama. Sulit diberdakan strategi mana yang mempunyai *output* yang paling menguntungkan bagi masyarakat desa. Berdasarkan pengalaman, program pembangunan yang selama ini dilakukan oleh pemerintah misalnya Bimas (bimbingan masyarakat), Bantuan Desa, P3KT, PKT dan program lainnya, juga masih dipakai dalam kebijakan-kebijakan berikutnya, yang semuanya bertujuan untuk meningkatkan pemerataan pembangunan dan pengentasan kemiskinan masyarakat perdesaan, Namun, ternyata kurang mampu mengatasi kemiskinan secara menyeluruh.

Pada sudut pandang yang kedua yaitu pemberdayaan masyarakat Kampung sebagai suatu “kebijakan”, maka yang ditelaah adalah apakah kebijakan pemberdayaan masyarakat desa dapat dilakukan secara berhasil dan faktor apa yang dapat mempengaruhi sehingga kebijakan itu dapat berhasil. Berhasil dalam arti apa

yang telah menjadi keputusan pemerintah dapat dilakukan sesuai dengan rencana serta menghasilkan *output* sesuai dengan tujuan yang diinginkan.

Sebaliknya, dimaklumi bahwa pemberdayaan masyarakat Kampung merupakan suatu proses yang secara terus menerus dilakukan oleh pemerintah. Kebijakan pemberdayaan masyarakat Kampung tetap merupakan suatu strategi dalam mengatasi berbagai permasalahan di desa. Untuk itu perlu dilakukan dengan 2 (dua) cara, sebagaimana disampaikan oleh Direktur Jenderal Pemberdayaan Masyarakat Desa Departemen Dalam Negeri pada pembekalan akhir masa studi mahasiswa Institut Ilmu Pemerintahan tanggal 20 Juni 2000, yaitu : *pertama*, intervensi Pemerintah ; dan *kedua*, penyerahan wewenang secara proporsional. Penjelasannya sebagai berikut :

a. Intervensi Pemerintah.

Maksud dilakukannya intervensi pemerintah melalui berbagai program pembangunan masyarakat, yaitu : (1) untuk mempercepat proses perubahan dan pembaharuan pada tingkat komunitas, (2) mendorong tumbuhnya integrasi masyarakat lokal terhadap masyarakat nasional, serta (3) memberikan iklim yang kondusif bagi warga masyarakat pada tingkat komunitas dalam menciptakan, mengembangkan dan memanfaatkan peluang bagi peningkatan taraf hidupnya.

b. Penyerahan Wewenang Secara Proporsional.

Otonomi daerah adalah kewenangan Daerah Otonom untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat sesuai dengan peraturan perundang-undangan. Hal ini berarti, Pemerintah menyerahkan wewenang pemerintahan kepada Daerah Otonom (Daerah Kabupaten dan Daerah Kota) sebagai konsekuensi lanjutnya asas desentralisasi. Dengan diserahkannya kewenangan yang luas, nyata dan bertanggungjawab untuk mengatur dan mengurus kepentingan masyarakat setempat menurut prakarsa sendiri berdasarkan aspirasi masyarakat. Sementara itu, dalam rangka pelaksanaan asas desentralisasi. Sehingga hubungan antara Daerah Propinsi dengan Daerah Kabupaten dan Kota adalah hubungan dalam kerangka koordinasi, kerjasama, dan atau kemitraan dalam kedudukan masing-masing sebagai daerah otonom.

Berdasarkan pengalaman pembangunan desa di masa lalu, adanya intervensi pemerintah justru membuat permasalahan bagi pengembangan aspirasi dan inovasi masyarakat untuk secara mandiri melaksanakan pembangunan. Demikian pun kewenangan yang diberikan pada Pemerintah Daerah Kabupaten atau Kota belum menjamin bagi terciptanya kemandirian masyarakat Desa. Kadang-kadang arogansi Pemerintah Daerah terhadap Desa semakin muncul sebagai dampak diberikannya kewenangan yang begitu besar dari pemerintah pusat. Apa yang disebut aliran “Dana Alokasi Umum” dari Pemerintah Pusat ke Pemerintah Daerah, tidak terjadi di desa. Istilah yang melekat di desa sebagai “desa otonom” pun akan sulit terwujud. Padahal beberapa desa yang memiliki kekayaan atau sumber daya alam yang besar, tidak dapat dinikmati oleh masyarakat setempat. Semua itu menjadi hak Pemerintah Daerah untuk mengolahnya.

Untuk itu, pelaksanaan kebijakan pemberdayaan masyarakat desa, sebagaimana Kartasasmita (1996 : 163) menjelaskan bahwa pelaksanaan pembangunan yang ditujukan untuk memberdayakan masyarakat harus memenuhi beberapa persyaratan pokok, sebagai berikut :

- Kegiatan yang dilaksanakan harus terarah bagi atau menguntungkan masyarakat yang lemah, terbelakang, dan tertinggal.
- Pelaksanaannya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri, dimulai dari pengenalan apa yang ingin dilakukan.
- Karena masyarakat yang lemah sulit untuk bekerja sendiri-sendiri akibat kekurangan keberdayaannya, maka upaya pemberdayaan masyarakat menyangkut pula pengembangan kegiatan bersama (*kooperatif*) dalam kelompok yang dapat di bentuk atas dasar wilayah tempat tinggal (kelompok arisan, RT, RW, Dusun, desa), jenis usaha (pertanian, industri, perdagangan), atau kesamaan latar belakang (pemuda,wanita).

- menggerakkan partisipasi yang luas dari masyarakat untuk turut serta membantu dalam rangka kesetiakawanan sosial; disini termasuk keikutsertaan orang-orang setempat yang telah maju, anggota masyarakat mampu lainnya, organisasi-organisasi kemasyarakatan termasuk lembaga swadaya masyarakat setempat, perguruan tinggi dan sebagainya.

Pendapat itu memberikan jalan tengah bagi kepentingan masyarakat desa dan juga kepentingan Pemerintah Daerah. Kondisi seperti ini memungkinkan adanya kerjasama yang baik antara Pemerintah Daerah dengan pemerintah desa termasuk partisipasi masyarakat desa. Pembangunan masa lalu yang lebih menekankan pada pendekatan sektoral yang cenderung terpusat, telah menjadikan pemerintah daerah kurang mendapat kesempatan untuk mengembangkan kapasitasnya dalam penyelenggaraan pemerintahan, pembangunan, serta pelayanan kepada masyarakat secara optimal. Kapasitas pemerintah daerah yang tidak optimal ini disebabkan oleh kuatnya kendali pemerintah pusat dalam proses pembangunan melalui berbagai pedoman dan petunjuk pelaksanaan yang sangat rinci dan kaku. Kuatnya kendali pemerintah pusat terhadap pemerintah daerah pada masa yang lalu telah menyebabkan pula hilangnya motivasi, inovasi, dan kreativitas aparat daerah dalam menjalankan tugas dan fungsi yang menjadi tanggung jawabnya, termasuk dalam pembangunan perdesaan.

Kegagalan pelaksanaan pemberdayaan masyarakat desa selama ini terjadi karena tidak adanya persamaan persepsi antara pemerintah dan masyarakat. Menurut Kartasasmita (1996 : 164) bahwa masalah implementasi kebijakan dapat dilihat pada dua aspek, yaitu :

- 1) *Aspek masyarakat.* Masalah besar yang dihadapi dalam upaya memberdayakan masyarakat adalah ketidaktahuan (*ignorance*) di kalangan masyarakat itu sendiri. Hambatan inilah yang pertama-tama harus diterobos agar masyarakat dibangkitkan kesadarannya bahwa kehidupan yang lebih baik dari sekarang, dan bahwa ada harapan serta peluang untuk memperbaiki kehidupan, tetapi untuk itu harus ada usaha dari diri sendiri. Ini adalah pekerjaan yang tidak mudah, tetapi mendasar sifatnya bagi aparat pemerintah sebagai manajer pembangunan.
- 2) *Aspek aparat pemerintah.* Salah satu hambatan utama bagi pembangunan yang berhasil ternyata adalah aparat pemerintah sendiri. Seluruh bidang studi administrasi pembangunan ditujukan untuk mengatasi masalah ini. Ia menyangkut masalah mental, pengetahuan, kecakapan, dan juga kesejahteraan sumberdaya manusianya. Ia juga menyangkut masalah sistem dan pengorganisasian termasuk tatanan, fungsi, prosedur dan sebagainya, dari aparat pemerintah sebagai aparat manager pembangunan.

Dalam menerobos masalah besar yang dihadapi di dalam masyarakat sebagaimana disebutkan itu, Hikmat (2001 : 73) mengemukakan perlunya memahami jenis-jenis kekuatan yang ada dan berkembang di dalam masyarakat. Kekuatan tersebut adalah :

- *Kekuatan pendorong.* Kekuatan pendorong yang ada dalam suatu masyarakat yang dapat membantu berlangsungnya proses perubahan. Ciri-cirinya adalah : perasaan tidak puas dengan situasi dan kondisi yang telah dirasakan dan biasanya selalu diikuti oleh perasaan adanya sesuatu yang belum terpenuhi, serta rasa bersaing untuk menyesuaikan diri dengan tuntutan kehidupan. Kesadaran adanya kekurangan, dan karena itu berusaha untuk mengejar kekurangan.
- *Kekuatan bertahan.* Kekuatan ini dicerminkan oleh rasa menentang setiap inovasi baru atau mungkin terbatas pada inovasi tertentu yang diduga akan menimbulkan perubahan terhadap sesuatu yang selama ini telah dimiliki dan dipertahankan.
- *Kekuatan pengganggu.* Kekuatan ini timbul dan mengakar di dalam masyarakat karena disebabkan oleh 3 (tiga) hal, yaitu : (1) persaingan untuk memperoleh pengaruh dan dukungan seluruh masyarakat dalam proses pembangunan, sehingga memungkinkan munculnya perpecahan dalam tubuh masyarakat itu sendiri. ; (2) kerumitan inovasi baru yang diperkenalkan untuk menimbulkan perubahan, yang akibatnya masyarakat mengalami kesulitan untuk menerimanya dengan

cepat. ; (3) terbatasnya sumber dayayang diperlukan untuk melaksanakan perubahan, termasuk tenaga, biaya, dan tenaga ahli.

Dari aspek aparat pemerintah, Rondinelli (dalam Supriatna, 2000 : 182) dalam penelitiannya pada negara berkembang, baik yang berkenaan dengan otonomi maupun pemberdayaan masyarakat dan kapabilitas birokrasi, menyimpulkan bahwa :

Kualitas birokrasi pemerintahan lokal sangat ditentukan oleh perilaku, sikap dan kultur yang kondusif sehingga responsif untuk membuat keputusan, membina dan bertanggung jawab dalam meningkatkan program pembangunan bagi kesejahteraan masyarakat.

Lebih lanjut Supriatna (2000 : 183) lebih melihat kepada faktor kapabilitas administrasi dan edukatif dari birokrasi pemerintahan di daerah yang didukung oleh kepemimpinan, adaptasi, pendekatan, bimbingan dan pembinaan, pelatihan, metode, keterpaduan, demokratis atau proaktif, dan partisipatif yang mengacu pada "*human approach*."

Peranan pemerintah dalam proses implementasi kebijakan pemberdayaan masyarakat desa tampak dalam cara-cara suatu pemerintahan mengadakan intervensi kebijakan terhadap lingkungannya. Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja (1988 : 124) mengemukakan bahwa proses implementasi kebijakan pemerintah, bisa berupa :

- (1) Kebijakan langsung, yaitu dimana untuk mencapai tujuan-tujuan maksud, pemerintah mengimplementasikan berbagai keputusan, ketentuan dan aturan yang terdapat dalam kebijakan;
- (2) Kebijakan tak langsung adalah berbagai keputusan atau perundang-undangan, dimana untuk mencapai tujuan yang dimaksudkan, pemerintah tidak mengimplementasikan sendiri kebijakan tersebut, tetapi hanya mengeluarkan ketentuan atau aturan yang dapat mempengaruhi perilaku atau tindakan masyarakat sehingga bergerak ke arah yang sesuai dengan tujuan dimaksud;

- (3) Kebijakan campuran adalah kebijakan dimana untuk mencapai tujuan-tujuan yang dimaksudkan, terbuka kesempatan atau peran yang dapat diimplementasikan baik oleh instansi pemerintah maupun oleh organisasi kemasyarakatan ataupun campuran keduanya”

Kartasasmita (1996 : 159-160) juga mengungkapkan bahwa upaya pemberdayaan masyarakat desa dalam konsepsi pembangunan masyarakat dapat dilihat dari 3 (tiga) aspek, yakni : (1). Menciptakan suasana atau iklim yang memungkinkan potensi masyarakat berkembang (*enabling*), titik tolaknya adalah pengenalan bahwa setiap manusia, setiap masyarakat, memiliki potensi yang dapat dikembangkan. Artinya, tidak ada masyarakat yang sama sekali tanpa daya karena, kalau demikian akan sudah punah. Pemberdayaan adalah upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong (*encourage*), memotivasi, dan membangkitkan kesadaran (*awareness*) akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya. (2) memperkuat potensi atau daya yang dimiliki oleh masyarakat (*empowering*). Dalam rangka menciptakan iklim dan suasana meliputi langkah-langkah nyata, dan menyangkut penyediaan berbagai masukan (*input*), serta pembukaan akses kepada berbagai peluang (*opportunities*) yang akan membuat masyarakat menjadi makin berdaya. Dalam rangka pemberdayaan ini, upaya yang amat pokok adalah peningkatan taraf pendidikan, dan derajat kesehatan, serta akses kepada sumber-sumber kemajuan ekonomi seperti modal, teknologi, informasi, lapangan kerja, dan pasar. Pemberdayaan ini menyangkut pembangunan prasarana dan sarana dasar baik fisik, seperti irigasi, jalan, listrik, maupun sosial seperti sekolah, dan fasilitas pelayanan kesehatan, yang dapat di akses oleh masyarakat pada lapisan paling bawah, serta ketersediaan lembaga-

lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di perdesaan tempat terkonsentrasinya penduduk yang keberdayaannya amat kurang. (3) Memberdayakan mengandung pula arti melindungi. Dalam proses pemberdayaan, harus dicegah yang lemah menjadi bertambah lemah, karena kurang berdaya dalam menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, dalam konsep pemberdayaan masyarakat, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya., adanya peraturan perundangan yang secara jelas dan tegas melindungi golongan yang lemah sangat diperlukan. Melindungi tidak berarti mengisolasi atau menutupi dari interaksi karena hal itu justru akan mengerdilkan yang kecil dan melunglaikan yang lemah. Melindungi harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbangan, serta eksploitasi yang kuat atas yang lemah.

Pemberdayaan masyarakat bukan membuat masyarakat menjadi makin tergantung pada berbagai program pemberian karena pada dasarnya setiap yang dinikmati harus dihasilkan atas usaha sendiri, dan hasilnya dapat dipertukarkan dengan pihak lain. Peran dan tanggung jawab semua pihak terkait, alokasi anggaran belanja dan sistem koordinasi serta komunikasi perlu diperjelas. Secara normal, tim yang memfasilitasi pemberdayaan masyarakat desa terdiri dari tim multidisipliner.

Mengingat pemberdayaan masyarakat desa adalah sebuah pendekatan yang relatif baru, dibutuhkan perubahan perilaku dan sikap dari semua pihak terkait yang terlibat. Untuk memulai perubahan ini hendaknya dilakukan pada skala kecil. Setelah diperoleh pengalaman dan manfaat yang jelas dari pendekatan ini, maka penyebarluasan masyakaya secara lebih luas sudah bisa dimulai. Hal ini bisa

dilakukan dalam organisasi yang sama, dan juga pada organisasi demikian juga sektor-sektor lain.

E. Peran Perempuan dalam Pemberdayaan Masyarakat

Menurut Sanday dalam Kusnadi (2000), “aktivitas yang dilakukan perempuan secara umum adalah aktivitas domestik dan publik”. Aktivitas domestik mencakup aktivitas yang dilakukan dalam bidang pekerjaan yang dibatasi lingkup unit keluarga, sedangkan aktivitas publik mencakup aktivitas di bidang ekonomi dan politik, yang mengambil tempat atau memiliki dampak melampaui batas unit keluarga dan berkaitan dengan pengontrolan orang atau sesuatu.

Keterlibatan perempuan dalam berbagai kegiatan ekonomi lain dalam sektor publik berarti tidak saja meningkatkan peran serta perempuan dalam kegiatan nafkah rumah tangga, atau usaha meningkatkan taraf hidup yang berarti pula meningkatkan produktivitas anggota rumah tangga, khususnya meningkatkan harkat, martabat, dan status sosial perempuan sebagai sumber daya manusia.

Konsekuensi dari peran serta tersebut nampak dari berbagai masalah yang dihadapi perempuan, lebih-lebih dalam hal peran ganda dari perempuan dalam keluarga, rumah tangga dan masyarakat yang lebih luas.

Melihat kedudukan (status) perempuan dalam keluarga, rumah tangga dan masyarakat yang lebih luas dari sudut peran ganda perempuan, maka hal itu berarti:

1. Perempuan sebagai “ibu rumah tangga” dalam keluarga memperankan sebagai tenaga kerja “domestik” yang tidak langsung menghasilkan

pendapatan, namun memberikan dukungan bagi anggota lain “pencari nafkah” untuk memanfaatkan peluang kerja yang ada.

2. Perempuan sebagai tenaga kerja di bidang nafkah yang mendatangkan hasil secara langsung.

Dengan demikian memperlakukan perempuan bukanlah semata-mata menyangkut keadaan perempuan itu sendiri, melainkan menelaah hubungan antara peranan perempuan dan peranan laki-laki (hubungan gender) dalam berbagai bidang kegiatan, baik dalam hal yang menyangkut rumah tangga, maupun yang berhubungan dengan masyarakat yang lebih luas.

Merton (1956), menunjukkan bahwa “peranan berarti sebagai perilaku seseorang dalam memenuhi hak-hak serta kewajiban-kewajiban seseorang, sehubungan dengan posisi sosialnya”. Dalam keterangan lain, Merton memberikan batasan terhadap peranan, sebagai kumpulan pola tindakan tertentu yang harus diwujudkan seseorang dalam struktur sosial tertentu. Batasan-batasan demikian telah memberikan gambaran tentang seperangkat peranan yang dimainkan seseorang, masing-masing akan mencakup beberapa hal: (1) posisi atau status seseorang dalam struktur sosial tertentu, (2) persepsi bagaimana seseorang memainkan peranannya, serta bagaimana dia harus bertindak dan berbuat atas dasar pandangan tersebut, (3) tata cara seseorang memainkan peranannya dan (4) berbagai harapan yang muncul dalam masyarakat terhadap peranannya yang dimainkan seseorang.

Linton (1945), membedakan antara “status dan peranan. Status merupakan sekumpulan hak dan kewajiban yang dimiliki seseorang, sedangkan peranan merupakan aspek dinamis dari status tersebut yang mencerminkan apa yang dilakukan dan menunjuk pada kebudayaan

lingkungannya". Peranan diperoleh melalui proses sosialisasi yang dimulai dalam keluarga prokreasi masing-masing, sedangkan status didapatkan melalui keturunan dan kemampuan pribadi.

Sejalan dengan pendapat Linton, Soerjono Soekanto (1982), berbicara mengenai "masalah status dan peranan wanita ini, berkaitan dengan pandangan masyarakat mengenai sesuatu yang dihargai yang mengembangkan sistem berlapis-lapis dalam masyarakat". Kemudian ditambahkan pula oleh Patirin A. Sorokin (1959), bahwa "Sesuatu barang yang dihargai di dalam masyarakat mungkin berupa uang atau benda-benda yang bernilai ekonomis, mungkin pula berupa tanah, kekuasaan, ilmu pengetahuan, atau mungkin juga keturunan dari keluarga terhormat". Selanjutnya Sorokin menunjukkan bahwa:

"Sistem berlapis-lapis di dalam masyarakat merupakan ciri yang tetap dan umum dalam setiap masyarakat yang hidup teratur. Barang siapa memiliki sesuatu yang berharga itu dalam jumlah sangat banyak, dianggap mempunyai kedudukan tinggi, dan bagi mereka yang hanya memiliki sedikit atau sama sekali tidak memilikinya mempunyai kedudukan yang rendah".

Selanjutnya Soerjono Soekanto mengemukakan pula bahwa:

"Semakin kompleks suatu masyarakat, semakin kompleks perbedaan kedudukan dan peranan dengan aneka ukuran yang diterapkannya. Ukuran atau kriteria untuk menentukan status seseorang antara lain berupa : kekayaan, kekuasaan, kehormatan dan ilmu pengetahuan".

Sehubungan dengan hal tersebut Boserup (1970), menyatakan bahwa:

"pendidikan akan memperbaiki status, kemampuan dan keahlian perempuan hal mana menunjukkan status sosial perempuan dalam masyarakat. Pendidikan juga meningkatkan aspirasi dan harapan seseorang perempuan dalam memperoleh penghasilan dan kehidupan yang lebih baik".

Uraian tersebut menunjukkan seperangkat peranan perempuan dalam hubungannya dengan orang lain, seperti dengan suami, anak, orang tua dan lain sebagainya. Peranan demikian, menempatkan status perempuan sebagai istri, anak, ibu, anggota keluarga, warga desa, pencari nafkah dan pekerja rumah tangga.

Untuk melihat dengan jelas bagaimana perempuan mengambil peran dalam pekerjaan di sektor publik, Pujiwati Sayogyo (1983), mengemukakan konsepsi “kerja” sebagai berikut: (a) Para pelaku mengeluarkan energy, (b) Para pelaku terjalin dalam interaksi sosial dan mendapatkan status, (c) Para pelaku memberikan sumbangan dalam produksi barang dan jasa, (d) Para pelaku mendapatkan penghasilan *cash* atau natura, (e) Para pelaku mendapatkan hasil yang mempunyai nilai waktu.

Perubahan pembagian kerja dalam keluarga dan rumah tangga oleh Levy (1971), dijadikan dasar dalam pendekatannya, yaitu teori “Analisa Struktural dan Fungsional”. Dalam hal ini Levy berasumsi bahwa mantapnya keluarga sebagai sistem sosial, maka dapat dianalisa ke-lima fungsinya yang saling berkaitan walaupun masing-masing mempunyai fungsi otonomi. Kelima fungsi tersebut adalah : (1) Diferensiasi peranan; (2) Alokasi ekonomi; (3) Alokasi kekuasaan; (4) Alokasi solidaritas; (5) Fungsi integrasi dan ekspresi.

Levy (1971), mengemukakan bahwa “*Diferensiasi peranan adalah cara mendudukan seseorang kerabat pada posisi tertentu dalam sistem kekerabatan menurut fungsinya masing-masing, dengan mempertimbangkan perbedaan umur, seks, posisi ekonomi dan pembagian kekuasaan*” Perbedaan posisi pria dan wanita dalam keluarga hanya sebagian yang disebabkan oleh

alasan-alasan biologis yang didasarkan atas lemah atau kuatnya fisik. Pertimbangan lebih penting berasal dari pola sosial budaya, yang menentukan siapa yang meraja dalam sistem kekerabatan, siapa yang mengasuh dan mendidik anak, siapa yang mencari nafkah, siapa yang tampil pada kegiatan-kegiatan ritual dan seterusnya. Dengan demikian diferensiasi peranan erat hubungannya dengan kerja.

Pudjiwati (1989), mengemukakan bahwa fungsi “diferensiasi peranan” tersebut pada kenyataannya menunjuk pada suatu analisa hubungan laki laki dan perempuan (*gender related analysis*), yang mendasari metoda perbandingan mengenai alokasi curahan tenaga antara perempuan dan laki laki dalam berbagai pekerjaan dan kegiatan lainnya.

Alokasi ekonomi dalam suatu sistem kekerabatan diperlukan mengingat konsumsi anggota-anggotanya akan barang dan jasa (makanan, pakaian, perumahan dan lain-lain) yang harus diperoleh karena usaha produksi anggota-anggotanya pula. Di sini akan nampak siapa yang ikut serta dalam mendatangkan *income*/pendapatan.

Mengenai sumber penghasilan dari usaha produktif/mencari nafkah, Levy menyatakan pentingnya membedakan : (a) apakah karena usaha seseorang atau beberapa orang anggota keluarga yang menggabungkan diri dalam kesatuan-kesatuan produktif/ pencaharian nafkah di luar keluarga: dalam hal pertama contohnya petani, pengusaha kerajinan rumah tangga, tergantung dari luasnya usaha; sedangkan dalam hal kedua, adalah buruh upahan (buruh tani dan buruh), dan (b) apakah hasil dari usaha produktif/ mencari nafkah (barang dan jasa) diusahakan untuk dikuasai langsung oleh

keluarga itu sendiri atukah diusahakan untuk pihak luar dengan menghasilkan uang dari padanya dibelikan barang dan jasa bagi konsumsi keluarga tersebut; hal pertama yang “*self sufficien*” sudah jarang ada; dalam hal kedua adalah umum, dimana masih tetap ada sebagian yang diusahakan untuk langsung dikonsumsi sendiri, seperti jasa-jasa pekerjaan rumah tangga yang dikerjakan sendiri oleh keluarga.

Dalam hal konsumsi pun keluarga mengenal pola-pola konsumsi yang merupakan sebagian dari kebudayaan, atau menunjuk suatu kelas ekonomi dalam masyarakat yang bersangkutan. Dapat terjadi bahwa semua penghasilan dari pencari nafkah dalam keluarga dikumpulkan menjadi dana bersama (antara lain sesuai kebutuhan masing-masing anggota yang diakui), menurut pos-pos pengeluaran sesuai dengan norma-norma tingkat hidup keluarga itu. Pentingnya dalam hal-hal tersebut memperhatikan antara siapa-siapa dana bersama dibentuk, siapa yang menguasainya dan bagaimana cara menjalankan wewenang itu.

Untuk kelangsungan keluarga sebagai grup, diperlukan pula fungsi alokasi (distribusi) dari pada kekuasaan antar pelakunya. Levy membedakan kedua pola alokasi kekuasaan dan kewibawaan, yaitu ada yang menurut hierarkhi (si pemegang kekuasaan bertanggung jawab kepada pihak yang lebih di atas dan bukan secara langsung kepada yang dipimpinnya).

Menurut Blood dan Wolf (dalam Pudjiwati Sayogyo, 1983) “untuk mengetahui status serta peranan perempuan yang berbeda-beda di dalam maupun di luar rumah tangga, perlu mengetahui distribusi serta alokasi kekuasaan karena merupakan hal yang paling mendasar dalam struktur

keluarga". Kekuasaan diartikan sebagai kemampuan untuk mempengaruhi orang lain yang bisa tersebar dengan sama nilai (*equal*) dan tidak sama nilai (*unequal*). Berdasarkan pemikiran tersebut Pudjiwati Sayogyo, dkk (1980), menggambarkan lima tipe pengambilan keputusan yaitu: "(1) pengambilan keputusan oleh suami sendiri, (2) pengambilan keputusan oleh istri sendiri, (3) pengambilan keputusan bersama setara, (4) pengambilan keputusan bersama istri dominan, dan (5) pengambilan keputusan bersama suami dominan".

Penelitian Bulkis (1990), di Desa Tarikolot, Jawa Barat menunjukkan bekerjanya perempuan di bidang nafkah, berarti ada sumbangan pribadi perempuan dalam peningkatan pendapatan rumah tangga. Hal ini sangat penting artinya, karena ternyata meningkatkan status sosial wanita, yang berarti pula bahwa wanita bisa mandiri tanpa tergantung pada orang lain dan juga diakuinya otonomi (keberadaan) wanita ikut memutuskan suatu kepentingan, sehingga proses kegiatan rumah tangga lebih lancar.

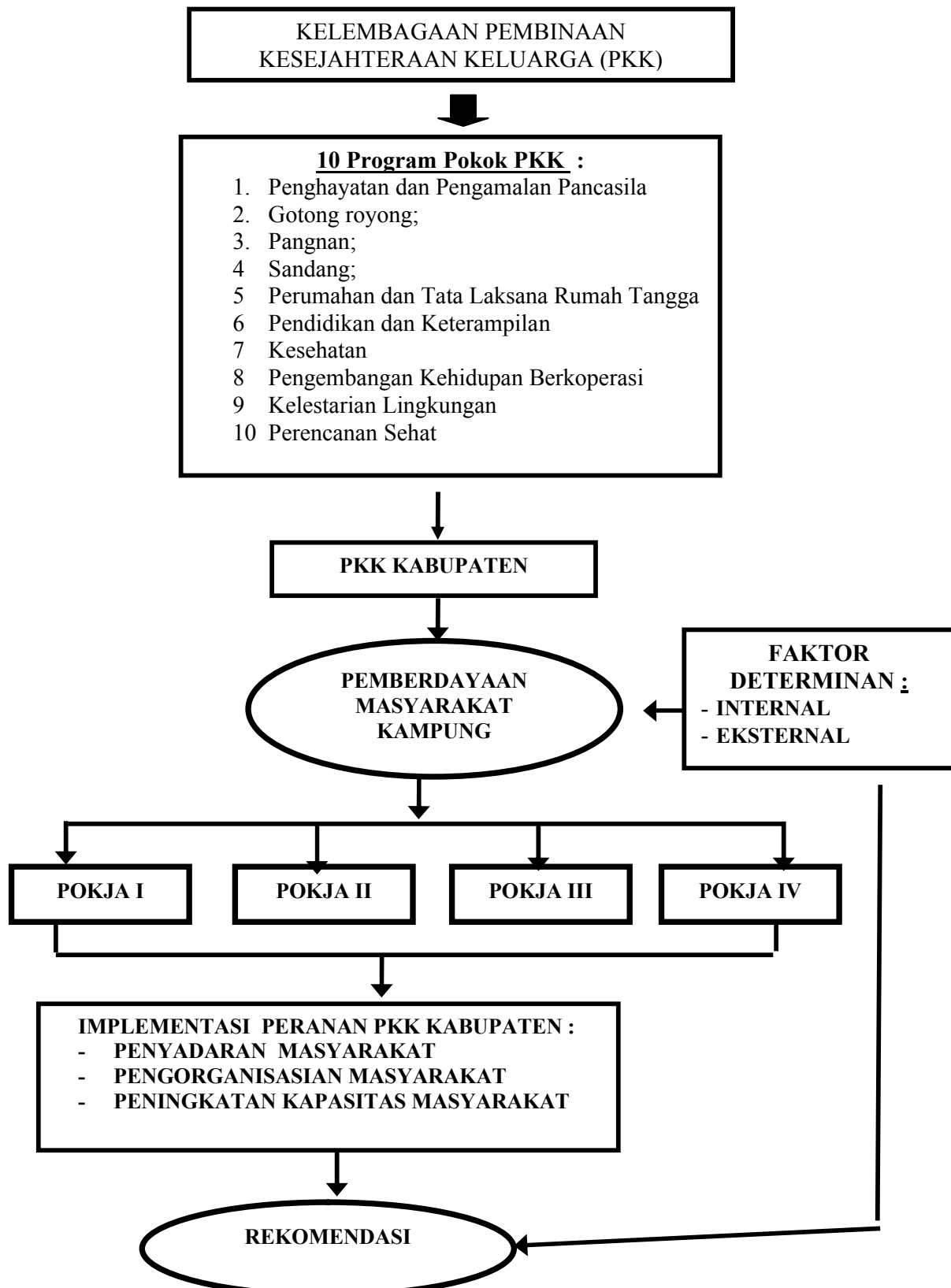
F. Kerangka Konseptual

Sesuai dengan kebijakan pemerintah mengenai Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan melalui keluarga sebagai unit atau kelompok terkencil dalam masyarakat dengan wanita sebagai pemeran utamanya, maka gerakan pembinaan kesejahteraan keluarga mempunyai peran yang cukup penting di dalam masyarakat. Konteks keluarga sebagai unit terkecil dalam masyarakat yang mempunyai arti besar dalam proses pembangunan karena Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan wilayah terbentang dari Sabang sampai Merauke, terbangun atas unit-unit keluarga kecil. Dengan demikian, mewujudkan tata

kehidupan dan penghidupan keluarga yang terberdayakan maka kesejahteraan di setiap tingkatan wilayah baik yang skala kecil sampai nasional dapat tercapai. Olehnya itu, kondisi keluarga dapat menjadi salah satu barometer bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Namun demikian, secara empiric memperlihatkan bahwa selama ini masih sangat dirasakan oleh masyarakat dan ibu-ibu anggota PKK bahwa peran TP (Tim Pembina) PKK selama ini belum optimal walaupun kemanfaatan kegiatan yang selama ini dilakukan telah dapat dirasakan. Belum optimalnya peran yang dimainkan oleh TP-PKK diasumsikan sebagai akibat keterbatasan sumber daya manusia, sumber dana, waktu dan tenaga. TP-PKK memiliki banyak keterbatasan SDM karena pengurus tim penggerak khususnya di tingkat desa/kampong yang pada umumnya tidak berpendidikan tinggi, sehingga jangkauan pengetahuan dan wawasannya belum cukup mampu menerjemahkan sekaligus mengembangkan program-program PKK agar lebih variatif, menarik dan berdaya ungkit tinggi dalam rangka mewujudkan keluarga yang sehat dan berketahanan.

Optimalisasi membudayakan gerakan PKK sesuai dengan eksistensinya akan menjadikan 10 program pokoknya, yakni penghayatan dan pengamalan Pancasila, gotong royong, pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga, pendidikan dan ketrampilan, kesehatan, mengembangkan kehidupan berkoperasi, kelestarian lingkungan hidup, serta perencanaan yang sehat sebagai kekuatan yang strategis dalam mencerdaskan dan mensejahterakan kehidupan masyarakat. Secara skematik kerangka konseptual penelitian dapat dilihat pada gambar 3.



Gambar 3. Kerangka Pikir Penelitian

BAB III

METODOLOGI PENELITIAN

A. Pendekatan dan Jenis Penelitian

Penelitian ini menggunakan pendekatan metode kualitatif yang bertujuan membahas objek yang diteliti secara mendalam (Creswell, 1994). Jenis penelitian adalah studi kasus. Strategi ini merupakan metode yang dianggap tepat untuk sebuah studi yang mempelajari mendalam tentang dinamika atau keadaan kehidupan sekarang dengan latar belakangnya dalam interaksi dengan lingkungan dari suatu unit sosial seperti individu, kelembagaan, komunitas dan masyarakat (Yin, 1997).

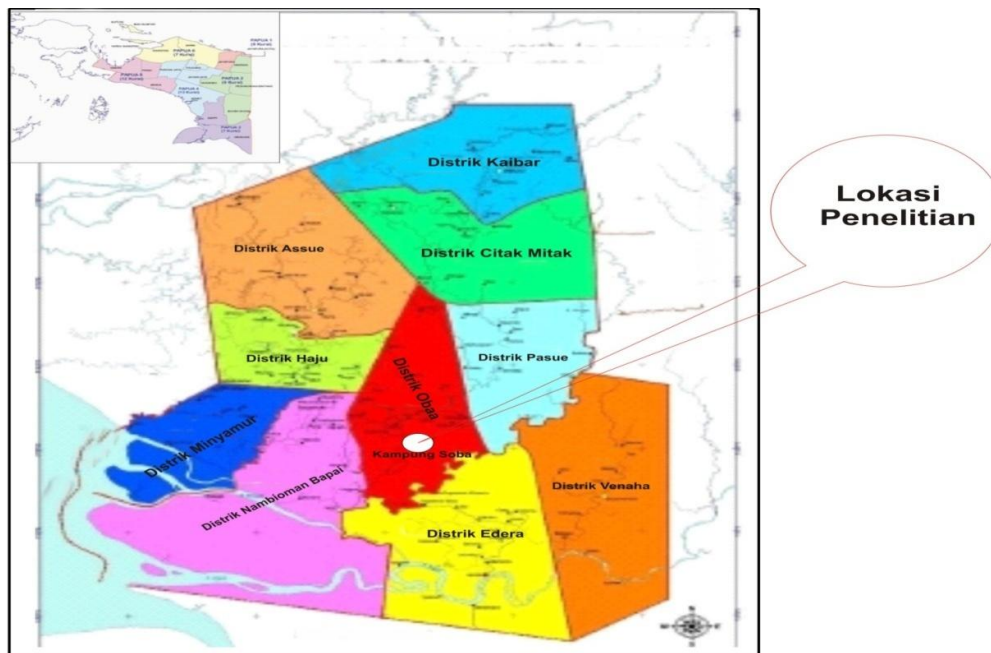
B. Pengelolaan Peran sebagai Peneliti

Rancangan dan pelaksanaan penelitian bersifat responsif dan kreatif sesuai dengan bentuk ritme dan kemungkinan yang ada di lapangan. Dalam kajian ini, peneliti melakukan pengamatan terlibat aktif dengan berusaha memperlama keberadaan dalam komunitas, mengintensifkan observasi dan wawancara yang dilakukan sedalam mungkin (*in-depth*). Untuk menghindari subyektifitas jawaban informan karena interaksi langsung dengan peneliti, materi pertanyaan yang diberikan sifatnya tidak menilai atau mengintervensi, tetapi lebih kepada materi pertanyaan yang mengarahkan informan untuk mengungkapkan

pengalaman yang dialami atau pernah dialaminya yang diantaranya melalui *life-history* (Koentjaraningrat, 1994).

C. Waktu dan Tempat Penelitian

Menentukan lokasi penelitian dilakukan secara sengaja (*purposive*) pada unit kampung yang memungkinkan untuk melakukan studi mendalam tentang komunitas masyarakat kampung secara menyeluruh. Kampung yang dipilih adalah Kampung Soba Distrik Obaa sebagai wilayah kasus dengan dasar pertimbangan metodologis berdasarkan survey awal yang dilakukan, yakni : kampung ini merupakan salah satu wilayah kegiatan program PKK Kabupaten Mappi. Penelitian ini berlangsung selama tiga bulan, yaitu; Bulan Agustus sampai dengan Bulan November 2011.



Gambar 4. Peta Wilayah Penelitian di Kabupaten Mappi Distrik Obaa

D. Sumber Data

Sumber data terdiri dari data primer dan sekunder. Data primer diperoleh dari hasil wawancara dan observasi, sedang data sekunder bersumber dari instansi-instansi terkait serta hasil-hasil laporan, penelitian sebelumnya yang dapat mendukung kajian penelitian.

Pengumpulan data kualitatif dilakukan melalui penentuan informan didasarkan pada informasi awal tentang warga komunitas yang terlibat dalam kegiatan program PKK, terutama yang berposisi sebagai anggota PKK, kader PKK serta Tim Pembina PKK. Kepada informan yang telah diwawancarai ditanyakan tentang warga komunitas yang dapat dijadikan informan berikutnya (teknik *efek snowball*). Disamping itu ada juga informan yang ditentukan sendiri oleh peneliti, seperti tokoh masyarakat/adat, pemuka agama, tokoh pemuda, aparat distrik, aparat kampung dan sebagainya. Demikian proses ini berlangsung sehingga data yang terkumpul mencapai tingkat kecukupan. Perulangan wawancara untuk informan tertentu dapat dilakukan, apabila informan tersebut dianggap potensial mengungkap banyak hal yang berkaitan dengan penelitian ini. Prinsip triangulasi pengumpulan data juga dipraktikkan, dalam arti suatu tema pertanyaan tidak hanya diandalkan pada satu sumber informasi saja, melainkan kebenaran informasi disandarkan pada beberapa informan, hal ini dimaksudkan untuk menghindari subyektifitas jawaban yang diberikan oleh informan.

E. Teknik Pengumpulan Data

Dalam studi kasus, sejumlah data eklektif tertentu dikumpulkan dan dipadukan dalam proses analisis, serta disajikan sedemikian rupa untuk mendukung tema utama yang menjadi fokus penelitian, sehingga merupakan suatu konstruksi tersendiri sebagai suatu produk interaksi informan, lapangan penelitian dan peneliti. Adapun teknik pengumpulan data yang digunakan meliputi :

1. Wawancara Mendalam

Wawancara mendalam (*in-depth interview*) dilakukan melalui sejumlah pertemuan dengan informan yang didalamnya berlangsung tanya jawab dan pembicaraan terlibat mengenai berbagai aspek permasalahan yang akan dicari dalam penelitian. Selama penelitian berlangsung telah diadakan sebanyak 20 kali pertemuan dengan informan. Dalam prosesnya, selain informan menjelaskan informasi mengenai dirinya, seperti aktivitas usaha, kehidupan keluarga, atau pandangan hidupnya; juga dituntun untuk menjelaskan hal di luar dirinya seperti kondisi komunitas, kegiatan-kegiatan PKK dan pembangunan yang pernah dilakukan atau sementara dilakukan. Penggunaan *life-history* dipraktekkan untuk beberapa informan kunci. Pencatatannya dilakukan pada saat wawancara berlangsung.

Fokus wawancara mendalam terbagi dua bagian, dengan strategi pertanyaan yang gampang dimengerti dan diingat oleh informan tanpa mengurangi makna dan tujuan yang dicari dari permasalahan penelitian. Tahapan-tahapan itu adalah sebagai berikut : *Pertama*, penggambaran umum mengenai pelaksanaan Program PKK dalam upaya pemberdayaan

masyarakat; *Kedua*, penggambaran tentang hal-hal yang mempengaruhi upaya pelaksanaan program PKK dalam mewujudkan pemberdayaan masyarakat serta konstruksi gender yang dipengaruhi oleh budaya masyarakat di Kampung Soba. Selama penelitian berlangsung telah diwawancarai sebanyak 29 informan, yang terdiri dari; 15 orang masyarakat sebagai anggota PKK, 3 orang kader PKK, 4 orang Tim Pembina PKK, 1 orang tokoh adat, 2 orang aparat distrik, 2 orang aparat kampung 2 orang tokoh pemuda.

2. Pengamatan (*observation*)

Pengamatan dilakukan dengan dua cara yaitu, pengamatan biasa dan berpartisipasi. Data yang dikumpulkan melalui pengamatan biasa adalah data yang dapat diamati oleh peneliti tanpa menuntut keterlibatan secara langsung. Jenis data yang diperoleh dengan cara ini adalah antara lain, keadaan pemukiman penduduk, pola aktivitas dan kegiatan sehari-hari penduduk. Sedangkan pengamatan berpartisipasi (*full observation participation*) dilakukan untuk memperoleh data yang menuntut keterlibatan peneliti dalam setting yang diteliti, seperti perilaku dan aktivitas masyarakat, serta hal-hal yang menyangkut substansi permasalahan dalam penelitian, khususnya kegiatan-kegiatan yang dilakukan oleh kader dan tim pembina PKK sebagai implementasi dari program PKK di Kampung Soba.

3. *Group Discussion* (Diskusi Kelompok)

Diskusi kelompok dilakukan dengan melibatkan sejumlah *stakeholder*, seperti anggota masyarakat khususnya perempuan di Kampung Soba, kader dan pembina PKK, aparat distrik dan kampung yang dianggap punya kapasitas memberikan informasi sesuai dengan tema permasalahan penelitian. Diskusi kelompok ini juga dimaksudkan untuk pengecekan ulang terhadap sejumlah informasi yang membutuhkan penjelasan lebih lanjut. Pendekatan ini dilakukan untuk memperoleh gambaran yang lebih utuh dari persoalan yang sedang dibahas.

4. Studi Pustaka

Studi pustaka dilakukan untuk menelaah sejumlah sumber tertulis, dalam rangka memperoleh data yang berkaitan dengan tujuan penelitian yang dimaksud, seperti; data demografi, infrastruktur distrik dan kampung, dokumen Rencana Program PKK Kabupaten dan sebagainya.

F. Teknik Analisis Data

No.	Tujuan	Variabel dan Deskripsi		Teknik Analisis yang digunakan
		Variabel dan Indikator	Deskripsi	
1	Untuk mendeskripsikan eksistensi kelembagaan PKK Kabupaten pada tingkat kelompok masyarakat di Kampung Soba.	Eksistensi gerakan PKK : 1. Penyadaran a. Tujuan PKK b. Sasaran 2. Pengorganisasian • Struktur Peran dan Fungsi 3. Peningkatan Kapasitas a. Penyuluhan b. Pelatihan keterampilan c. Bantuan Fasilitas	Optimal atau tidak optimalnya peran PKK Kabupaten pada tingkat kelompok masyarakat kampung	Deskriptif Kualitatif
2	Untuk menjelaskan faktor-faktor internal dan eksternal yang mendukung dan menghambat peranan PKK Kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Soba.	1. Faktor Internal 2. Faktor Eksternal	Determinan yang mendukung dan menghambat peran PKK dalam pemberdayaan masyarakat	Deskriptif Kualitatif
3.	Merumuskan arahan manajemen perencanaan program PKK Kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat di Kampung Soba	Analisis Kontekstual berdasarkan kondisi riil yang dipadukan dengan konsep teoritis	Rekomendasi	Deskripsi kualitatif

Data yang terkumpul dari hasil penelitian yang dilakukan, diolah dan kemudian dianalisis berdasarkan pendekatan analisis deskriptif kualitatif. Matriks pendekatan analisis data sebagaimana disajikan pada Tabel 1.

Tabel 1. Teknik Analisis Data Penelitian

G. Konsep Operasional

Dalam upaya menyamakan persepsi terhadap variabel digunakan dalam penelitian ini, maka diuraikan beberapa konsep operasional sebagai berikut :

1. **Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK)** adalah gerakan nasional dalam pembangunan masyarakat yang tumbuh dari bawah yang pengelolaannya dari, oleh dan untuk masyarakat menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, Berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesejahteraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan.
2. **Struktur kelembagaan PKK Kabupaten pada tingkat kelompok masyarakat di Kampung Soba** , dilihat dari dua aspek yaitu :
 - a. Pengetahuan mengenai PKK yang terdiri dari; tujuan, sasaran, struktur serta peran dan fungsi
 - b. Pembinaan yang terdiri dari; keaktifan pengurus (kader) dan keaktifan anggota kelompok masyarakat binaan
3. **Tim Penggerak/pembina PKK** adalah mitra kerja pemerintah dan organisasi kemasyarakatan, yang berfungsi sebagai fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak pada masing-masing jenjang untuk terlaksananya program PKK
4. **Anggota Tim Penggerak PKK** adalah warga masyarakat baik laki-laki maupun perempuan, perorangan, bersifat sukarela, tidak mewakili organisasi, golongan partai politik, lembaga atau instansi, dan berfungsi sebagai perencana, pelaksana pengendali Gerakan PKK.
5. **Pemberdayaan Masyarakat Kampung** : upaya yang dilakukan dalam meningkatkan kemampuan masyarakat dalam mengaktualisasikan dirinya. Dalam penelitian ini ditekankan pada kemampuan ibu-ibu rumah tangga dalam mengakselerasi dari program PKK.
6. **Kesejahteraan Keluarga** adalah kondisi tentang terpenuhinya kebutuhan dasar manusia dari setiap anggota keluarga secara material, sosial, mental dan spiritual sehingga dapat hidup layak sebagai manusia yang bermanfaat.
7. **Kader Umum** adalah mereka yang telah dilatih atau belum dilatih tetapi memahami, serta melaksanakan 10 Program Pokok PKK, yang mau dan mampu memberikan penyuluhan dan menggerakkan masyarakat untuk melaksanakan kegiatan yang diperlukan.

8. **Kader Khusus** adalah Kader Umum yang mendapat tambahan pengetahuan dan ketrampilan tertentu, antara lain melalui pelatihan-pelatihan yang diselenggarakan oleh PKK, lembaga, instansi pemerintah atau non pemerintah. Data tentang kader khusus dicantumkan dalam data Pokja masing-masing
9. **Kelompok PKK** adalah kelompok-kelompok yang berada di bawah Tim Penggerak PKK Desa/Kelurahan atau Kampung, yang dapat dibentuk berdasarkan kewilayahan atau kegiatan

BAB IV

HASIL DAN PEMBAHASAN

A. KEADAAN GEOGRAFIS DAN LUAS WILAYAH ADMINISTRATIF

1. Letak Geografis Distrik Obaa

Distrik Obaa sebagai tempat penelitian, merupakan wilayah yang terletak di Kabupaten Mappi Provinsi Papua Barat. Kabupaten Mappi merupakan Kabupaten pemekaran baru yang di mekarkan pada tahun 2000, sebagian besar masyarakatnya berasal dari Suku *Yaghai* dan *Auyu*. Secara umum terdapat 6 distrik di kabupaten Mappi dan salah satunya adalah Distrik Obaa, yang terletak di tengah-tengah lingkup wilayah Kabupaten Mappi. Sejarah Distrik Obaa didirikan pada tahun 1937 oleh Misionaris (Katholik) yang datang mengajarkan ajaran agama dan membuka pendidikan formal maupun nonformal. Disamping itu juga mengajarkan keterampilan pada masyarakat terutama bertani. Untuk mencapai Distrik Obaa dapat ditempuh dengan berjalan kaki dengan jarak tempuh 15 Km dari ibukota kabupaten, selain berjalan kaki Distrik Obaa juga dapat ditempuh dengan menggunakan jalur udara dan perairan.

Secara goeografis dan administratif Distrik Obaa memiliki batas-batas wilayah sebagai berikut : Sebelah utara berbatasan dengan Distrik Citak Mitak, bagian selatannya berbatasan dengan Distrik Edera, sementara disebelah timur berbatasan dengan Distrik Passue dan Distrik Haju berada di sebelah barat wilayah Distrik Obaa. Distrik Obaa memiliki luas wilayah 2.307 Km²

2. Topografi Wilayah

Wilayah Distrik Obaa memiliki topografi yang pada umumnya hampir sama dengan distrik-distrik lainnya yang berada di Kabupaten Mappi, yakni merupakan dataran rendah dan sebagian besar wilayahnya merupakan rawa-rawa. Sehingga untuk menjangkau perkampungan dalam distrik tersebut, tidak jarang menggunakan transportasi perahu dengan melewati rawa-rawa yang merupakan pemisah antar kampung satu dengan yang lainnya. Selain itu juga topografi wilayah Distrik Obaa yang merupakan dataran rendah ternyata memiliki ketinggian wilayah dari permukaan laut 0-100 mdpl.

3. Keadaan Iklim

Keadaan Iklim di Distrik Obaa pada umumnya memiliki tipe iklim yang hampir sama dengan daerah-daerah yang terdapat di Indonesia, dimana tipe iklim yang terdapat di Distrik tersebut bertipe iklim C (menurut klasifikasi Schmidt-Fergusson) yakni dengan rata-rata 5 bulan mengalami bulan basah dan 7 bulan mengalami bulan kering. Musim hujan mulai sekitar bulan November dan berakhir sekitar bulan Mei. Puncak musim hujan jatuh pada bulan-bulan Desember, Januari dan Februari. Musim kemarau mulai pada bulan Juni dan berakhir sekitar bulan Oktober. Suhu udara rata-rata 24,24°C, suhu maksimum dapat mencapai 30°C dan suhu minimum dapat mencapai 13,60°C. Suhu yang panas biasanya terjadi pada bulan Oktober, sedang suhu yang dingin terjadi pada bulan Agustus. Kelembaban udara rata-rata 78,37% dengan intensitas penyinaran sebesar 71,45%.

4. Demografi Wilayah

Distrik Obaa yang merupakan distrik dengan kepadatan penduduk terbesar diantara distrik-distrik lainnya yang berada di Kabupaten Mappi. Memiliki konsentrasi kepadatan penduduk yang hampir merata di beberapa kampung-kampung yang terdapat di wilayah distrik tersebut. Hal itu disebabkan karena kebiasaan turun temurun atau prosesi adat yang masih banyak dianut oleh masyarakat Distrik Obaa yang mengharuskan masyarakat membuat rumah yang bergerombol di suatu area atau perkampungan tertentu dengan keunikan tersendiri.

Perumahan masyarakat yang terdapat di distrik ini dibuat dengan bahan-bahan lokal yang sangat sederhana dan tidak membutuhkan biaya yang cukup besar, bahkan hampir dalam pembuatan rumah yang berada di perkampungan terpencil di distrik tersebut tidak mengeluarkan biaya sama sekali, karena semua bahan bangunan yang digunakan di peroleh dari alam sekitar. Perumahan masyarakat di Distrik Obaa menggunakan konstruksi kayu dengan dinding gaba-gaba dan beratap daun sagu, hal tersebut merupakan konstruksi bangunan warisan nenek moyang mereka yang masih dipertahankan hingga sekarang.

Seperti rumah tangga pada umumnya di Distrik Obaa, terdapat beberapa orang yang diam bersama dan hidup bersama dari satu anggaran belanja (seperiuik), mereka itu biasanya terdiri atas kepala rumah tangga dan anggota lainnya adalah istri dan anak-anak yang dilahirkan. Suami bersama istri dan anak-anaknya, khususnya anak yang masih kecil atau belum kawin untuk kehidupan sehari-hari masih dalam tanggungan ayah dan ibu atau kedua

orang tuanya. Tetapi tidak jarang dan bukan hal yang asing lagi terlihat dimana peran vital anak-anak di Distrik Obaa dalam membantu orang tuanya mencari nafkah untuk kelangsungan hidup mereka.

Sesuai dengan hasil sensus penduduk Kabupaten Mappi pada tahun 2010 tercatat jumlah keseluruhan penduduk Distrik Obaa mencapai 19.323 Jiwa, dengan kepadatan penduduk mencapai 8,31 Km² yang terdiri dari laki-laki mencapai 10.451 Jiwa dan perempuan mencapai 8.872 jiwa. Data jumlah penduduk tersebut membuat dan menempatkan Distrik Obaa sebagai distrik yang memiliki jumlah penduduk paling besar diantara distrik yang terdapat di Kabupaten Mappi.

Tingkat pendidikan masyarakat umumnya masih sangat rendah, sebagian besar hanya tamat SD dan hanya beberapa yang tamat SMP. Khususnya perempuan tingkat pendidikannya lebih rendah dari kaum laki-laki, itu ditunjukkan dengan banyaknya yang tidak sekolah. Hal tersebut disebabkan karena adanya anggapan dalam masyarakat bahwa kaum perempuan harus memiliki tingkat pendidikan yang lebih rendah dibandingkan pendidikan dari kaum laki-laki.

5. Infrastruktur Distrik

Infrastruktur yang terdapat di Distrik Obaa belum memadai, hal tersebut dibuktikan dengan akses kelembagaan pemerintah pada kampung-kampung masih sangat terbatas, walaupun dekat dengan ibukota Kabupaten. Selain itu juga akses kesehatan hanya ada di ibu kota Kabupaten dan kesadaran

masyarakat berobat juga masih sangat terbatas. Pada umumnya masyarakat Distrik Obaa masih mengandalkan atau menggunakan obat-obat tradisional dan jasa dukun kampung. Untuk keperluan sehari-hari masyarakat setempat hanya mengandalkan pasar yang dekat dengan kampung. Sedangkan untuk transportasi yang terdapat di Distrik ini terbagi atas tiga bentuk jalur transportasi yakni transportasi udara, transportasi perairan, dan transportasi darat yang pada umumnya ketiga transportasi tersebut masih berfungsi baik sehingga sangat membantu masyarakat setempat untuk memasarkan hasil-hasil bercocok tanam dan usaha lainnya keluar. Untuk akses pendidikan berupa SD, SMP berjalan baik dan lancar semuanya dari YPPK (Yayasan Pendidikan Persekolahan Katholik), fasilitas/sarana serta guru masih sangat terbatas.

6. Perekonomian Lokal

Perekonomian lokal masyarakat Distrik Obaa saat ini terkonsentrasi pada hasil pertanian berupa sayur dan buah-buahan yang walaupun sangat terbatas karena kurangnya tempat pemasaran yang dapat menampung hasil bercocok tanam masyarakat setempat. Rendahnya penghasilan masyarakat dari menjual hasil pertanian mendorong masyarakat untuk menjual kayu dengan meminta bantuan pihak gereja untuk diolah menjadi balok atau papan. Hasilnya tidak memuaskan masyarakat karena pihak gereja tidak punya dana untuk membayar tunai jadi harus menunggu kayu laku dijual. Selain itu juga aktivitas ekonomi lainnya dapat terlihat dari beberapa rumah tangga yang melakukan usaha jual-jualan dengan maksud membantu pendapatan keluarga.

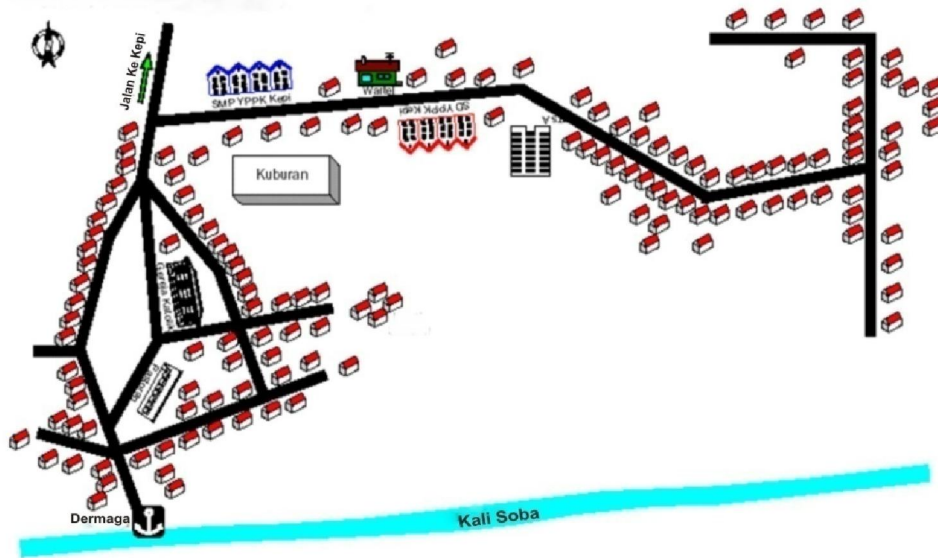
7. Sejarah dan Keadaan Umum Kampung Soba

Kampung Soba berada pada Distrik Oba Kabupaten Mappi memiliki kondisi geografis dominan berupa rawa sebesar 25%, datar 10%, bergelombang 40% dan berbukit 25%. Penduduk Kampung Soba berjumlah 983 jiwa (500 KK) yang meliputi 562 laki-laki dan 421 perempuan dengan jumlah tenaga potensial sebesar 600 jiwa. Batas wilayah Kampung Soba disebelah utara Kampung Muin, sebelah timur Kampung Rep, sebelah selatan Kampung Kepi dan sebelah barat berbatasan dengan Distrik Haju. Sekitar tahun 1920 di Kampung Soba masih sering terjadi perang suku antara satu kampung dengan kampung lainnya. Wabah penyakit yang pernah menyerang penduduk kampung Soba pada masa ini adalah cacar, diare, dan muntaber termasuk malaria. Missionaris Khatolik dibantu oleh para Katekis yang berasal dari Maluku masuk tahun 1937 membawa misi pewartaan khabar gembira (Injil), mengajarkan pendidikan yang berawal dari pendidikan non formal ke pendidikan formal. Misionaris Katolik juga memperkenalkan kepada masyarakat cara tanam pola kebun tanaman umbi-umbian dan sayur-sayuran sekaligus dengan pembagian bibit-bibit tanaman yang akan diajarkan tersebut. Masuknya agama Katolik membawa perubahan perilaku karena masyarakat mulai mengenal Tuhan dan serta ajaran-ajaran positif dari Khabar Gembira dan sejak saat itu kebiasaan mengayau mulai ditinggalkan. Sekitar tahun 1960 pendatang dari daerah lain seperti suku Bugis dan Makassar mulai masuk ke daerah ini dengan tujuan dagang. Pemerintah Indonesia mulai masuk tahun 1963 pada masa trikora sementara sarana dan prasarana mulai dibangun. Bantuan-bantuan kepada masyarakat seperti beras, pakaian dan kebutuhan

bahan pokok lainnya. Program-program pemerintah yang pernah masuk didaerah ini antara lain Bangdes.

Untuk ke kampung Soba dapat dilalui dengan berjalan kaki dan menggunakan kendaraan beroda. Keadaan jalan kampung berupa tanah, belum terdapat pengaspalan \pm 15 Km dari ibu kota kabupaten. Jarak antara kampung Soba dengan lapangan terbang perintis sekitar 3 km yang biasa didarati oleh pesawat jenis twin otter atau cesna. Sedangkan jalur laut, biasa disinggahi oleh kapal penumpang perintis, yang berjarak 2,5 km.

Sumber air bersih masyarakat berasal dari sumur galian dekat rawa, dimana apabila pada musim kemarau air menjadi keruh dan payau sedangkan saat musim hujan sumur tergenang oleh air rawa. Keadaan sumur berupa lobang galian tanpa pembatas dan penutup, air diambil dengan menggunakan tali timba. Dikampung ini terdapat satu penampungan bak air, tetapi hanya dimanfaatkan oleh sebagian masyarakat kampung Soba. Pelayanan Kesehatan bagi masyarakat dilakukan di Puskesmas Mappi, letaknya di pusat Kabupaten Mappi dari kampung jaraknya kurang lebih 1-2 Km. Puskesmas Mappi selain mengurus pasien berobat juga tersedia fasilitas rawat-inap yang ditangani oleh dua orang tenaga dokter dibantu oleh sejumlah mantri dan perawat. Selain tenaga kesehatan, masyarakat Suku *Yaghai* mengenal dukun yang berperan untuk mengobati orang sakit. Sampai saat ini masyarakat masih banyak yang memanfaatkan tenaga dukun untuk pengobatan. Kesadaran berobat masyarakat masih relatif rendah karena masyarakat masih percaya pada kemampuan dukun.



Gambar 5. Dena Kampung Soba Distrik Obi

8. Potensi SDA dan Mata pencaharian

Potensi sumber daya alam yang biasa dimanfaatkan masyarakat adalah hasil hutan dan hasil laut/sungai. Hasil hutan berupa kayu pertukangan yang memiliki nilai jual tinggi dan binatang buruan. Pemanfaatannya saat ini terbatas karena potensi sudah menurun dan pasarnya tidak ada. Hasil sungai/laut yang dimanfaatkan berupa jenis-jenis ikan, baik untuk konsumtif maupun dijual pada pasar lokal. Selain sumber daya alam, potensi pertanian juga sangat mencukupi dan saat ini menjadi sumber mata pencaharian utama bagi masyarakat. Hasil dari pertanian dijual masyarakat ke pasar lokal yang terletak di ibu kota kabupaten. Kebanyakan kaum perempuanlah yang memasarkan hasil pertanian sementara kaum laki-laki menangkap ikan. Hasil pertanian masyarakat diantaranya jenis-jenis sayuran lokal seperti jagung, kangkung, daun ubi, tomat, dan bayam. Pada musim-musim tertentu masyarakat menjual

durian dan rambutan. Hasil laut atau sungai yang dijual berupa ikan duri, ikan gabus, dan ikan sembilang. Hasil penjualan dari hasil pertanian relatif rendah, hanya cukup untuk memenuhi kebutuhan sehari-hari. Hasil buruan masyarakat di Kampung Soba diantaranya kasuari, biawak, mambruk, dan jenis unggas lainnya, namun tidak dipasarkan oleh masyarakat. Hasil hutan atau jenis kayu yang dimanfaatkan antara lain kayu besi, kayu rahai, dan kayu bintanggur. Saat ini pasarnya agak sulit, sehingga masyarakat meminta bantuan misionaris khatolik untuk menjualnya. Makanan pokok masyarakat Soba umumnya Sagu, namun dengan masuknya pendatang (orang Makassar dan Jawa), pola konsumsi sebagian masyarakat lambat laun berubah dari sagu ke beras (mengikuti pola konsumsi pendatang). Untuk memperoleh beras, masyarakat dapat membeli di kios-kios terdekat yang di datangkan dari Kabupaten Merauke.

Sebelum adanya pemekaran, terdapat sebuah perusahaan Yudefo yang bergerak pada usaha perkebunan karet, secara otomatis tenaga kerja di kampung tersebut terserap. Masyarakat menjual hasil sadapan seharga Rp. 800/lembar, namun harga jual karet tersebut sangat rendah sehingga banyak dikeluhkan oleh masyarakat. Saat ini perusahaan tersebut tutup karena bangkrut, hal ini menyebabkan banyaknya tenaga potensial di kampung ini menjadi pengangguran. Peninggalan kebun karet tersebut masih terdapat di kampung ini dan tidak lagi dimanfaatkan oleh masyarakat. Di kampung ini, terdapat usaha pembuatan batu bata yang secara langsung dapat dijadikan sumber penghasilan keluarga. Usaha batu bata ini ditangani langsung oleh pemerintah. Hasil pembuatan batu bata ini dipasarkan langsung kepada

kontraktor pembangunan jalan di Kabupaten Mappi, namun belum ada tempat pemasaran lain selain kontraktor yang membeli batu bata tersebut.



Gambar 6. Transek Kampung Soba Distrik Obak

9. Sumberdaya Manusia

Tingkat pendidikan masyarakat di kampung Soba relatif rendah, sebagian besar berpendidikan SD, hanya sebagian kecil masyarakat yang berpendidikan SMP. Umumnya masyarakat yang mengenyam pendidikan adalah kaum laki-laki, sementara sedikit dari kaum perempuan yang tidak bersekolah dengan anggapan bahwa anak perempuan harus lebih rendah pendidikannya dari kaum laki-laki. Di kampung ini terdapat 2 gedung sekolah yaitu SD YPPK Soba dan SMP YPPK Kepi. Sekolah berjalan aktif, pada SD YPPK saat ini diajar oleh 7 orang guru, sedangkan SMP Kepi diajar oleh 8

orang guru. Sistem yang digunakan untuk jenjang SMP menggunakan pola asrama, yang saat ini dikelola oleh pihak misionaris khatolik. Permasalahan dana menjadi kendala dalam menjalankan pendidikan pola asrama ini, karena umumnya orang tua siswa tidak mampu untuk membayar iuran wajib untuk membiayai anak-anak mereka yang bersekolah dengan pola asrama. Untuk Kampung Soba sendiri masih kekurangan tenaga guru, karena saat ini jumlah anak usia sekolah mulai meningkat seiring tingkat kesadaran masyarakat yang mulai meningkat.

10. Akses Kelembagaan

Akses kelembagaan di kampung tidak begitu lengkap, namun demikian, karena letak kampung ini dekat dengan ibukota kabupaten sehingga mudah dijangkau masyarakat seperti Rumah Sakit sangat dekat dengan kampung Soba. Mayoritas masyarakat di kampung Soba beragama khatolik, sekolah-sekolah pionir yang didirikan oleh misionaris khatolik. Pembinaan keagamaan oleh pihak gereja cukup aktif, masyarakatpun cukup aktif dalam kegiatan – kegiatankeagamaan seperti mudika, kelompok–kelompok doa dan kegiatan lainnya pada hari besar keagamaan.

11. Aspirasi dan Kebutuhan

Berdasarkan hasil *indepth interview* dan FGD dengan masyarakat, maka yang menjadi aspirasi masyarakat, adalah masalah perumahan. Rumah tinggal yang mereka tempati saat ini kurang layak dari sisi kesehatan. Peningkatan sarana transportasi darat, laut dan udara menjadi salah satu aspirasi yang cukup mendesak dan penting dirasakan masyarakat, minimnya sarana transportasi tersebut menyebabkan akses pasar terhambat. Perbaikan

ekonomi dan kestabilan harga pasar menjadi keinginan masyarakat, karena harga pasar yang saat ini berlaku tidak menguntungkan masyarakat. sehingga motivasi masyarakat untuk memasarkan hasil pertanian saat ini menurun. Dibidang pendidikan, masyarakat membutuhkan sekolah-sekolah teknikpertukangan karena masyarakat membutuhkan ketrampilan khusus untuk mengelola SDA yang ada di kampungnya. Di kampung Soba, masih sangat jarang diadakan penyuluhan diberbagai bidang, sementara masyarakat sangat membutuhkan untuk mendapatkan informasi dan perubahan pola pikir.

B. EKSISTENSI KELEMBAGAAN PKK KABUPATEN PADA TINGKAT KELOMPOK MASYARAKAT KAMPUNG

1. Sejarah Singkat Lahirnya Kelembagaan PKK

Pembangunan Nasional dapat terwujud, jika di satu pihak ada fasilitas dan pelayanan publik yang memadai, dan di lain pihak ada warga dan masyarakat yang secara sadar turut berpartisipasi dalam mewujudkan kesejahteraan bangsa dan negara yang berdaulat. Dalam rangka ini setiap warga negara mempunyai kebebasan dan kesempatan untuk mengembangkan potensinya, dan terutama mempunyai tanggung jawab sosial sebagai warga negara. Untuk ini diperlukan pula adanya lingkungan yang kondusif, dimana seseorang dapat berusaha dan mengembangkan potensi atau kemampuannya. Data statistik nasional menunjukkan bahwa lebih dari 50 % dari penduduk Indonesia adalah perempuan, terutama mereka yang tinggal di perdesaan atau kampung. Dan sebagian besar di antaranya ada dalam status ekonomi dan tingkat pendidikan yang rendah. Ini merupakan salah satu faktor

penyebab rendahnya angka harapan hidup yakni laki-laki : 63 tahun, perempuan 67 tahun, dan angka kematian ibu (AKI) cukup tinggi yaitu : 307 per 100.000 kelahiran, serta angka kematian bayi (AKB) juga cukup tinggi yaitu : 46 per 1.000 kelahiran. Dengan kondisi yang demikian, maka muncullah gerakan PKK yang awal kegiatannya dihususkan kepada upaya-upaya penurunan AKI dan AKB.

Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK) sebagai gerakan pembangunan masyarakat bermula dari Seminar *Home Economic* di Bogor tahun 1957. Sebagai tindak lanjut dari seminar tersebut, pada tahun 1961 Panitia Penyusunan Tata Susunan Pelajaran pada Pendidikan Kesejahteraan Keluarga (PKK), Kementerian Pendidikan bersama Kementerian-kementerian lainnya menyusun 10 Segi Kehidupan Keluarga. Gerakan PKK dimasyarakatkan berawal dari kepedulian isteri Gubernur Jawa Tengah pada tahun 1967 (ibu Isriati Moenadi) setelah melihat keadaan masyarakat yang banyak menderita busung lapar. Upaya untuk meningkatkan kesejahteraan keluarga dilakukan melalui 10 Segi Pokok Keluarga dengan membentuk Tim Pembina PKK disemua tingkatan, yang keanggotaan timnya secara relawan dan terdiri dari tokoh/pemuka masyarakat, para isteri Kepala Dinas/Jawatan dan isteri Kepala Daerah sampai dengan tingkat desa dan kelurahan yang kegiatannya didukung dengan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Pada tanggal 27 Desember 1972 Mendagri mengeluarkan Surat Kawat No. 3/6/12 kepada seluruh Gubernur Indonesia, agar merubah nama Pendidikan Kesejahteraan Keluarga menjadi Pembinaan Kesejahteraan

Keluarga. Sejak itu Gerakan PKK dilaksanakan diseluruh Indonesia dengan nama Pembinaan Kesejahteraan Keluarga (PKK), dan tanggal 27 Desember ditetapkan sebagai “Hari Kesatuan Gerak PKK” yang diperingati pada setiap tahun.

Dalam era reformasi dan ditetapkannya TAP MPR No. IV/MPR/1999 tentang GBHN 1999-2004, serta pelaksanaan Otonomi Daerah berdasarkan Undang-undang No.22 Tahun 1999 dan Undang-undang No.25 Tahun 1999, TP (Tim Pembina) PKK Pusat melakukan penyesuaian-penyesuaian yang disepakati dalam Rakernaslub PKK tanggal 31 Oktober sampai dengan 2 Nopember 2000 di Bandung dan hasilnya merupakan dasar dalam perumusan Keputusan Menteri Dalam Negeri dan Otonomi Daerah No. 53 Tahun 2000, yang selanjutnya dijabarkan dalam Pedoman Umum Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga (PKK).Hal yang mendasar antara lain adalah perubahan nama gerakan PKK dari Gerakan Pembinaan Kesejahteraan Keluarga menjadi Gerakan Pemberdayaan dan Kesejahteraan Keluarga.

Gerakan PKK mempunyai visi terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat, sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan jender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Visi ini terjabarkan dalam misi berupa; (1) Meningkatkan mental spiritual, perilaku hidup dengan jalan menghayati dan mengamalkan Pancasila serta meningkatkan pelaksanaan hak dan kewajiban sesuai dengan hak asasi manusia (HAM), demokrasi, meningkatkan kesetiakawanan sosial dan kegotong royongan serta pembentukan watak bangsa yang mantap dan seimbang; (2) Meningkatkan pendidikan dan

keterampilan yang diperlukan dalam upaya mencerdaskan kehidupan bangsa serta meningkatkan pendapatan keluarga. (3) Meningkatkan kualitas dan kuantitas pangan keluarga, serta upaya peningkatan pemanfaatan pekarangan melalui Halaman Asri Teratur Indah dan Nyaman (HATINYA) PKK, sandang, dan penataan perumahan sehat. (4) Meningkatkan derajat kesehatan fisik dan mental, kelestarian lingkungan hidup serta membiasakan hidup berencana untuk kehidupannya dan perencanaan ekonomi keluarga serta membiasakan menabung. (5) Meningkatkan pengelolaan gerakan PKK baik kegiatan, pengorganisasian maupun pelaksanaan program-programnya yang disesuaikan dengan situasi dan kondisi masyarakat setempat serta ketentuan yang berlaku.

Secara structural gerakan PKK dikelola oleh TP PKK, yang dibentuk di tingkat : pusat, provinsi, kabupaten/kota, kecamatan serta desa/kelurahan atau kampung. Hubungan kerja antara TP PKK Pusat dengan TP PKK di Daerah (TP PKK Provinsi, Kabupaten, Kota, Kecamatan, Desa dan Kelurahan), adalah bersifat konsultatif dan koordinatif dengan tetap memperhatikan hubungan hierarkis.

Seperti apa yang telah diuraikan sebelumnya bahwa upaya dalam pencapaian kesejahteraan keluarga gerakan PKK di aktualisasikan dalam 10 Program Pokok PKK yang hakekatnya merupakan kebutuhan dasar manusia, yaitu : (1) Penghayatan dan Pengamalan Pancasila; (2) Gotong Royong; (3) Pangan; (4) Sandang; (5) Perumahan dan Tatalaksana Rumah Tangga; (6) Pendidikan dan Keterampilan; (7) Kesehatan; (8) Pengembangan Kehidupan Berkoperasi; (9) Kelestarian Lingkungan Hidup; (10) Perencanaan

Sehat. Untuk melaksanakan 10 Program Pokok PKK yang dimaksud maka perencanaan, pelaksanaan, pembinaan dan fasilitasi dilakukan oleh 4 (empat) kelompok kerja secara luwes dan koordinatif, yaitu :

- Kelompok Kerja (Pokja I) :
 1. Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
 2. Gotong Royong
- Kelompok Kerja (Pokja II) :
 1. Pendidikan dan Ketrampilan
 2. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi
- Kelompok Kerja (Pokja III) :
 1. Pangan
 2. Sandang
 3. Perumahan dan tatalaksana rumah tangga
- Kelompok Kerja (Pokja IV) :
 1. Kesehatan
 2. Kelestarian lingkungan hidup
 3. Perencanaan sehat

Adapun sumber pembiayaan gerakan PKK didasarkan kepada swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat. Peranan bantuan pemerintah dan bantuan dari sumber lainnya sifatnya sebagai pendorong dan perangsang untuk tumbuh dan berkembangnya swadaya gotong royong dan partisipasi masyarakat. Bantuan pemerintah dalam keadaan dan kondisi tertentu dimaksudkan sebagai faktor pendorong untuk menumbuhkan kreativitas dan aktivitas masyarakat dengan keswadayaan dan kegotong royongan.

2. Analisis Peranan PKK Kabupaten dalam Pemberdayaan Masyarakat Kampung

Paradigma kelembagaan yang dikembangkan PKK adalah paradigma dari atas ke bawah (*top down*) dan berdasarkan struktur hirarki kedinasan dari tingkat pusat sampai daerah yang direpresentasikan dengan adanya dewan penyantun, sehingga narasi besar tetap berpeluang untuk mendominasi kebijakan dan melakukan kontrol terhadap program-program yang dilakukan PKK. Paradigma ini bergerak dari konsep pendidikan, pembinaan, dan pemberdayaan. Paradigma pendidikan mengarahkan PKK bertanggung jawab pada sektor domestik, sementara paradigma pembinaan menyebabkan beban PKK semakin besar karena bertanggung jawab terhadap keluarga. Selanjutnya, dikembangkan paradigma pemberdayaan agar PKK mampu melakukan upaya pemberdayaan keluarga meskipun pada kenyataannya kekuasaan tetap melakukan kontrol. Pada paradigma pendidikan dan pembinaan, kekuasaan secara langsung melakukan hegemoni, sementara pada paradigma pemberdayaan, muncul kesadaran dari kekuasaan untuk melakukan pemberdayaan meskipun kenyataannya masih diasumsikan sebatas slogan, karena keterlibatannya masih memberi gambaran yang sifatnya temporer dan situasional, sehingga PKK tetap menjadi gerakan statis. Dengan demikian, dekonstruksi dan restrukturisasi atas kelembagaan PKK memukungkan untuk dilakukan agar PKK dapat menjadi organisasi yang mandiri dan berdaya.

Makna PKK yang dikaitkan dengan perspektif kesetaraan dan keadilan gender secara kontekstual terarahkan kepada keharmonisan, solidaritas, keadilan, keselarasan, dan keseimbangan. Makna keharmonisan menunjukkan bahwa PKK merupakan: (1) organisasi yang bertujuan

membangun keharmonisan keluarga; dan (2) organisasi yang mengarahkan perempuan untuk menciptakan keluarga yang harmonis, yaitu keluarga yang berada dalam kondisi damai, tentram, dan nyaman. Makna solidaritas menunjukkan bahwa PKK merupakan: (1) organisasi yang tumbuh sebagai bentuk solidaritas terhadap gerakan perempuan; (2) organisasi yang berusaha meningkatkan harkat dan martabat perempuan. Makna keadilan menunjukkan bahwa PKK merupakan: (1) organisasi yang berupaya mewujudkan keadilan dalam keluarga dan masyarakat; (2) organisasi yang berupaya mewujudkan keadilan gender, sehingga laki-laki dan perempuan memiliki kedudukan dan peran yang sama dalam kehidupan, karena selama ini perempuan dianggap sebagai *other (Liyen)* sedangkan laki-laki adalah *self (Diri)*. Makna keselarasan menunjukkan bahwa PKK merupakan: (1) organisasi yang berupaya menuju terciptanya suasana yang tertib, teratur, aman, dan damai, sehingga timbul ketentraman lahir batin dalam keluarga; (2) organisasi yang berusaha menuju pada terwujudnya perilaku yang baik, sopan berdasarkan tata tertib masyarakat yang penuh rasa tanggung jawab, sehingga tidak terjadi hegemoni, dominasi, subordinasi dan marginalisasi perempuan. Makna keseimbangan menunjukkan bahwa PKK merupakan: (1) organisasi yang berupaya menuju terciptanya kesetaraan dalam keluarga dan masyarakat; (2) organisasi yang berupaya mewujudkan kesetaraan gender antara laki-laki dan perempuan, agar memiliki kedudukan dan peran yang sama dalam kehidupan.

Analisis eksistensi PKK Kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat kampung, pendekatannya dilakukan terhadap 3 variabel yang masing-masing terjabarkan dalam sub-sub variabel atau indikator variabel, yaitu :

- (1) Penyadaran Masyarakat
 - Tujuan PKK
 - Sasaran
- (2) Pengorganisasian
 - Struktur Peran dan Fungsi
- (3) Peningkatan Kapasitas Masyarakat
 - Penyuluhan
 - Pelatihan Keterampilan
 - Dukungan Fasilitas

Ketiga aspek tersebut dianalisis berdasarkan hasil pendalaman wawancara secara intensif dengan informan yang dipadukan dengan diskusi grup dengan stake holder yang berkompeten.

a. Penyadaran Masyarakat tentang PKK

Dalam menganalisis eksistensi PKK Kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat kampung, konteks penyadaran digali berdasarkan pengetahuan masyarakat tentang PKK, ada 3 (tiga) indikator yang diamati, yaitu;

1. Tujuan PKK. Sebagaimana yang telah dijelaskan sebelumnya bahwa gerakan PKK bertujuan memberdayakan keluarga untuk meningkatkan kesejahteraan menuju terwujudnya keluarga yang beriman dan bertaqwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia dan berbudi luhur, sehat sejahtera, maju dan mandiri, kesetaraan dan keadilan gender serta kesadaran hukum dan lingkungan. Tingkat respon/pemahaman responden terhadap pengetahuan mengenai tujuan dari gerakan PKK dalam memberi perhatian atau pelayanan guna membantu masyarakat kampung dalam mengatasi masalah kebutuhan hidupnya.

Berdasarkan hasil wawancara mendalam terhadap informan maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat kampung mengenai tujuan dari gerakan PKK dapat dikategorikan tidak optimal atau belum mengetahui sepenuhnya mengenai tujuan dari gerakan PKK itu sendiri. Optimalisasi pengetahuan dari masyarakat terhadap gerakan kelembagaan yang dimaksud juga berarti bahwa pihak Tim Pembina PKK sebagai agen perubahan belum dapat memperkenalkan dengan baik mengenai program-program yang akan atau sementara dijalankan yang sekaligus sebagai modal dasar atau potensi untuk dikembangkan dalam pencapaian tujuan.

Hasil wawancara dengan pihak pengurus PKK mengakui bahwa pihaknya telah berusaha untuk semaksimal mungkin melakukan sosialisasi dalam memberikan informasi mengenai tujuan dari adanya gerakan PKK sampai pada tingkat kampung-kampung. Demikian halnya informasi yang diperoleh dari pihak pemerintah Kabupaten Mappi mengungkapkan bahwa pemerintah sebagai mitra dari lembaga PKK dalam melaksanakan pembangun dapat mungkin memfasilitasi dari upaya sosialisasi mengenai tujuan dari gerakan PKK kepada masyarakat. Lebih lanjut dijelaskan, bahwa selama ini karena keterbatasan pendidikan sehingga masyarakat masih kurang tertarik untuk dapat memahami dengan baik dari segala bentuk informasi melalui sosialisasi yang diberikan.

Tanggapan informan/narasumber lainnya mengungkapkan bahwa secara umum masyarakat belum banyak tertarik bentuk-bentuk sosialisasi yang sifatnya ceramah, mereka lebih tertarik jika informasi-informasi yang

diberikan langsung dilakukan dalam bentuk praktek-praktek yang memungkinkan mereka dapat terlibat langsung.

Berikut penuturan informan (YD, 35 thn) :

"...mama-mama disini pernah disuruh kumpul untuk acara PKK, tapi kita juga banyak tidak perhatikan....karena cuma bicara-bicara saja...lalu sudah itu disuruh pulang lagi..."

Dengan demikian, dapat disimpulkan bahwa kreatifitas dari pengurus PKK berdasarkan kontekstual lokal dalam menginformasikan sesuatu hal kepada masyarakat (tujuan gerakan PKK) menjadi penting artinya, karena dasar dalam konsep pemberdayaan masyarakat harus diawali oleh pembentukan kognitif yang pada hakekatnya merupakan kemampuan berpikir yang terlandaskan pengetahuan dan wawasan seseorang atau masyarakat dalam rangka mencari solusi atas permasalahan yang dihadapi atau mengikuti arahan program sesuai yang direncanakan (Sulistiyani, 2004).

2. Sasaran PKK.Sasaran PKK adalah keluarga, baik di daerah pedesaan maupun perkotaan. Secara substansial gerakan PKK merupakan salah satu dari gerakan ibu-ibu sebagai pendamping suami untuk mencapai kemuliaan keluarga. Kemuliaan yang dimaksud adalah keluarga yang sehat, bahagia dan sejahtera lahir batin. Karena bahagia, sejahtera lahir dan batin dalam konteks operasional ditandai dengan ketahanannya yang tinggi seiring dengan dapat dilaksanakannya 8 fungsi keluarga (fungsi keagamaan, sosial budaya, cinta kasih, melindungi, reproduksi, sosialisasi dan pendidikan, ekonomi dan fungsi pembinaan lingkungan) maka tidaklah terlalu salah bila sasaran akhir dari kegiatan PKK adalah mencapai keluarga yang sehat dan

berketahanan. Ketahanan keluarga yang dimaksud adalah kondisidinamik suatu keluarga yang memiliki keuletan dan ketangguhan serta mengandung kemampuanfisik materiil dan psikis mental spiritual guna hidup mandiri dan mengembangkan diri dankeluarganya untuk hidup harmonis dalam meningkatkan kesejahteraan lahir maupun kebahagiaan batin yang lestari melalui peningkatan pendidikan, pengetahuan dan keterampilan.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap informan atas pertanyaan yang diajukan, diperoleh hasil bahwa secara keseluruhan dapat disimpulkan tingkat pengetahuan masyarakat kampung mengenai sasaran dari gerakan PKK dikategorikan masih sangat rendah akan pemahaman mendasar akan sasaran dari gerakan yang dimaksud.

Secara umum jawaban responden teranalisis bahwa mereka memahami gerakan PKK dikhususkan untuk perempuan atau ibu-ibu rumah tangga. Meskipun demikian, sasaran substansi sebagaimana yang telah dijelaskan diatas hampir pada umumnya tidak terpahami dengan baik.

Berikut penuturan informan (EB, 25 thn) sebagai berikut :

"....PKK itu untuk mama-mama...supaya dia bisa urus anak sama suami baik-baik..bisa juga kerja tambah-tambah hasil...kalau urus baik itu keluarga kita mama-mama itu sudah berhasil..."

Informan lain :

"...tugas mama-mama itu, urus anak saja sama suami...tidak usah pikir lain-lain...seperti Tuhan memberi kasih kepada manusia...jadi PKK itu baik...karena untuk ajar kita urus keluarga..."

Dari penuturan informan menarik untuk dicermati lebih jauh bahwa apakah kondisi yang demikian itu ada korelasi antara struktur social-budaya

Indonesia yang lebih condong patriarki dengan kondisi organisasi perempuan yang relatif kurang mandiri? Dapat juga dipertanyakan bahwa apakah kurangnya kemandirian itu akibat dari kelemahan atau perlunya pemberdayaan perempuan? Kami pikir tidak ada kaum perempuan yang tidak setuju bila dikatakan bahwa kaum perempuan harus maju dan lebih maju lagi dari sekarang terutama untuk mengejar ketertinggalannya dari laki-laki. Tetapi, tidak sedikit pula dari kaum perempuan Indonesia yang berpendapat bahwa kita tidak perlu mengejar laki-laki, tidak perlu menyamai laki-laki, karena semua itu sudah menjadi kodrat. Danielle Crittenden mengatakan dalam bukunya *What Our Mother Didn't Tell Us: Why Happiness Eludes The Modern Women*, dalam Faraz (2004) bahwa:

"Betapun tingginya sukses kaum wanita, keluarga yang tetap mencintai wanita. Bagaimana keluarga mencintai kita (wanita) sangat ditentukan oleh apa yang diberikan kita kepada keluarga (anak dan suaminya). Suami dan anaklah yang biasanya menunggui kita saat sakit bahkan mungkin saat Malaikat Maut hendak mencabut nyawa kita".

Lebih lanjut, Danielle banyak mempertanyakan: Benarkah karier lebih penting dan lebih memuaskan batin ketimbang membesarkan anak? Mengapakah keseimbangan menjadi ibu yang baik dan ibu pekerja begitu sulit dipahami? Sikap dan pemikiran Danielle, seorang penulis dari Kanada ini sekedar memberikan contoh, bahwa tidak sedikit dari perempuan di dunia termasuk di Indonesia yang kehidupannya masih dihantui oleh pertanyaan-pertanyaan seperti apa yang dipertanyakan Danielle. Mereka masih ragu untuk maju, apalagi menyaingi laki-laki. Apakah kenyataan ini merupakan produk budaya? Produk agama? Atau karena ada faktor lain, yang tidak tampak, tetapi dominan? Stereotipe laki-laki dan perempuan dijelaskan pula Wilson

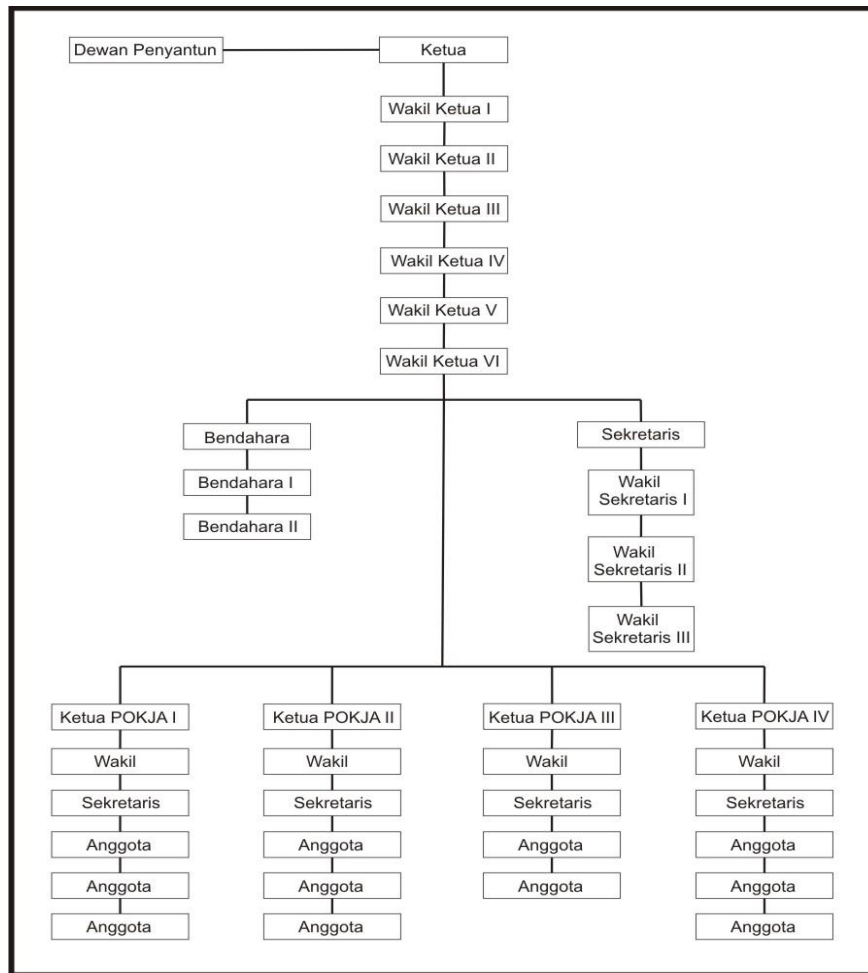
(1976) dalam Annisa (2000) bahwa laki-laki mempunyai sumber konsep diri yang berbeda dengan perempuan. Konsep diri laki-laki bersumber dari keberhasilan pekerjaan, persaingan dan kekuasaan. Konsep diri perempuan bersumber pada keberhasilan tujuan pribadi, citra fisik, dan keberhasilan dalam hubungan keluarga. Perbedaan konsep diri perempuan dan laki-laki ini telah mengakibatkan perbedaan dalam usaha mencapai dan menunjukkan prestasi. Motivasi berprestasi yang dimiliki perempuan umumnya menjadi lebih rendah dibandingkan laki-laki. Perempuan akan selalu merasa terancam apabila menghadapi persaingan dengan laki-laki. Perempuan juga akan menampilkan kurang percaya diri terhadap kemampuannya. Kalau mereka merasa percaya diri, umumnya juga mereka tidak mempunyai keberanian untuk memperlihatkan. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa kurang mandiri organisasi perempuan termasuk gerakan PKK disebabkan oleh para anggotanya yang mempunyai konsep diri seperti di jelaskan sebelumnya.

Oleh karena itu peningkatan kapasitas dan kepercayaan diri kaum perempuan merupakan kunci sukses dari gerakan-gerakan kelembagaan perempuan termasuk gerakan PKK dalam hal ini. Pemahaman mendalam tentang sasaran dari gerakan-gerakan organisasi perempuan termasuk PKK senantiasa harus dipahami dengan baik untuk menghilangkan keraguan sebagai pertanyaan-pertanyaan yang muncul dan berimplikasi terhadap motivasi dan kreatifitasnya sehingga makna gerakan dapat terimplementasi dengan baik.

b. Pengorganisasian

Struktur Peran dan Fungsi. Paradigma kelembagaan yang dikembangkan PKK adalah paradigma dari atas ke bawah (*top down*) dan berdasarkan struktur hirarki kedinasan dari tingkat pusat sampai daerah yang direpresentasikan dengan adanya dewan penyantun, sehingga narasi besar tetap berpeluang untuk mendominasi kebijakan dan melakukan kontrol terhadap program-program yang dilakukan PKK. Secara organisasi Tim Penggerak PKK berada di tingkat pusat sampai dengan desa/kelurahan/kampung. PKK dikelola dan digerakkan oleh Tim Penggerak PKK yang diketuai oleh isteri Pimpinan Daerah (Gubernur, Bupati/Walikota, Camat, Kepala Desa/Lurah/Kampung), secara fungsional. Dapat dikemukakan bahwa kunci berkembangnya program dan kegiatan PKK, justru ada peran nyata diwujudkan oleh istri Pimpinan Daerah. Anggota Tim Penggerak PKK adalah para relawan, yang tidak menerima gaji, baik perempuan maupun laki-laki, yang menyediakan sebagian dari waktunya untuk PKK. Tim Penggerak PKK berperan sebagai motivator, fasilitator, perencana, pelaksana, pengendali dan penggerak. Pembinaan teknis kepada keluarga dan masyarakat dilaksanakan dalam kerjasama dengan unsur dinas instansi pemerintah terkait.

Adapun struktur susunan organisasi Tim Penggerak PKK Kabupaten Mappi dapat dilihat pada skema berikut :



Gambar 7. Struktur Organisasi Tim Pembina PKK Kabupaten Mappi.

Aktualisasi 10 (sepuluh) program PKK kemudian masing-masing terjabarkan (dikongkritkan) ke dalam 4 (empat) program Kelompok Kerja (POKJA) sebagai tugas pokok dan fungsi dari masing-masing POKJA yang berlaku secara nasional yang gambaran umumnya dapat dijelaskan sebagai berikut :

- **Program Pokja I**

Pokja I mengelola Program Penghayatan dan Pengamalan Pancasila dan Program Gotong Royong.

Tugas

1. Memantapkan kerukunan dan toleransi antar umat beragama, saling menghormati dan menghargai dalam wadah Negara kesatuan Republik Indonesia.
2. Meningkatkan ketahanan keluarga dalam rangka mewujudkan kesadaran setiap warga tentang Penghayaan dan Pengamalan Pancasila melalui Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN).
3. Memantapkan Pola Asuh Anak dan Remaja dalam keluarga serta perlindungan anak melalui Lokakarya dan Uji coba.
4. Peningkatan pemahaman dan pengamalan perilaku budi pekerti dan sopan santun dalam keluarga dan lingkungan.
5. Meningkatkan pemahaman peraturan perundangan yang berkaitan dengan pencegahan Kekerasan Dalam Rumah Tangga (KDRT), pencegahan perdagangan orang (Trafficking), peningkatan pemahaman penyalahgunaan narkoba melalui life skill dan parenting skill.
6. Meningkatkan kesadaran hidup bergotong royong, kesetiakawanan sosial, keamanan lingkungan, Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD dan lain-lainnya).
7. Memberdayakan LANSIA dalam kegiatan yang produktif dan menjadi teladan dalam keluarga dan lingkungan.

Prioritas Program

- Penghayatan dan Pengamalan Pancasila
Menumbuhkan ketahanan keluarga melalui kesadaran bermasyarakat, berbangsa dan bernegara perlu dilaksanan pemahaman secara terpadu:
- Pembinaan Kesadaran Bela Negara (PKBN)
PKBN mencakup 5 (lima) unsur:
 1. Kecintaan tanah air
 2. Kesadaran berbangsa dan bernegara
 3. Keyakinan atas kebenaran Pancasila
 4. Kerelaan berkorban untuk Bangsa dan Negara
 5. Memiliki kemampuan awal bela Negara
- Kesadaran Hukum (KADARKUM). KADARKUM adalah upaya untuk meningkatkan pemahaman tentang peraturan perundang-undangan diprioritaskan di PKK untuk pencegahan PKDRT, Trafficking, Perlindungan Anak, Narkoba, dll.
- Pola Asuh Anaka dan Remaja. Pola asuh anak dan remaja adalah upaya untuk menumbuhkan dan membangun perilaku, budi pekerti, sopan santun di dalam keluarga sesuai budaya bangsa.
- Pemahaman dan Ketrampilan Hidup (Life Skill dan Parenting Skill). Pemahaman dan ketrampilan hidup adalah upaya menumbuhkan kesadaran orang tua dalam upaya pencegahan penyalahgunaan narkoba.

- Pemahaman tertib administrasi dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan di keluarga.
- Gotong Royong
Kegiatan Gotong Royong dilaksanakan dengan membangun kerjasama yang baik antar sesama keluarga, warga, dan kelompok untuk mewujudkan semangat persatuan dan kesatuan.
- Menumbuhkan kesadaran, kesetiakawanan sosial, bertenggang rasa, dan kebersamaan serta saling menghormati antar umat beragama.
- Memberdayakan LANSIA agar dapat menjaga kesehatan fisik dan mental, kebugaran, ketrampilan agar dapat melaksanakan kegiatan secara produktif dan menjadi teladan bagi keluarga dan lingkungannya.
- Berpartisipasi dalam pelaksanaan kegiatan bakti sosial, kegiatan Tentara Manunggal Membangun Desa (TMMD).

- **Program Pokja II**

Pokja II mengelola Program Pendidikan dan Ketrampilan serta Pengembangan Kehidupan Berkoperasi.

Tugas

1. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan dalam keluarga, peningkatan jenis dan mutu kader, peningkatan pengetahuan TP PKK dan kelompok-kelompok PKK dan Dasawisma melalui penyuluhan, orientasi dan pelatihan.
2. Melaksanakan dan mengembangkan kegiatan program Bina Keluarga Balita (BKB)
3. Memantapkan Kelompok Belajar (Kejar) Paket A, B, dan C.
4. Meningkatkan pengetahuan dan menumbuhkan kesadaran dalam keluarga tentang pentingnya pendidikan anak sejak usia dini (0-6) tahun agar anak tumbuh dan berkembang secara optimal sesuai dengan usianya.
5. Membantu program Keaksaraan Fungsional (KF) dalam rangka meningkatkan pendidikan keluarga.
6. Meningkatkan kelompok dan kualitas Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) PKK.
7. Memotivasi keluarga tentang manfaat koperasi sebagai salah satu upaya perbaikan ekonomi keluarga dan mendorong terbentuknya koperasi yang dikelola oleh PKK.
8. Identifikasi kebutuhan pelatihan.
9. Menyusun modul-modul pelatihan.
10. Berpartisipasi dalam Forum PAUD berkerjasama dengan Pokja IV yang difasilitasi oleh Kementerian atau Dinas Pendidikan Nasional.

11. Meningkatkan pengetahuan masyarakat tentang pentingnya pendidikan dasar untuk semua sesuai dengan tujuan MGDs yaitu agar setiap anak laki-laki dan perempuan mendapatkan dan menyelesaikan pendidikan dasar.

Prioritas Program

Pendidikan dan Ketrampilan

1. Meningkatkan kemampuan yang berkaitan dengan pengetahuan, kesadaran dan ketrampilan keluarga yang mempunyai anak balita mengenai tumbuh kembang anak balita secara optimal.
2. Menyusun modul pelatihan BKB dari TP PKK dan mengadakan pelatihan BKB.
3. Meningkatkan mutu dan jumlah pelatih PKK dengan mengadakan pelatihan/ Training of Trainer (TOT).
4. Menyempurnakan modul-modul pelatihan TPK3PKK, LPPKK dan DAMAS PKK sesuai dengan perkembangan serta mensosialisasikannya antara lain melalui pelatihan-pelatihan: TPK3PKK, LP3PKK, dan DAMAS PKK.
5. Meningkatkan pengetahuan PKK dalam kegiatan Pos PAUD melalui kegiatan PAUD yang diintegrasikan dengan BKB dan Posyandu dengan peremban mitra PAUD bekerjasama dengan Pokja IV.
6. Meningkatkan jumlah pengetahuan dan ketrampilan kader dalam mendidik anak usia dini melalui pelatihan bekerjasama dengan instansi terkait dan HIMPAUDI.
7. Meningkatkan ketrampilan kecakapan hidup (Life Skill) perempuan maupun laki-laki sehingga mampu berusaha secara bersama atau mandiri untuk memperkuat kehidupannya dan keluarganya.
8. Mengadakan monitoring dan evaluasi kegiatan Pos APUD di TP PKK Provinsi untuk mengetahui sejauh mana pengintegrasian PAUD, BKB, dan Posyandu.
9. Meningkatkan kejar paket A, B, dan C melalui pelatihan Tutor Kejar Paket A, B, dan C bekerjasama dengan instansi terkait.
10. Meningkatkan dan menyuluh keluarga tentang Wajib Belajar Pendidikan Dasar Sembilan Tahun (Wajar Dikdas 9 Tahun).
11. Meningkatkan pendidikan dan ketrampilan keluarga serta pengembangan Keaksaraan Fungsional (KF) dengan pendampingan melalui penyuluhan, orientasi dan pelatihan.
12. Meningkatkan pengetahuan dan kemampuan baca tulis, serta membudayakan minat baca masyarakat melalui Aman Bacaan Masyarakat (TBM) dan sudut baca bekerja sama dengan Instansi terkait.
13. Meningkatkan pelaksanaan kerjasama dengan mitra sebagai pendamping, yaitu lintas sektoral dan lintas kelembagaan.

Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

1. Melaksanakan evaluasi UP2K-PKK dan mengadakan lomba UP2K untuk mengetahui sejauh mana pelaksanaan kegiatan UP2K-PKK di daerah dan mengetahui keberhasilannya.
2. Mengadakan pelatihan UP2K-PKK dalam rangka meningkatkan pengetahuan tentang program UP2K-PKK agar TP PKK Provinsi mempunyai tenaga terampil dalam pengembangan program UP2K-PKK.
3. Mendata ulang jumlah kelompok-kelompok UP2K-PKK.
4. Mengatasi cara pemecahan masalah mengenai permodalan untuk kegiatan UP2K-PKK melalui APBD, Lembaga keuangan Mikro yang ada, baik yang bersifat bank seperti BRI Unit Desa dan Bank Perkreditan Rakyat, Program Nasional Pemberdayaan Masyarakat (PNPM) Mandiri Pedesaan, Alokasi Dana Desa (AAD) dan lain-lain.
5. Mengupayakan pemasaran UP2K-PKK melalui pasar, warung, ikut pada pameran, bazar baik lokal maupun nasional dan menjalin kemitraan dengan Dekranas/ Dekranasda.
6. Memotifasi keluarga agar mau menjadi anggota koperasi untuk meningkatkan pendapatan keluarga.
7. Mendorong terbentuknya koperasi yang berbadan hukum yang dikelola oleh TP PKK.

Dalam pelaksana prioritas program disesuaikan dengan kemampuan daerah dan menjalin kemitraan dengan Instansi terkait.

- **Program Pokja III**

Pokja III mengelola program pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga.

Tugas

1. Mengupayakan ketahanan keluarga dibidang pangan sesuai dengan UU No. 17 Tahun 1996 tentang Pangan.
2. Meningkatkan penganekaragaman tanaman pangan dalam upaya peningkatan gizi keluarga menuju keluarga yang berkualitas.
3. Menumbuhkan kesadaran masyarakat untuk mengkonsumsi makanan yang beragam, bergizi, berimbang (3B), yang aman dan berbasis sumber daya lokal.
4. Mengusahakan pemanfaatan lahan baik darat maupun air minimal untuk pemenuhan kebutuhan pangan keluarga.
5. Berperan dan membantu dalam program Cadangan Pangan Masyarakat.
6. Memantapkan Gerakan Halaman, Asri, Teratur, Indah dan Nyaman (HATINYA PKK).
7. Memanfaatkan Teknologi Tepat Guna (TTG) dalam upaya meringankan beban kerja sehingga hasilnya lebih efektif dan efisien.

8. Membudayakan “Aku Cinta Makanan Indonesia” dan “Aku Cinta Produk Indonesia” sehingga menumbuhkan rasa bangga.
9. Mensosialisasikan pola pangan 3B untuk keluarga khususnya bagi balita dan lansia.
10. Meningkatkan penggunaan bahan sandang dalam negeri serta mendorong peningkatan kualitas dan kuantitas produksi dan pemasarannya.
11. Mengembangkan kreatifitas Usaha Kecil Mikro (UKM) dengan berbagai produk busana, cinderamata khas daerah untuk menunjang pariwisata.
12. Mendorong terciptanya lapangan/ kesempatan kerja di bidang jasa, sandang, pangan dan perumahan.
13. Memasyarakatkan rumah sehat dan layak huni sebagai upaya terwujudnya kualitas hidup keluarga.
14. Memantapkan pemahaman tentang fungsi rumah sebagai tempat kembang keluarga harmonis.
15. Meningkatkan jalinan kerjasama dengan institusi terkait.
16. Melaksanakan PMT-AS terkoordinasi dan terpadu.
17. Sosialisasi Program Nasional Gerakan Memasyarakatkan Makan Ikan (GEMARIKAN) dalam rangka mencerdaskan bangsa.
18. Melaksanakan Program Nasional Gerakan Perempuan, Tanam, Tebar dan Pelihara Pohon untuk mengantisipasi akibat perubahan iklim yang berdampak pada ketahanan pangan keluarga.
19. Menjaga kelestarian hutan.

Prioritas Program

Pangan

1. Mewujudkan Ketahanan Pangan Keluarga melalui penganekaragaman pangan yang bergizi sesuai potensi daerah.
2. Peningkatkan pangan keluarga sehari-hari dengan mendorong terciptanya sikap dan perilaku masyarakat melalui penganekaragam makanan dengan menerapkan pola pangan 3B (beragam, bergizi dan berimbang) sesuai potensi daerah.
3. Mewaspadaai terjadinya keracunan pangan, mulai dari menanam, memilih, mengelola sampai terhidangnya makanan, menghindari bahan tambahan makanan yang berbahaya, antara lain: zat pewarna, abahan pengawet, produk kadaluwarsa, dan penggunaan pestisida.
4. Meminimalkan budaya/ tradisi pangan yang merugikan kesehatan misalnya orang hamil/ balita banyak pantangan makan.
5. Mengoptimalkan HATINYA PKK dengan tanaman pangan dan tanaman produktif/ keras (bernilai ekonomi tinggi), minimal untuk memenuhi keperluan dan tabngan keluarga sera meningkatkan Tanaman Obat Keluarga (TOGA)
6. Mengembangkan industri pangan rumah tangga dan mengadakan penyuluhan, orientasi dan pelatihan untuk menunjang pemasaran.
7. Pengadaan lomba masak secara berjenjang guna meningkatkan kreatifitas cipta makanan.

8. Pemanfaatan Teknologi Tepat Guna (TTG) untuk menunjang usaha agrobisnis, hortikultura, tanaman buah, perikanan, peternakan dan lain-lain untuk meningkatkan kualitas dan kuantitas produksi dalam mencapai taraf dan kesejahteraan keluarga.
9. Menyempurnakan dan Sosialisasi buku Peran PKK dalam mendukung Gerakan Percepatan Keanekaragaman Konsumsi Pangan.

Sandang

1. Mengupayakan adanya hak paten untuk melindungi hak cipta desain.
2. Mengupayakan keikutsertaan dalam pameran dan lomba baik tingkat lokal, nasional dan internasional.
3. Mengadakan kerjasama dengan para disainer, pengusaha, industri sandang dan pariwisata.
4. Membudayakan perilaku berbusana sesuai dengan moral budaya Indonesia dan meningkatkan kesadaran masyarakat mencintai produksi dalam negeri (Aku Cinta Produk Indonesia).

Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

1. Menumbuh kembangkan kembali program Pemugaran Perumahan dan Lingkungan Desa Terpadu (P2LDT) melalui pemugaran rumah layak huni terutama keluarga miskin dan pengungsi dengan azas Tri Bina (Bina Usaha, Bina Manusia. Dan Bina Lingkungan), gotong royong serta mengupayakan bantuan dari instansi/ dinas terkait, bank, swasta dan masyarakat.
2. Meningkatkan permasyarakatan tentang perumahan sehat dan layak huni serta menumbuhkan kesadaran akan bahaya bertempat tinggal di daerah tegangan listrik tinggi, bantaran sungai, timbunan sampah, tepian jalan rel kereta api dan menumbuhkan kesadaran hukum tentang kepemilikan rumah dan tanah.
3. Pemasyarakatan dan pemanfaatan TTG dalam rumah tangga, sarana dan prasarana perumahan serta hemat energi dan mencegah pemborosan.
4. Meningkatkan pengetahuan dan ketrampilan tentang tata laksana rumah tangga dalam mengharmoniskan dan membahagiakan kehidupan keluarga.
5. Meningkatkan penerapan pola hidup/ perilaku bagi penghuni rumah susun.

Dalam pelaksanaan kegiatan tersebut dilakukan upaya pemahaman kesadaran pentingnya pangan yang bergizi, berimbang, beragam dan berkualitas, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga yang sehat melalui lomba-lomba dan kajian. Untuk itu diperlukan kemitraan dengan Instansi/ dinas terkait yang berhubungan dengan program-program yang dimaksud.

- **Program Pokja IV**

Pokja IV mengelola Program Kesehatan, Kelestarian Lingkungan Hidup, dan perencanaan Sehat.

Tugas

Meningkatkan pencapaian tujuan pembangunan meillenium antara lain:

1. Menghapus tingkat kemiskinan dan kelaparan (idikator antara lain: menurunkan prefalansi anak balita yang kurang gizi).
2. Menurunkan angka kematian anak.
3. Meningkatkan kesehatan Ibu hamil
4. Memerangi penyebaran HIV/AIDS, malaria dan penyakit menular lainnya.
5. Menjamin kelestarian lingkungan hidup.

Meningkatkan budaya Perilaku Hidup Bersih dan Sehat :

1. Mengembangkan dan membina pelaksanaan kegiatan POSYANDU.
2. Memonitor pelaksanaan Sistem Informasi Posyandu (SIP)
3. Melaksanakan pencatatan ibu hamil, melahirkan, nifas, ibu meninggal, kelahiran dan kematian bayi dan balita.
4. Tanam dan pelihara pohon dalam rangka mewujudkan kelestarian lingkungan.
5. Mewujudkan keluarga kecil, bahafia, sejahtera dengan melaksanakan program KB agar tercapai generasi yang sehat cerdas dan tangguh.
6. Meningkatkan pengetahuan tentang budaya hidup hemat, membudayakan kebiasaan manabung dan melaksanakan tatalaksana keuangan dalam keluarga dalam rangka mendukung perncaanaan sehat.

Prioritas Program

Kesehatan. Memantapkan Keluarga Sadar Gizi (KADARGIZI) dalam upaya menurunkan prefalansi anak balita kurang gizi.

1. Gizi seimbang kepada ibu hamil (BUMIL), ibu menyusui (BUSUI), balita.
2. Kulaitas gizi pada BUMIL yang kekurangan Enegi Kronik (KEK) dengan mengukur Lingkat Lengan Atas (LILA).
3. Penanggulangan gangguan akibat kekurangan garam yodium (GAKY)
4. Suplementasi Zat Gizi
5. Pemberian Asi Eksklusif selama 6 (enam) bulan
6. Mekanam pendamping air susu Ibu (MP-ASI)
7. Pemberian Makanan Tambahan (PMT) bagi balita, lansia di Posyandu.

Penyediaan Makanan Tambahan bagi Anak Sekolah (PMT-AS) Upaya penambahan kalori (protein, karbohidrat, lemak, vitamin, mineral, air) di Sekolah. Menjadikan PHBS sebagai kebiasaan hidup sehari-hari:

1. Membudayakan cuci tangan pakai sabun (CTPS), kebersihan pribadi.
2. Menggunting dan memelihara kebersihan kuku.
3. Lomba pelaksana terbaik PHBS setahun sekali.

Usaha kesehatan sekolah

1. Membudayakan lima Imunisasi Dasar Lengkap (LIL) dan rutin untuk menurunkan angka kematian anak dan ibu.
2. Meningkatkan kesadaran pasangan usia subur (PUS) tentang manfaat pemakaian alat kontrasepsi.
3. Meningkatkan penyuluhan pencegahan penyakit menular dan tidak menular.
4. Meningkatkan anam dan pelihara pohon dalam upaya kelestaisn lingkungan hidup, emngurangi dampak global warming (pemanasan global)
5. Mendorong swadya masyarakat dalam upaya penurunan Angka Kematian Ibu (AKI), Angka Kematian Bayi (AKB), Angka Kematian Balita (AKBAI) malalui antara lain:

Gerakan Sayang Ibu (AKI) dengan Program Perencanaan Persalinan, Pencegahan dan Komplikasi (P4K).

1. Mensosialisasikan kesadaran donor darah di Desa dan Kelurahan.
2. Lima Imunisasi Dasar Lengkap dan Imunisasi Rutin.
3. Pencatatan kelahiran dan kematian di kelompok-kelompok Dasawisma.
4. "Ambulan" Desa

Pemahaman tertib admnistrasi dalam rangka meningkatkan dan mewujudkan tertib administrasi kependudukan di keluarga.

Optimalisasi Posyandu Posyandu adalah pusat pelayanan terpadu dari, oleh dan untuk masyarakat dengan lima kegiatan utama: Kesehatan Ibu dan Anak, pencegahan Diare, Penanggulangan dan Pencegahan Kekurangan Gizi, Imunisasi dan Keluarga Berencana. Kegiatan ini berkembang sesuai dengan kebutuhan masyarakat yang dalam pelaksanaannya menjadi 4 strata: Praama, Madya, Purnaman, MANDIRI. Strata MANDIRI adalah kegiatan0kegiaan terpadu yang meliputi kesehatan, ekonomi, pendidikan, agama, dan lain-lain. Pelatihan, penyegaran, dan pembinaan kader posyandu secara berkesinambungan.

1. Penyempurnaan dan sosialisasi modul pelatihan kader Posyandu yang diintegrasikan dengan PAUD dan BKB bekerjasama dengan Pokja II.
2. Penyempurnaan dan sosialisasi Buku Pelatihan Kader Posyandu.
3. Sosialisasi Buku Pegangan Kader Gizi.
4. Integrasi Sistem Informasi Posyandu (SIP) dengan Sistem Informasi Manajemen PKK (SIM PKK) dan Sosialisasinya.

5. Mengadakan Jambore Nasional Kader Posyandu setiap tahun sekali sebagai penghargaan kepada kader dan upaya peningkatan kinerja kader,
6. Lomba pelaksana terbaik Posyandu sebagai upaya untuk meningkatkan mutu dan jumlah posyandu agar berkembang menjadi Posyandu Mandiri atau Posyandu Plus.
7. Temu konsultasi pengelola Posyandu tingkat daerah/ nasional.
8. Optimalisasi kegiatan PAUD terintegrasi dengan posyandu dan BKB bekerjasama dengan Pokja II.
9. Mengembangkan Posyandu Lansia.

Meningkatkan Pengetahuan dan kemampuan keluarga dalam:

1. Mengetahui tanda-tanda kegemukan (obesitas) dan kekurangan gizi.
2. Mengetahui tanda-tanda bahaya NARKOBA dan upaya pencegahannya.
3. Mengetahui tanda-tanda bahaya Narkoba dan upaya pencegahannya.
4. Mengetahui tanda-tanda bahaya kehamilan secara dini.
5. Mengetahui bahaya penyakit

Kelestarian Lingkungan Hidup

1. Pengembangan kualitas lingkungan dan pemukiman, kebersihan dan kesehatan, pada pemukiman yang padat dalam rangka terwujudnya kota bersih dan sehat (Health Cities)
2. Pencegahan banjir dengan tidak menebang pohon sembarangan.
3. Program sejuta pohon sebagai paru-paru kota dan pencegahan polusi udara.
4. Pemanfaatan jamban dan air bersih dalam rangka mewujudkan Indonesia Sehat.
5. Memasyarakatkan biopori (lubang resapan) untuk mencegah genangan dan resapan air.

Perencanaan Sehat. Meningkatkan kegiatan dalam program perencanaan sehat antara lain;

1. Meningkatkan penyuluhan tentang pentingnya pemahaman dan kesertaan dalam program keluarga berencana menuju keluarga berkualitas.
2. Meningkatkan kemampuan perencanaan kehidupan keluarga sehari-hari dengan berorientasi pada masa depan dengan cara membiasakan menabung.
3. Kegiatan kesatuan Gerak PKK KB-KES dalam upaya meningkatkan cakupan hasil pelayanan KB-KES.
4. Peringatan Hari Keluarga Nasional (HARGANAS) dalam upaya peningkatan ketahanan keluarga untuk mewujudkan keluarga berkualitas.

5. Meningkatkan penyuluhan kesehatan reproduksi bagi remaja dan calon pengantin.
6. Mengatur keseimbangan antara pemasukan dan pengeluaran keuangan keluarga.

Sementara untuk hubungan kerja (struktural PKK) adalah sebagai

berikut :

1. Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK bersifat konsultatif dan koordinatif.
2. Hubungan kerja antara Tim Penggerak PKK dengan Pemerintah, lembaga kemasyarakatan / LSM. Lembaga lainnya bersifat kemitraan.
3. Hubungan kerja Tim Penggerak PKK dengan Dewan Penyantun bersifat konsultatif.
4. Hubungan kerja dengan LKMD atau sebutan lain, bersifat konsultatif dan kerjasama yang saling menguntungkan.

Penggalian informasi kepada sejumlah informan terhadap konteks tersebut maka secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tingkat pengetahuan masyarakat kampung mengenai struktur peran dan fungsi organisasi PKK dikategorikan tidakmengetahui. Pemahaman akan struktur peran dan fungsi dianggap penting dalam menjadikan masyarakat sebagai aktor pembangunan. Konteks ini dimaksudkan agar masyarakat sebagai obyek pemberdayaan dapat sekaligus menjadi subyek penggerak pemberdayaan. Dalam pencapaian tersebut tentu saja sebuah masyarakat harus dilengkapi kompetensi-kompetensi dalam pengenalan organisasi dan program-program yang dijalankan oleh organisasi. Hal ini bertujuan agar masyarakat mampu mengidentifikasi sendiri masalah dan kebutuhannya, mampu mencapai kesempatan tentang sasaran yang hendak dicapai dan skala prioritas, mampu menemukan dan menyepakati cara dan alat untuk mencapai

sasaran yang telah disetujui serta mampu bekerjasama rasional dalam bertindak mencapai tujuan.

Berikut penuturan informan MG (41 thn) Tim Pembina PKK Distrik Obaa, berdasarkan fenomena diatas :

"...tidak menjadi penting anggota-anggota PKK mengetahui struktur peran dan fungsi kelembagaan PKK....karena program-program yang dijalankan berdasarkan apa yang telah diputuskan di tingkat kabupaten...harapan agar masyarakat sendiri yang menentukan program apa yang menjadi kebutuhannya...tidak seperti itu mekanismenya..."

Informan lain XS (32 thn) Warga Kampung Soba :

"...banyak mama-mama tidak tahu...masuk anggota PKK atau tidak...kalau kita disuruh kumpul....kita kumpul...saya juga tidak tahu...tapi saya sering dipanggil kumpul-kumpul..."

Menurut Yeremias *et al*(1999) bahwa pemberdayaan masyarakat seharusnya berintikan pada suatu metodologi yang disebut *consceintization* yaitu merupakan proses belajar untuk melihat kontradiksi sosial, ekonomi dan politik dalam masyarakat. Paradigma ini mendorong masyarakat untuk mencari cara menciptakan kebebasan dari struktur-struktur yang opresif. Bertolak dari pengertian ini maka sebuah partisipasi masyarakat tidak hanya sebatas pelaksanaan suatu program saja melainkan juga harus menyentuh pada nilai politis dalam mengkritisi sebuah struktur peran dan fungsi berdasarkan kebutuhan mendasar mereka yang tidak bersifat general.

c. Peningkatan Kapasitas Masyarakat sebagai Wujud Pemberdayaan PKK

Dalam menganalisis peningkatan kapasitas masyarakat sebagai wujud pemberdayaan yang dilakukan oleh PKK kabupaten, dibatasi pada 3 (tiga) indikator sebagai proses yang dilakukan TP PKK dalam pencapaian kapasitas masyarakat sasaran program, yaitu;

1. Penyuluhan. Hakekat Gerakan PKK adalah gerakan yang tumbuh dari bawah dengan wanita sebagai motor / penggeraknya untuk membangun keluarga sejahtera sebagai unit atau kelompok terkecil dalam masyarakat. guna menumbuhkan, menghimpun, mengarahkan, dan membina keluarga dalam mewujudkan keluarga sejahtera". Dari batasan PKK tersebut jelaslah bahwa tujuan gerakan PKK adalah mewujudkan keluarga sejahtera, yaitu; keluarga yang mampu menciptakan keselarasan, keserasian, dan keseimbangan antara kemajuan lahiriah dan batiniah berdasarkan Pancasila dan UUD 1945.

Sebagai unit terkecil dalam masyarakat, keluarga mempunyai arti besar dalam proses pembangunan. Indonesia yang merupakan negara kepulauan dengan wilayah terbentang dari Sabang sampai Merauke terbangun atas unit-unit keluarga kecil. Apabila masing-masing keluarga sudah dapat mewujudkan tata kehidupan dan penghidupannya diliputi rasa saling pengertian, kekeluargaan yang harmonis, tentu Indonesia akan menjadi negara yang aman, damai, tentram, dan sejahtera. Jadi, kondisi keluarga dapat menjadi salah satu barometer bagi kesejahteraan masyarakat pada umumnya.

Permasalahannya sekarang adalah bagaimana membudayakan PKK sesuai dengan eksistensinya. Konteks yang dimaksud tentu saja harus melalui serangkaian proses, salah satu di antaranya adalah melalui penyuluhan dalam

mengaktualisasikan program-program PKK. Harapannya adalah dengan intensitas penyuluhan yang tinggi maka masyarakat atau sasaran program dapat melakukan perubahan dalam diri dan kelompoknya sampai pada tingkat lebih luas lagi sebagai implikasinya. Perubahan yang dimaksud baik yang bersifat pengetahuan, keterampilan, pengertian, sikap/perilaku, tujuan, aktivitas maupun kepercayaan diri. Dengan demikian aktivitas penyuluhan dalam konteks ini (gerakan PKK) dapat dikonsepsikan sebagai upaya pemberdayaan ibu-ibu rumah tangga dan keluarganya beserta masyarakat secara luas melalui kegiatan pendidikan non formal untuk membangun keluargayang tangguh sebagai unit kelompok terkencil dalam masyarakatagar mereka mampu menolong dirinya sendiri baik di bidang ekonomi, social maupun politik sehingga wujud kesejahteraan mereka dapat capai melalui partisipasinya dalam pembangunan yang berangkat dari skala mikro (rumah tangga) sampai ke skala yang lebih luas seperti kampung dan seterusnya.

Berdasarkan hasil wawancara terhadap sejumlah informan, diperoleh keterangan bahwa intensitas penyuluhan yang dilakukan tim pembina PKK dalam mengaktualisasikan program-programnya jarang dilakukan. Secara keseluruhan dapat disimpulkan bahwa tanggapan masyarakat kampung (responden) mengenai intensitas atau seringnya penyuluhan dilakukan oleh TP-PKK dalam melaksanakan program-programnya dikategorikan kurangintensif.

Berikut penuturan informan YBG (32 thn) ibu rumah tangga akan fenomena tersebut :

"...seingat saya kumpul-kumpul mama-mama...waktu rame-rame disini..bupati datang lihat kampung....mama-mama disuruh kumpul juga...bicara-bicara tentang anak...disuruh kasi makan bagus-

bagus...supaya pintar...disuruh juga dibawa ke posyandu...dikasih obat..”

Informan lain ELB (27 thn) kader PKK Distrik Obaa :

”...tidak ada jadwal khusus untuk memberikan penyuluhan kepada mama-mama...biasanya dilakukan kalau ada kunjungan pejabat ke kampung...kita disampaikan untuk mengumpulkan mereka....karena istri bupati mau lihat...penyuluhannya masalah kesehatan ibu-anak...pernah juga masalah bagaimana mama-mama rawat diri, urus anak sama suami baik-baik...memang jarang dilakukan...mama-mama juga tidak terlalu senang kalau bicara-bicara saja...dia senang kalau ada kerja-kerja...”

Informan XE (45 thn) tokoh masyarakat :

”...saya lihat...itu kegiatan-kegiatan PKK lebih banyak dikota..kalau di kampung-kampung...itu jarang sekali...seharusnya itu di kampung diutamakan...pembangunan itu berhasil kalau kampung-kampung maju...melihatnya sederhana lihat keluarga-keluarga....tapi setiap saya tanya mama-mama di kampung-kampung...malah mereka itu tidak tau apa itu PKK...”

Informan ST (35 thn) TP PKK Kabupaten Mappi :

”...10 program PKK yang sudah dicanangkan secara nasional, itu sangat fleksibel...harus disesuaikan dengan kebutuhan masyarakat...apa yang sangat mendesak itu yang kita utamakan...informasinya dari pengurus atau kader kita di tingkat distrik dan kampung... menjadi bahan kita untuk melaksanakan program-program PKK kepada ibu-ibu rumah tangga..contohnya sekarang yang penting mengenai penularan penyakit seksual HIV....itu penting diketahui oleh ibu-ibu... jadi PKK mengawali program peningkatan kualitas kesehatan Ibu dan anak yang meliputi, penyuluhan peningkatan kesehatan ibu dan gizi buruk serta pengobatan massal di kampung-kampung.....ya’..kalau kegiatannya...karena keterbatasan dana...sehingga TP PKK Kabupaten sering mengikutkan kegiatan-kegiatan PKK dengan kunjungan kerja ke distrik atau kampung-kampung...”

Dari keterangan informan diperoleh informasi bahwa dalam konteks penyuluhan hanya ditekankan pada bidang kesehatan serta sedikit di bidang pangan dan sandang. Sementara bidang-bidang lain belum menjadi prioritas termasuk penyuluhan dalam usaha peningkatan pendapatan keluarga. Apa

yang menggambarkan tersebut menjadi sebuah kondisi yang empirik optimalisasi dari eksistensi gerakan PKK dalam pemberdayaan masyarakat kampung tidak optimal khususnya dalam konteks penyuluhan. Pentingnya terpahami dari 10 program PKK melalui juru penerangan (penyuluh) agar kebijakan dan program maupun kegiatan yang hendak dijalankan oleh TP PKK Kampung dapat segera diketahui oleh masyarakat umum maupun anggota PKK di seluruh pelosok wilayah dalam membantu program pemerintah melalui gerakannya yang bertujuan mewujudkan keluarga sehat, sejahtera, maju dan mandiri sehingga dapat berperan dan terlibat dalam pembangunan di tingkat Kampung, Distrik hingga Kabupaten.

Secara teoritis dikatakan bahwa nilai penting sebuah penyuluhan didasari oleh pemikiran bahwa penyuluhan adalah proses pendidikan yang bertujuan untuk mengubah kesadaran dan perilaku (pengetahuan, sikap, dan keterampilan) manusia ke arah yang lebih baik sehingga mereka menjadi berdaya dan dapat mencapai kehidupan yang lebih baik dan sejahtera. Hal ini sesuai dengan hakekat ilmu yang berfungsi sebagai pengetahuan yang membantu manusia dalam mencapai tujuan hidupnya (Mardikanto, 1992).

Tabel 2. Matriks Kegiatan Penyuluhan yang Pernah Dilakukan di Kampung Soba Distrik Obaa.

Penyuluhan di Bidang	Kegiatan	Peserta	Tupoksi dari Program
Kesehatan	Memberikan pengetahuan kepada masyarakat mengenai KB, kesehatan reproduksi, bahaya penularan penyakit seksual HIV dilanjutkan penimbangan balita di posyandu	Ibu-Ibu dan remaja putri di Kampung Soba	POKJA IV : Mengelola Program kesehatan, keletarian lingkungan hidup dan perencanaan sehat

Pangan, Sandang & perumahan	<ul style="list-style-type: none"> • Pengetahuan tentang makanan beragam, bergizi dan berimbang. • pemanfaatan tanah pekarangan sebagai sumber pangan • Cara merias diri 	Ibu-Ibu dan remaja putri di Kampung Soba	POKJA III : Mengelola Program Pangan, sandang, perumahan dan tata laksana rumah tangga
-----------------------------	---	--	--

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2011.

2. Pelatihan Keterampilan. Secara umum pelatihan merupakan bagian dari pendidikan yang menggambarkan suatu proses dalam pengembangan organisasi maupun masyarakat. Pendidikan dengan pelatihan merupakan suatu rangkaian yang tak dapat dipisahkan dalam sistem pengembangan sumberdaya manusia, yang di dalamnya terjadi proses perencanaan, penempatan, dan pengembangan tenaga manusia.

Dalam proses pengembangannya diupayakan agar sumberdaya manusia dapat diberdayakan secara maksimal, sehingga apa yang menjadi tujuan dalam memenuhi kebutuhan hidup manusia tersebut dapat terpenuhi. Moekijat (1993:3) juga menyatakan bahwa “pelatihan adalah suatu bagian pendidikan yang menyangkut proses belajar untuk memperoleh dan meningkatkan keterampilan diluar sistem pendidikan yang berlaku, dalam waktu yang relatif singkat dan dengan metode yang lebih mengutamakan praktek daripada teori”. Selanjutnya dikatakan bahwa kegiatan pelatihan sebagai upaya mendidik dalam arti sempit, terutama dilakukan dengan cara instruksi, berlatih, dan sikap disiplin. Antara pendidikan dengan pelatihan sulit untuk menarik batas yang tegas, karena baik pendidikan umum maupun pelatihan merupakan suatu proses kegiatan pembelajaran yang mentransfer pengetahuan dan keterampilan dari sumber kepada penerima. Walaupun

demikian perbedaan keduanya akan terlihat dari tujuan yang ingin dicapai melalui kegiatan tersebut. Pendidikan umum (formal) menurut Halim dan Ali (1993:3) selalu berkaitan dengan mata pelajaran secara konsep dan sifatnya teoritis dan merupakan pengembangan sikap dan falsafah pribadi seseorang. Bila pelatihan lebih menitik beratkan pada kegiatan yang dirancang untuk memperbaiki kinerja dalam menjalankan tugas, maka pendidikan lebih menitik beratkan pada pengembangan pengetahuan dan pemahaman terhadap keseluruhan lingkungan.

Dalam implementasi 10 program pokok PKK, konteks pelatihan dan keterampilan berada di wilayah kerja POKJA II, yaitu : mengelola program pendidikan dan keterampilan serta pengembangan kehidupan berkeoperasi. Hasil temuan di lapangan dapat dijelaskan bahwa peranan PKK Kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat mengenai pelatihan keterampilan hanya difokuskan kepada peningkatan keterampilan kecakapan hidup (*life skill*) perempuan untuk menambah pendapatan ekonomi rumah tangga. Sementara untuk keterlibatan dalam menyusun program pembangunan kampung belum menjadi perhatian dan skala prioritas. Konsturksi stereotipe mengenai peranan perempuan dan laki-laki masih sangat sarat tergambar. Konteks ini dimaksudkan bahwa untuk skala public dan penentuan keputusan masih didominasi oleh keputusan laki-laki, sehingga pertemuan-pertemuan atau rapat rembuk kampung dan segala hal mengenai pembangunan kampung masih urusan tanggung jawab laki-laki sebagai kepala rumah tangga.

Berikut penuturan informan ZW (42 thn) TP PKK Distrik Obaa akan fenomena ini :

“...untuk pemberdayaan ekonomi keluarga, kegiatannya di pusatkan di tingkat kabupaten...kita dari PKK Distrik turun ke kampung panggil mama-mama untuk kita ajar...waktu di kabupaten...tahun 2010... PKK Kabupaten mendatangkan para pemandu dari luar Papua untuk memberikan pelatihan ketrampilan pemanfaatan pohon kelapa, mulai dari akar sampai daun. Kegiatan ini disebut Program Kelapa Terpadu (PKT) pada kampung-kampung.... PKT ini lebih terfokus kepada kaum perempuan dan generasi muda untuk memanfaatkan pohon kelapa...tidak cuma itu, kita juga pernah ajar mama-mama di kampung merias diri..suruh tanam sayur-sayur di dekat rumahnya...”

Informan lain salah satu peserta yang pernah mengikuti pelatihan PKT (MRT, 26 thn) :

“.....pohon kelapa itu kita dikasi ajar... mulai dari, batang, daun, air kelapa sampai buahnya. Dari daun (lidi) dibikin taplak meja dan alas piring. Dari buah kelapa atau tempurung dijadikan pigura, meja, juga dapat dibuat minyak untuk pengawet ikan. Sedangkan isi buah kelapa bisa dibuat visio semacam pasta gigi. Lalu air kelapa dibuat natadekoko yang dapat dicampur dengan es buah. Kemudian batang kelapa dapat dibuat aneka perhiasan-perhiasan.....Ada juga ajar kita...pake rias-rias...mama-mama...sangat senang...waktu itu kita kumpul-kumpul tiga hari..”

Dari keterangan sejumlah informan dapat disimpulkan bahwa tanggapan mereka mengenai manfaat pelatihan yang dilakukan oleh TP- PKK Kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat kampung belum sepenuhnya terasakan dengan baik. Dari observasi dan wawancara yang dilakukan juga menunjukkan bahwa penguatan kapasitas perempuan kampung Soba dalam memanfaatkan sumberdaya alam untuk menambah pendapatan rumah tangga sejalan dengan kehidupan yang dilakoninya setiap hari. Hal ini sedikit banyaknya dipengaruhi juga oleh budaya setempat.

Dalam A Feminist Psychologist's (2007) disebutkan laki-laki Suku Papua pedalaman diasosiasikan dengan budaya dan perempuan dengan alam.

Sama seperti dikatakan Simone de Beauvoir. Menurut Beauvoir, hal ini dikarenakan laki-laki tidak mampu mencipta melalui reproduksi biologis, sehingga ia menciptakan yang artificial. Dalam masyarakat Suku Papua, karya artificial ini berwujud ukiran, perisai dan benda-benda seni lainnya yang hanya boleh dibuat oleh laki-laki.

Penjauhan perempuan dari budaya pada akhirnya mendekatkan mereka pada alam. Laki-laki Suku Papua Pedalaman memang dilekatkan kepada tugas-tugas yang terkait dengan budaya. Selain mengukir, juga menjadi pelaksana pesta-pesta adat. Sementara tugas perempuan lebih dikaitkan dengan sifat-sifat alam. Perempuan bertugas mengasuh sama seperti alam yang mengasuh. Perempuan menyediakan makanan, sama seperti alam yang memberikan kehidupan.

Pembagian tugas ini dalam Masyarakat Suku Papua pedalaman sangat erat kaitannya dengan falsafah hidup mereka, yaitu keseimbangan. Prinsip keseimbangan ini pula yang menyebabkan pembagian peran gender dalam keluarga. Pembagian peran antara laki-laki dan perempuan dipandang sebagai salah satu cara mencapai keseimbangan antar manusia. Sayangnya, pembagian ini sangat patriarkis. Laki-laki adalah kepala, pihak yang majub berperang, pengukir, penabuh tifa, penjaga dan pelaksana ritual. Mereka bertugas membangun rumah, membuat perahu dan memburu babi ataupun buaya. Sedangkan perempuan mengerjakan tugas-tugas domestik seperti menyediakan makanan, mengumpulkan kayu bakar, menjaring ikan, membuat tikar atau tas, menjaga rumah dan anak-anak serta membantu suami membuat rumah serta perahu. Pembagian peran yang seperti inilah yang akhirnya

membuat perempuan menderita karenabeban kerja yang terlalu berat. Amat disayangkan bahwa pembagian ini didasarkan pada satufalsafah tertinggi dalam konstruksi budaya masyarakat. Sebagai falsafah tertinggi, keseimbangan kosmik inimenjadi sendi kehidupan bagi masyarakat Suku Papua Pedalaman. Oleh karena itu penyadaranakan peran gender yang telah dilekatkan sedemikian rupa terhadapmereka atas nama keseimbangan kosmik harus mengalami perubahan-perubahan atau penyesuaian-pensyesuaian nilai sesuai dengan perkembangan zaman. Tentu saja harapan ini sedikit-banyaknya dapat diperankan oleh gerakan PKK dalam program-programnya yang menjadikan perempuan sebagai target sasaran dan motor penggeraknya.

3. Dukungan Fasilitas/Infrastruktur. Secara umum terdapat beberapa definisi kemiskinan dan kriteria garis kemiskinan yang digunakan saat ini.Kemiskinan adalah suatu situasi atau kondisi yang dialami seseorang atau sekelompok orang yang tidak mampu menyelenggarakan hidupnya sampai suatu taraf yang dianggap manusiawi (Bappenas, 2002).Oleh Tim Crescent ciri masyarakat miskin disebutkan sebagai berikut :

- Secara politik: tidak memiliki akses ke proses pengambilan keputusan yang menyangkut hidup mereka.
- Secara sosial: tersingkir dari institusi utama masyarakat yang ada
- Secara ekonomi: rendahnya kualitas SDM termasuk kesehatan, pendidikan, ketrampilan yang berdampak pada penghasilan.
- Secara budaya dan Tata Nilai: terperangkap dalam budaya rendahnya kualitas SDM, seperti rendahnya etos kerja,berpikir pendek,dan fatalisme.

- Secara lingkungan hidup: rendahnya pemilikan aset fisik termasuk aset lingkungan hidup, seperti air bersih dan penerangan (Tim Crescent, 2003).

Kondisi tersebut menyebabkan tidak terpenuhinya kebutuhan dasar manusia, seperti sandang, pangan, papan, keamanan, identitas, cultural, proteksi, kreasi, kebebasan, partisipasi dan waktu luang (Fernandesz, 2002 dalam Tim Crescent, 2003). Penduduk miskin di Indonesia dibedakan menjadi a) kemiskinan kronis (*chronic poverty*) atau kemiskinan struktural yang terjadi terus-menerus, dan b) kemiskinan sementara (*transient poverty*) yang ditandai menurunnya pendapatan masyarakat secara sementara sebagai akibat perubahan siklus ekonomi dari kondisi normal menjadi krisis. Menurut Ellis, 1984 (dalam Tadjuddin Noer Effendi, 1995) dimensi kemiskinan dapat diidentifikasi menurut ekonomi, sosial, politik. Kemiskinan sebagai gejala sosial dan politik. Berdasarkan dimensi ini dapat di analisis sifat-sifat kemiskinan. Dengan demikian dapat dibedakan aspek-aspek kemiskinan dan menguak sebab-sebab kemiskinan. Atas dasar ini kemudian dapat dirancang upaya untuk memerangi kemiskinan.

Dalam upaya memberdayakan masyarakat kolaborasi lintas sektoral sebagai faktor penentu untuk terwujudnya aksesibilitas masyarakat dalam memanfaatkan fasilitas-fasilitas yang dapat menunjang aktivitas kehidupan mereka. Konteks yang sama dijelaskan oleh Naraya (2002) bahwa aset berkaitan dengan sumberdaya fisik dan financial dalam suatu komunitas, baik secara individual maupun kolektif, yang berfungsi untuk perluasan pilihan bagi orang miskin dalam kehidupannya dalam memanfaatkan asset tersebut untuk peningkatan kesejahteraannya.

Lebih lanjut dipertegas oleh Kartasasmita (1995:19) bahwa upaya memberdayakan rakyat harus dilakukan melalui tiga cara:

- 1) Menciptakan suasana yang memungkinkan potensi masyarakat untuk berkembang. Disini titik tolaknya bahwa manusia dan masyarakat memiliki potensi (daya) yang dapat dikembangkan, sehingga pemberdayaan merupakan upaya untuk membangun daya itu dengan mendorong, memberikan motivasi, dan membangkitkan kesadaran akan potensi yang dimilikinya serta berupaya untuk mengembangkannya.
- 2) Memperkuat potensi yang dimiliki oleh rakyat dengan menerapkan langkah-langkah nyata, menampung berbagai masukan, menyediakan sarana dan prasarana baik fisik (irigasi, jalan dan listrik) maupun sosial (sekolah dan fasilitas pelayanan kesehatan) yang dapat diakses masyarakat lapisan bawah. Terbukanya akses pada berbagai peluang akan membuat rakyat makin berdaya, seperti tersedianya lembaga pendanaan, pelatihan, dan pemasaran di pedesaan.
- 3) Melindungi dan membela kepentingan masyarakat lemah. Dalam proses pemberdayaan harus dicegah jangan sampai yang lemah bertambah lemah atau makin terpinggirkan menghadapi yang kuat. Oleh karena itu, perlindungan dan pemihakan kepada yang lemah amat mendasar sifatnya dalam pemberdayaan masyarakat. Melindungi dan membela harus dilihat sebagai upaya untuk mencegah terjadinya persaingan yang tidak seimbang dan eksploitasi atas yang lemah.

Kaitannya dengan peran pemberdayaan PKK Kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat kampung terhadap dukungan sarana/infrastruktur

dan fasilitas lainnya, dari observasi yang dilakukan tampak bahwa dukungan sarana/infrastruktur serta fasilitas lainnya yang dimaksudkan masih tergolong sangat minim. Salah satu contoh yang ditemukan dilapangan bahwa penyelenggaraan Pos Yandu (Pos Pelayanan Terpadu) bagi kesehatan ibu dan anak, belum memiliki tempat yang permanen. Penyelenggaraan yang dilakukan selama ini (kerjasama PKK dengan Puskesmas Distrik Oba) masih mengambil tempat di rumah Kepala Kampung.

Berikut penuturan informan (EBT, 37 thn) TP-PKK Kabupaten :

“...tidak bisa banyak berharap dari program PKK.....karena anggaran yang ada sangat terbatas....kita hanya berharap dari anggaran daerah atau distrik...yang jumlahnya sangat sedikit....jadi program yang dijalankan lebih banyak yang sifatnya sosialisasi...atau bersama dengan program kesehatan...seperti kasi immunisasi...vitamin.....sama anak-anak di kampung... bukan memberikan bantuan-bantuan sarana...”

Informan lain (ALT, 29 thn) Staf Pengurus Kampung Soba :

“...kalau ada anggaran...itu sudah ditentukan dari kabupaten...seperti dana Rencana Strategis Pembangunan Kampung (RESPEK) yang bersumber dari Dana Otonomi Khusus (Otsus) Bagi Provinsi Papua sebesar Rp100 juta/kampung.....itu sudah ada pembagiannya...untuk kegiatan PKK hanya dapat 5%...selebihnya dipakai memperbaiki fasilitas kampung dan honor pengurus kampung...”

Informan VC (25 thn) :

“...tidak pernah mama-mama dapat bantuan uang atau alat-alat...kalau di suruh kumpul...kita dikasih lihat saja caranya...kalau mau bikin-bikin di rumah kita beli sendiri....”

Secara keseluruhan, peranan PKK Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat Kampung Sobadengan penekanan terhadap indikator-indikator yang telah dipersyaratkan sebelumnya dinilai tidak optimal. Dengan demikian dapat disimpulkan bahwa dalam upaya pemberdayaan unsur-unsur pemberdayaan sebagai unsur pembangunan berupa norma, organisasi dan

sumberdaya menjadi titik tolaknya. Secara kontekstual dijelaskan oleh Salman (2001) bahwa pemberdayaan masyarakat sebenarnya melibatkan tiga unsur utama, yakni; sumberdaya (*resources*), organisasi (*organization*) dan norma-norma (*norm*). Pemberdayaan berlangsung dalam proses dimana sejumlah sumberdaya dikelola dan terspasilitasi oleh sebuah organisasi, dimana organisasi tersebut bekerja berdasarkan norma tertentu dalam pencapaian tujuan. Hal-hal ini menjadi hal yang esensial yang harus dipahami dalam mengimplementasikan berbagai program atau terhadap keberlanjutan program-program bantuan kepada masyarakat, sehingga masyarakat dapat berfungsi sebagai obyek sekaligus sebagai subyek program yang menjadikannya sebagai aktor pembangunan atau aktor dari pemberdayaan itu sendiri. Olehnya itu dalam konteks pemberdayaan korelasi antara sumberdaya fisik dan non fisik harus seiring-sejalan yang mana keduanya harus saling melengkapi satu sama lain.

C. FAKTOR DETERMINAN TERHADAP EKSISTENSI PKK KABUPATEN DALAM MELAKUKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKATKAMPUNG

Penjelasan mengenai faktor determinan terhadap eksistensi PKK Kabupaten dalam melakukan peran pemberdayaan masyarakat kampung, pendekatan kajiannya diawali dengan kongritisasi 10 program PKK pada masyarakat Kampung Soba yang dilakukan PKK kabupaten kemudian dilakukan analisis dari apa yang menjadi keunggulan sebagai kekuatan dan kelemahan sebagai kekurangan yang menjadi faktor determinan (penentu) dari mekanisme kegiatan PKK yang terjadi selama ini. Konteks ini dimaksudkan

bahwa keberlanjutan dari sistem kerja atau keberhasilan dari suatu program, terletak pada kemampuan mengeliminir kelemahan-kelemahan/hambatan yang ada dan memberikan penguatan yang optimal dari pada keunggulan-keunggulan atau potensi yang dimiliki sebagai faktor penentu atau faktor yang potensial mempengaruhi keberlanjutan atau keberhasilan dalam pencapaian tujuan dari sistem atau program yang dilakukan.

Secara konseptual bahwa jaminan pembangunan berkelanjutan adalah partisipasi masyarakat. Partisipasi masyarakat memegang peranan yang sangat penting untuk mewujudkan tujuan pemberdayaan yakni masyarakat yang mandiri. Setiap orang memiliki alasan untuk ikut berpartisipasi dalam kegiatan pemberdayaan dan pada dasarnya setiap orang akan berpartisipasi dalam suatu kegiatan jika memberikan manfaat bagi diri mereka. Pada gerakan PKK sebagai program pemberdayaan masyarakat yang memiliki harapan bahwa program ini dapat merubah hidup mereka menjadi lebih baik. Dan fakta yang terjadi di lapangan menunjukkan bahwa masyarakat cenderung menginginkan manfaat atau keuntungan dari program dalam waktu singkat.

1. Kongritisasi 10 Program PKK di Kampung Soba sebagai Realitas Peranan PKK Kabupaten dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat

Substansi dari sasaran pemberdayaan masyarakat adalah “ memfasilitasi proses pemberdayaan masyarakat (orang miskin) melalui penanaman kesadaran kritis dan pengembangan organisasi, supaya masyarakat tersebut dapat menstrasformasi struktur sosialnya melalui usaha-usaha kolektif yang mengandalkan diri sendiri (kemandirian), dan ketika masyarakat alternative hasil transformasi tercipta mereka dapat mewujudkan

perbaikan dalam tata produksi, standar hidup, keadilan social dan kesamaan hak diantara mereka". Dalam hal ini, 10 program PKK dimaknai sebagai program yang berproses untuk dijadikan sebagai sarana kesadaran kritis yang mampu mentransformasi struktur social masyarakat (masyarakat Kampung Soba) dalam menciptakan kemandirian melalui agen pemberdayaan (PKK Kabupaten).

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, maka kongritisasi dari 10 program PKK yang dilakukan oleh PKK Kabupaten dalam melakukan pemberdayaan masyarakat di Kampung Soba dapat terjelaskan sebagai berikut :

a. Penghayatan dan Pengamalan PANCASILA

Pancasila adalah landasan ideologi negara Indonesia, dan terdiri dari 5 prinsip yang tidak terpisahkan, meliputi : Ketuhanan Yang Maha Esa, Kemanusiaan Yang Adil dan Beradab, Persatuan Indonesia, Kerakyatan Yang Dipimpin oleh Hikmat Kebijaksanaan dalam Permusyawaratan/Perwakilan, dan Keadilan Sosial bagi Seluruh Rakyat Indonesia. Pancasila digali dari nilai budaya Indonesia, yang mencakup kepercayaan kepada Tuhan Yang Maha Esa, menghargai dan menjunjung tinggi harkat dan martabat manusia, lebih mementingkan kepentingan nasional dari pada kepentingan diri sendiri atau keluarga. Mengembangkan rasa kebersamaan, taat pada peraturan dan hukum yang berlaku, berbudi pekerti luhur serta berwatak mulia.

Dalam kondisi realitasnya substansi nilai-nilai penghayatan dan pengamalan PANCASILA sudah menjadi bagian dan terpraktekkan dari pedoman bertingkah laku bagi masyarakat di kampung ini. Bahkan jika

didalami lebih jauh nilai-nilai yang dimaksud jauh sebelumnya telah terkategoriikan kedalam Budaya natural yang telah menjadi kebiasaan, corak, adat istiadat manusia yang telah lama dilaksanakan secara terus-menerus disuatu daerah atau kawasan tertentu. Bisa juga budaya natural disimpulkan sebagai suatu budaya alami atau budaya murni yang telah berkembang dan bertumbuh disuatu daerah tertentu sejak adanya manusia. Budaya natural atau budaya alami telah cukup lama berkembang dalam kehidupan setiap masyarakat sehingga budaya tersebut sangat sukar untuk dilupakan maupun diubah. Bahkan banyak orang beranggapan khususnya mereka yang hidup masih serba tradisional bawah budaya naturallah yang mengatur tata cara hidup, kebebasan dan tingkah laku mereka. Masyarakat di Kampung Soba di dominasi oleh masyarakat pemeluk agama kristiani. Dilihat di sisi kebudayaan, masyarakat (suku asli) pada mulanya masih mengembangkan pola kebudayaan meramu, berburu, serta berkebun. Umumnya mereka melakukan mobilitas darat dengan berjalan kaki atau mengendarai kuda untuk menuju ke ladang (berburu rusa atau kangguru), mencari sagu, serta ke pasar-pasar. Pada lokasi yang terdapat sungai, mereka menggunakan model transportasi perahu menelusuri sungai-sungai yang ada. Masuknya berbagai suku pendatang seperti suku Jawa, suku Bugis-Makassar, suku Toraja, suku Ambon, suku Manado, dan lain-lain membawa perubahan tersendiri terhadap pola kebudayaan suku asli Mappi dan Boven Digoel, sistem pertanian menetap dan usaha-usaha dibidang lain mulai dia geluti. Toleransi antar umat beragama, rasa persatuan, tenggang rasa antar suku ikut pula mewarnai kehidupan kebudayaan di Kab. Mappi pada umumnya dan di Kampung Soba

pada khususnya. Filosofi kehidupan yang dikembangkan oleh masyarakat bahwa perbedaan sebagai rahmat untuk mempererat rasa persaudaraan. Rasa kesatuan dan persatuan bisa muncul dari persaudaraan yang kuat yang memaknai perbedaan sebagai tali penguat (Cinta kasih antar umat beragama itu indah, penuh kedamaian). Hal yang dicermati dalam konteks ini bahwa nilai-nilai PANCASILA sesungguhnya sudah terjalani dengan baik dan menjadi bagian dalam pergaulan hidup mereka.

Keterangan yang diperoleh dari informan bahwa untuk program penghayatan dan pengamalan Pancasila yang masuk dalam POKJA I tidak terlalu menjadi sasaran prioritas yang dilakukan karena masyarakat secara nyata telah melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Selanjutnya dikatakan bahwa salah satu sasaran program untuk pengamalan PANCASILA yang sudah terwujud nyata dalam masyarakat adalah menumbuhkan kesadaran, kesetiakawanan sosial, bertenggang rasa serta saling menghormati antar umat beragama. Meskipun demikian, dalam hal penyelenggaraan program-program lain sering kali kita awali dengan mensosialisasikan pentingnya nilai-nilai yang termasuk dalam PANCASILA untuk terus tetap dipraktekkan.

b. Gotong Royong

Ini adalah sikap kebersamaan, saling membantu. sikap gotong royong sudah ada dalam tradisi, budaya hidup masyarakat di Indonesia pada umumnya dan menjadi modal social dalam menggerakkan pembangunan, seperti : Arisan, Tengelan, Selapanan, Sambatan, Patungan, Lebotan, Jimpitan (Jawa Tengah dan Jawa Timur); Resaya, Tabur (Jawa Timur); Rereyongan Sarumpi (Jawa Barat); Subak, Sekaha (Bali); Basuri, Matag, Siru (Nusa

Tenggara Barat); Arong, Engko, Gemoking (Nusa Tenggara Timur); Sakai-sembahyangan (Lampung); Marsi-dapara (Sumatera Utara); Pela, Masori (Maluku); Mapalus (Sulawesi Utara); Puludow, Pongerih (Kalimantan) dan sebagainya. *mayae, ban atau manong* (membersihkan kebun, membangun rumah dan lain-lain) di Papua.

Konstruksi budaya *mayae, ban atau manong* (membersihkan kebun, membangun rumah dan lain-lain secara bersama-sama) seperti yang telah disebutkan sebelumnya, menjadi spirit kerjasama yang sifatnya kolektif yang terbangun dalam masyarakat kampung. Kondisi ini juga mendapat penguatan dalam hal struktur sosial orang Papua dikenal dengan sistem kepemimpinan tradisional. Kepatuhan terhadap pemimpin non formal dan formal sebagai modal dasar dalam menggerakkan partisipasi masyarakat di Kampung Soba. Dalam konteks gotong royong sebagai salah satu program PKK telah terwadahi dengan baik dalam struktur social masyarakat. Menurut informan sangat mudah memobilisasi masyarakat untuk tujuan kepentingan bersama. Hal ini dibuktikan bahwa ketika Kampung Soba terpilih untuk mewakili Kabupaten Mappi lomba kebersihan kampung tingkat provinsi, semua elemen masyarakat di kampung ini turut berpartisipasi sepenuhnya ikut menyukseskan lomba yang dimaksud. Artinya bahwa dengan modal social yang dimiliki oleh masyarakat akan memudahkan implementasi dari program-program pemberdayaan yang dilakukan oleh PKK Kabupaten. Meskipun demikian program-program PKK yang melibatkan masyarakat dalam kegiatan kolektif sukarela (gotong royong) secara permanen belum dilakukan. Kegiatan-

kegiatan yang dimaksud masih sifatnya temporer yang situasional seperti kegiatan lomba-lomba kampung yang harus melibatkan partisipasi warga.

c. Pangan

Dalam hal pangan, PKK belum menggalakkan penyuluhan untuk pemanfaatan pekarangan, antara lain dengan menanam tanaman yang bermanfaat, seperti sayuran, ubi-ubian, buah-buahan dan bumbu-bumbuan. Demikian juga mengenai anjuran memelihara unggas dan ikan serta cara pemeliharaannya di lahan pekarangan mereka sendiri yang hasilnya dapat dimanfaatkan untuk kepentingan keluarga, dan selebihnya dapat dijual untuk menambah pendapatan keluarga dan meningkatkan penganekaragaman pangan lokal. Informasi yang diperoleh dari informan bahwa masalah ketersediaan pangan tidak menjadi skala prioritas untuk disuluhkan, masalah pangan hanya difokuskan kepada pentingnya asupan gizi bagi anak-anak balita yang informasinya disampaikan atau menjadi bagian dari program kesehatan dalam hal ini POSYANDU. Kondisi ketersediaan pangan tidak menjadi bagian yang disuluhkan karena masalah pangan local perolehannya masih banyak yang tersedia di alam yang dapat dengan mudah diakses oleh masyarakat yang mengembangkan pola kebudayaan meramu, berburu, serta berkebun.

d. Sandang

Sebagai salah satu kebutuhan dasar, pakaian sangat berpengaruh terhadap pembentukan kepribadian, sikap, perilaku dan kesehatan. Di berbagai

daerah, PKK menggalakkan upaya untuk dapat memanfaatkan produk bahan dan corak pakaian setempat, dengan mencintai produksi dalam negeri. Masalah sandang seperti yang telah dijelaskan sebelumnya lebih difokuskan kepada bagaimana ibu-ibu rumah tangga mempunyai keterampilan dalam hal merias diri.

e. Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga

Rumah bukan sekedar tempat untuk berteduh saja. Rumah adalah tempat dimana keluarga dapat hidup bersama dan meningkatkan kualitas hidupnya, dalam lingkungan yang nyaman, damai, bersih dan apik. Keterangan yang diperoleh dari Informan sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat sifatnya situasional, artinya ketika kader atau TP-PKK berkunjung ke rumah warga, maka disitulah diinformasikan bagaimana menata rumah sehat, menarik dan nyaman. Selain itu, perlu pula mengetahui bagaimana menjaga kebersihan rumah dan memanfaatkan pekarangan.

f. Pendidikan dan Keterampilan

Dalam hal ini PKK Kabupaten memanfaatkan jalur pendidikan non-formal. Dengan adanya Program “Wajib Belajar”, maka PKK menganjurkan keluarga untuk dapat memberikan pendidikan yang baik bagi putera-puterinya. Anak laki-laki maupun perempuan, perlu mendapat kesempatan belajar yang sama. Sebagai mitra pemerintah, seharusnya PKK dapat berperan dalam melaksanakan program Pendidikan Anak Usia Dini (PAUD) dan Bina Keluarga Balita (BKB). Dalam rangka Pemberantasan Buta Aksara, PKK juga dapat melaksanakan “Paket A, B dan C”, yang dapat disejajarkan dengan SD, SMP dan SMU. Disamping itu, PKK juga seharusnya menggalakkan pelatihan atau

kursus untuk membuat berbagai kerajinan tangan, produk-produk makanan dan minuman yang hasilnya dapat dijual untuk membantu meningkatkan pendapatan keluarga. Keterangan yang diperoleh dari informan disebutkan bahwa program-program pendidikan yang dijelaskan diatas masuk dalam rencana kerja PKK Kabupaten, namun kendalanya adalah kurangnya kaderisasi memiliki kualitas pendidikan yang baik menyebabkan program ini tidak dapat terlaksana atau dijalankan dengan baik. Untuk peningkatan keterampilan telah dijelaskan dalam penjelasan sebelumnya dan informasi yang diperoleh dari informan bahwa apa yang dilatihkan oleh PKK sangat membantu warga dalam memanfaatkan sumberdaya alam lokalnya.

g. Kesehatan

Kesehatan adalah kebutuhan dasar manusia. Orang harus belajar bagaimana cara menjaga, memelihara kesehatan diri, keluarga dan lingkungannya. Memelihara kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungannya sangat erat kaitannya dengan persoalan kemiskinan dan ketidak tahuan, serta pendidikan yang rendah. Setiap orang mempunyai tugas kewajiban dan bertanggung-jawab untuk memelihara kesehatan diri sendiri, keluarga dan lingkungannya. Orang harus tahu dan mewujudkannya dalam sikap hidup sehari-hari untuk hidup bersih dan sehat, menjaga lingkungan yang sehat, baik di dalam, maupun diluar rumah. Perhatian khusus PKK Kabupaten ditujukan pada kesehatan ibu dan anak, pasangan usia subur, ibu hamil dan ibu menyusui. Untuk mendekatkan sistem pelayanan kesehatan kepada golongan ini, dibentuk Pos Pelayanan Terpadu (POSYANDU), dengan kader Posyandu yang terlatih. Ada 5 Pelayanan Dasar di Posyandu, yaitu : Imunisasi, Gizi,

Keluarga Berencana, Kesehatan Ibu dan Anak (KIA), dan Penanggulangan Diare. Secara teratur ibu hamil memeriksakan diri di Posyandu, dan membawa anak balitanya untuk pemeriksaan kesehatan (penimbangan anak dan imunisasi). Penyuluhan tentang kesehatan, gizi dan keluarga berencana diadakan di Posyandu, bahkan diadakan pula pemberian makanan tambahan serta demonstrasi tentang makanan bergizi.

Menurut informan, kader Posyandu mendapat pelatihan pengetahuan dan keterampilan dalam bidang kesehatan yang menjadi program Posyandu. Untuk menjaga semangat kerja Kader Posyandu, PKK Provinsi bekerjasama dengan Dinas Kesehatan menyelenggarakan Jambore Nasional Kader Posyandu yang diadakan sekali dalam lima tahun. Pengalaman menyatakan bahwa hal ini sangat membantu dalam upaya memotivasi semangat kerja kader bahkan juga Tim Penggerak PKK setempat.

h. Pengembangan Kehidupan Berkoperasi

Dalam program ini, PKK Nasional menganjurkan pembentukan koperasi sebagai upaya pemberdayaan keluarga dengan meningkatkan pendapatan. Koperasi diharapkan menjadi jalur yang baik dalam melatih mewujudkan prinsip kehidupan demokratis dan kerjasama antar-manusia. Usaha Peningkatan Pendapatan Keluarga (UP2K) di beberapa daerah sedapat mungkin ditingkatkan menjadi koperasi. Selain manfaat bagi peningkatan ekonomi keluarga, koperasi juga dapat menjadi jalur menciptakan lapangan kerja setempat. Untuk konteks di wilayah penelitian, upaya PKK Kabupaten dalam memberdayakan masyarakat kampung untuk mengembangkan kehidupan berkoperasi belum pernah sama sekali dilakukan. Keterangan yang

diperoleh dari informan diinformasikan bahwa untuk saat ini sosialisasi yang diberikan kepada masyarakat baru pada tahap bagaimana membangkitkan kesadaran mereka untuk membudayakan menyimpang sebagian hasil pendapatan keluarga. Selanjutnya dikatakan bahwa ada pola pikir yang harus terbenahi dalam masyarakat kampung mengenai alokasi pendapatan yang banyak terserap atau dihabiskan dalam upacara-upacara adat. Prinsip mencari uang untuk pesta, sedapat mungkin sedikit demi sedikit harus tergantikan dengan prinsip investasi untuk kesejahteraan keluarga.

i. Kelestarian Lingkungan Hidup

Program ini sangat membantu dalam menjaga keseimbangan lingkungan secara ekologis. Menjaga kelestarian lingkungan menjadi faktor yang sangat penting dewasa ini. Banyak bencana alam yang disebabkan karena lingkungan yang rusak. PKK seharusnya mempunyai tanggung jawab dalam memberikan penyuluhan sederhana agar lingkungan tidak dirusak dan mencegah pencemaran sumber air, antara lain tidak membuang sampah di sungai atau selokan, serta melaksanakan pemberantasan sarang nyamuk dan penyuluhan – penyuluhan kesehatan lingkungan. Dalam konteks program ini, PKK Kabupaten baru terfokus kepada kebersihan lingkungan yang sifatnya temporer atau situasional. Keterangan yang diperoleh dari informan diinformasikan bahwa untuk Kampung Soba pernah meraih juara II kebersihan kampung mewakili Kabupaten Mappi untuk lomba tingkat provinsi. Selanjutnya dikatakan keberhasilan meraih juara tersebut merupakan kegiatan yang dilakukan oleh PKK Kabupaten dalam menggalang partisipasi warga untuk membersihkan kampung. Meskipun demikian, hal yang dicermati adalah

sebaiknya program-program yang dimaksud tidak hanya sekedar diperuntukkan untuk kegiatan lomba tetapi sedapat mungkin program-program tersebut sifatnya permanen dilakukan.

j. Perencanaan sehat

Perencanaan sehat mencakup antara lain upaya meningkatkan kemampuan keluarga untuk mengelola keuangan keluarga secara efektif, efisien dengan memperhatikan kepentingan masa depan. Anjuran untuk menyimpan uang di Bank, melaksanakan Keluarga Berencana, adalah anjuran kongkrit yang digalakkan dalam program ini. Dalam hal keuangan dianjurkan agar hidup keluarga tidak “besar pasak dari tiang”. Mampu untuk membagi waktu dengan baik, yaitu waktu untuk mengelola rumahtangga, untuk bekerja, beristirahat, santai bersama keluarga, membagi pekerjaan dikalangan anggota keluarga yang didasarkan kemampuan masing-masing. Semua ini dapat membantu dalam upaya membangun kehidupan keluarga yang lebih teratur, terarah, efektif, efisien dan membawa bahagia bagi setiap anggota. Konsep dasar dari program yang dijelaskan sebelumnya belum sepenuhnya menjadi program PKK Kabupaten yang diberikan kepada masyarakat Kampung Soba. Keterangan yang diperoleh dari informan disebutkan bahwa secara substansi untuk dikhususkan dalam menjalankan program ini belum dilakukan, namun informasi-informasi mengenai substansi dari perencanaan sehat di iktukan dalam program-program lain yang memang dikhususkan dilakukan terutam pada program kesehatan.

Intisari yang dapat disimpulkan dalam penjelasan diatas bahwa pada dasarnya jika 10 Program Pokok PKK dioptimalkan untuk dijalankan sebagai

upaya pemberdayaan masyarakat akan berimplementasi terhadap keberdayaan masyarakat karena terintegrasi dalam memenuhi kebutuhan dasar manusia, yaitu kebutuhan fisik, mental dan sosial.

Tabel 3. Kongritisasi 10 Program PKK Kabupaten di Kampung Soba dalam Implementasi Pemberdayaan Masyarakat.

No	Program PKK Kabupaten	Implementasi	POKJ A	Keterangan
1.	Penghayatan dan Pegamalan Pancasila	Penginterasian terhadap nilai-nilai yang menjadi pedoman bertingkah laku masyarakat	I	Porgram yang dilakukan sifatnya sosialisasi dan motivasi terhadap nilai-nilai Pancasila
2.	Gotong Royong	Penguatan nilai budaya lokal <i>mayae, ban atau manong</i> (membersihkan kebun, membangun rumah dan lain-lain secara bersama-sama)	I	Melibatkan tokoh adat untuk legitimasi nilai budaya local yang terkongritkan dalam program-program gotong royong
3.	Pangan	Menjadi bagian dari program kesehatan khususnya kegiatan Posyandu	III	Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan
4.	Sandang	Difokuskan kepada keterampilan ibu-ibu rumah tangga untuk merias diri	III	Diharapkan ada perubahan pola pikir terhadap penampilan diri
5.	Perumahan dan Tata Laksana Rumah Tangga	Penekanan pada sanitasi rumah warga	III	Focus terhadap Lingkungan perumahan yang sehat, menarik dan nyaman
6.	Pendidikan dan	Lebih ditekankan		Memanfaatkan

	Keterampilan	kepada pentingnya pendidikan dasar bagi masyarakat, sementara keterampilan difokuskan kepada kegiatan yang dapat menambah penghasilan rumah tangga	II	jalur pendidikan non formal dan pemanfaatan sumberdaya alam lokal
7.	Kesehatan	Perhatian khusus untuk ibu hamil dan menyusui	IV	Kolaborasi dengan Dinas Kesehatan
8.	Pengembangan Kehidupan Berkoperasi	Baru pada tahap penyadaran untuk menabung hasil perolehan kegiatan produksi dan jasa yang dilakukan	II	Pembenahan perubahan pola pikir masyarakat
9.	Kelestarian Lingkungan Hidup	Focus kepada kebersihan kampung	IV	Meraih juara II kebersihan kampung TK Provinsi
10.	Perencanaan Sehat	Sosialisasi pentingnya peningkatan kapasitas warga untuk dapat melakukan aktivitas yang dapat menghasilkan pendapatan	IV	Masih sebatas pembenahan kesadaran dalam merubah pola pikir masyarakat

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2011.

2. Faktor Determinan PKK Kabupaten dalam Melakukan Pemberdayaan pada Masyarakat

a. Kelemahan PKK dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Faktor Determinan Keberlanjutan.

Gerakan PKK berperan sebagai suatu 'kelembagaan' yang berfungsi membantu memperlancar jalannya program pemerintah di bidang kesejahteraan masyarakat, dianalisis memiliki beberapa kelemahan dan juga potensi jika terkelolah dengan baik dalam melakukan peran pemberdayaan masyarakat (masyarakat kampung) yang dilakukan.

Berikut ini beberapa kelemahan-kelemahan yang dimaksud berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Paradigma kelembagaan yang dikembangkan PKK adalah paradigma dari atas ke bawah (*top down*) dan berdasarkan struktur hirarki kedinasan dari tingkat pusat sampai daerah yang direpresentasikan dengan adanya dewan penyantun, sehingga narasi besar tetap berpeluang untuk mendominasi kebijakan dan melakukan kontrol terhadap program-program yang dilakukan PKK, sehingga program yang dijalankan terkesan bersifat otoritas dan monoton sampai ke tingkat bawah sehingga nampak kurang memberdayakan potensi local masyarakat.

2) Kongkritisasi program PKK lebih menyerupai program satuan kerja perangkat daerah (SKPD) yang dibatasi arus ideologi dan kepentingan subyektif birokrasi. Kondisi ini dipengaruhi hirarkhi dari struktur organisasi dimana ketua TP-PKK dari tingkat pusat sampai desa adalah istri menteri, gubernur, bupati/wali kota, camat, dan kepala desa/kampung sehingga paradigma yang berkembang adalah perempuan dalam bingkai birokrasi.

3) Program yang dijalankan PKK belum mencerminkan ke dalam konsep program bercorak *developmentalis*, belum menyentuh prinsip transformasi jender dan hakikat nilai keadilan asasi bagi perempuan untuk terlibat dalam proses pembangunan baik sisi perencanaan, pelaksanaan sampai pada taraf evaluasi. Jika ditinjau secara mendalam, program yang dijalankan hanya berfokus pada aktivitas domestik perempuan; tidak memperkuat daya kritis dan daya pencerdasan perempuan sebagai gerakan pemberdayaan dan kesejahteraan perempuan dan keluarga. Pembinaan-

pembinaan yang dilakukan sifatnya situasional dan terkesan hanya untuk persiapan atau kegiatan-kegiatan untuk tujuan lomba.

4) Secara empiric model pemberdayaan yang dilaksanakan oleh gerakan PKK terbukti tidak berpengaruh secara langsung bagi perempuan dalam membantu ekonomi keluarga. Sebab program pemberdayaan disesuaikan dengan regulasi pemerintah yang sebagian besar mengutamakan kesuksesan program kesehatan.

5) Keterbatasan sumber daya manusia, sumber dana, waktu dan tenaga bagi TP PKK. TP PKK memiliki banyak keterbatasan SDM karena pengurus tim penggerak khususnya ditingkat desa/kampung umumnya tidak berpendidikan tinggi, sehingga jangkauan pengetahuan dan wawasannya belum cukup mampu menerjemahkan sekaligus mengembangkan program-program PKK agar lebih variatif, menarik dan berdaya ungkit tinggi dalam rangka mewujudkan keluarga yang sehat dan berketahanan

6) Implementasi dari 10 program pokok PKK masih terkesan memberi penguatan kepada kemandirian secara fisik pada perempuan, tetapi kemandirian finansial, pola pikir dan kecerdasannya masih rendah. Kecerdasan disini dalam arti pendidikan dan *life skill* yang bisa menunjang kesejahteraan hidupnya yang masih relatif rendah.

7) Peningkatan kapasitas sumber daya manusia PKK masih kurang memadai, khususnya kaderisasi pendamping di wilayah kampung. Hal ini signifikan dengan partisipasi masyarakat yang masih kurang, masyarakat dan anggota PKK kurang mempunyai jiwa wirausaha dan ketidakpedulian pelaksanaan program.

8) Gerakan PKK dan organisasi TP-PKK belum mampu bekerja sama dengan berbagai jejaring organisasi perempuan yang independen dalam prinsip kemitraan, untuk menjalankan fungsi yang optimal; pengorganisasian, advokasi, edukasi keadilan jender dan hak asasi perempuan.

9) Keadaan geografis dan jarak jangkau antar wilayah menyebabkan kurang lancarnya komunikasi dan informasi yang diperlukan di segala aspek kehidupan dalam mengimplementasikan program.

10) Terbatasnya anggaran dalam mengaktualisasikan program khususnya penyediaan infrastruktur, sehingga program yang dijalankan lebih sifatnya sosialisasi.

Tabel 4. Matriks Faktor Kelemahan Kelembagaan PKK dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Soba.

Aspek	Kelemahan	Implikasi	Keterangan
Kelembagaan	Birokratis (<i>Top down</i>)	Program bersifat otoritas monoton	Program tidak mencirikan kebutuhan wilayah yang esensial
Kompetensi dalam struktur organisasi	Melekat dalam jabatan struktural suami	Kepengurusan hanya bersifat formalitas dan terkesan istri hanya menjadi pelengkap dalam birokrasi	PKK tidak menjadi organisasi yang berbasis kompetensi dalam menggerakkan pembangunan
Program kerja	Masih bersifat aktivitas domestic perempuan	Pengambilan peran perempuan dalam pembangunan wilayah belum tergambarkan	Program harus pula digirim pada konteks <i>developmentalis</i> , agar perempuan menjadi bagian dalam pembangunan
Fokus Program	Masih didominasi masalah kesehatan	Program PKK identik dengan program kesehatan	Masalah peran gender dalam peningkatan pendapatan ekonomi keluarga

			belum tergambar
Kapasitas SDM	Masih sangat rendah, khususnya kaderisasi di wilayah kampung	Program dijalankan bersifat intruksional, anggota PKK belum menjiwai semangat program	SDM yang berkualitas menyebabkan program yang dijalankan lebih kreatif dan inovatif
Aspek	Kelemahan	Implikasi	Keterangan
Pendanaan	Sangat terbatas karena tidak menjadi skala prioritas dalam anggaran pembangunan	Program hanya bersifat sosialisasi dan lomba-lomba	Konstruksi program harus membangun kultur kesadaran dan daya cipta yang terfasilitasi oleh infrastruktur
Jaringan Kerja (<i>Net working</i>)	Masih bersifat lokalitas	Tidak terbangun sinergitas antar program maupun antar lembaga	Interkoneksi antar lembaga di luar komunitas akan memperkuat jaringan kerja dan dampak program yang dijalankan
Aksesibilitas	Jarak antar wilayah dan daya dukung infrastruktur yang masih terbatas	Koordinasi dan konsultatif program tidak berjalan efektif	Sebagai organisasi yang berada di semua tingkatan wilayah, koordinasi dan konsultatif program harus efektif untuk mendapatkan penguatan dalam implementasinya

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2011.

b. Potensi PKK dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat sebagai Faktor Determinan Keberlanjutan.

.Meskipun teridentifikasi beberapa kelemahan dari gerakan PKK secara realitas, tetapi secara kelembagaan PKK juga memiliki potensi jika dimanfaatkan dengan baik menjadi kelebihan sebagai representasi

keterlibatan perempuan sebagai lokomotif peningkatan kesejahteraan masyarakat.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan, berikut beberapa potensi kelembagaan PKK yang dapat dimanfaatkan sebagai factor determinan keberlanjutan dalam melakukan pemberdayaan masyarakat, khususnya masyarakat kampung, dapat dijelaskan sebagai berikut :

1) Adanya kelembagaan PKK di semua lini, mulai dari Pusat, Provinsi, Kabupaten/ Kota, Kecamatan sampai dengan Desa/Kelurahan yang menjadikan PKK terorganisir secara struktur yang akan memudahkan jalur koordinasi dan informasi pada setiap tingkatan sampai pada level kampung. Artinya implementasi program di tingkat kampung dapat dikenal langsung oleh masyarakat dan dapat terintegrasi atau mendapatkan penguatan di tingkat kecamatan, kabupaten sampai pada tingkat provinsi.

2) Adanya payung hukum yang mendukung Gerakan PKK dimana keberadaan PKK telah tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 tentang Pemerintahan Daerah yang tertuang dalam penjelasan pasal 211 (ayat 2). Dengan demikian, mekanisme hubungan kerja secara koordinatif dan konsultatif dengan berbagai instansi terkait dapat efektif dilakukan dalam penyelenggaraan program kerja berdasarkan kebutuhan masyarakat kampung yang esensial.

3) Mempunyai 10 (sepuluh) Program Pokok PKK yang skala prioritasnya bisa dikondisikan sesuai dengan tuntutan kehidupan dan penghidupan masyarakat, khususnya kebutuhan mendasar masyarakat kampung seperti kesehatan, pendidikan, gizi dan sebagainya.

4) Perannya sebagai motivator dan dinamisator masyarakat, menyebabkan PKK mendapat dukungan masyarakat dan pemerintah terhadap program-programnya. Artinya, segala macam bentuk program yang direncanakan atau diimplementasikan mendapat respon dari masyarakat dan pemerintah.

5) Di samping bidang kesehatan, pengembangan program pembinaan di bidang-bidang lain seperti pangan, sandang, dan lain-lainnya sesuai dengan potensi yang ada di daerah masing – masing, dapat mendorong pertumbuhan ekonomi keluarga yang akan berimbas pada ekonomi masyarakat. Bisa jadi berupa industri rumah tangga makanan dan minuman, atau usaha produksi sandang atau kursus keterampilan sandang.

6) Budaya bekerjasama dan saling menolong dari masyarakat, dapat menjadi modal dasar yang digunakan untuk mengembangkan kehidupan berkoperasi. Sehingga kesempatan berusaha dan kesempatan kerja baik produksi maupun jasa dapat dilakukan karena ketersediaan modal usaha.

7) Sumber-sumber pendanaan dapat ditingkatkan untuk memperlancar kegiatan TP PKK baik melalui APBDes, APBD maupun APBN. Selain itu bila memungkinkan, dukungan dana dari para pengusaha atau donatur lainnya juga sangat potensial untuk dimanfaatkan terutama untuk membiayai berbagai kegiatan yang mengerahkan massa seperti bazar, pasar murah, pameran produk atau membangun infrastruktur dalam penyeleggaran program dan sebagainya

8) Dari sisi programnya, kemajuan perempuan dapat memainkan peran gandanya secara baik, yaitu sebagai pengelola keluarga, pencari nafkah dan

pelaku pembangunan. Dengan demikian sarannya harus ditujukan untuk mengembangkan dan mengangkat berbagai potensi yang ada pada diri perempuan yang memungkinkan dirinya dapat memanfaatkan hak dan kesempatan yang sama terhadap sumber pembangunan.

9) Pelibatan tokoh adat tokoh masyarakat sebagai *local leaders* untuk memberikan dukungan dan penguatan program yang dijalankan kepada masyarakat dan pembangunan wilayah.

Tabel 5. Matriks Faktor PotensiKelembagaan PKK dalam Melakukan Pemberdayaan Masyarakat di Kampung Soba.

Aspek	Potensi	Implikasi	Keterangan
Kelembagaan	Organisasi yang sudah lama dan keberadaannya ada di setiap wilayah	Organisasi yang kuat dan dapat melembaga dalam masyarakat	Kemampuan untuk mengintegrasikan dalam setiap tingkatan wilayah menjadikan program dapat berjalan efektif dan efisien
Dasar Hukum	Tercantum dalam UU No. 32 Tahun 2004 yang tertuang dalam penjelasan pasal 211 (ayat 2)	Mempunyai kekuatan hokum dalam menjalankan program-programnya	Akselerasi dan kreatifitas dalam implementasi program dilindungi oleh undang-undang
Program kerja	10 program pokok kerja nasional menjadi kebutuhan esensial masyarakat, khususnya kaum perempuan	Menjadi dasar dalam pengembangan masyarakat berdasarkan kebutuhannya di berbagai aspek/bidang	Penentuan skala prioritas berdasarkan kebutuhan masing-masing wilayah yang memiliki karakteristik yang berbeda
Budaya masyarakat	Konstruksi budaya masyarakat	Program PKK harus mensinergikan	Memudahkan dalam meniniasi program-program

	bekerja sama / gotong royong mendukung implementasi program	antara peningkatan kapasitas individu dan kelompok	yang sifatnya kolektifitas, seperti pendirian koperasi dan sebagainya
Kapasitas SDM	Masih sangat rendah, khususnya kaderisasi di wilayah kampung	Program dijalankan bersifat intruksional, anggota PKK belum menjiwai semangat program	SDM yang berkualitas menyebabkan program yang dijalankan lebih kreatif dan inovatif
Pendanaan	Harus ditingkatkan berdasarkan koridor hukum yang dimiliki	Penguatan peningkatan pendanaan melalui APBDes, APBD maupun APBN.	Menjadikan program lebih bersifat informative dan aplikatif yang langsung dapat dirasakan oleh masyarakat
Potensi Perempuan	sebagai motor penggerak organisasi dan katalisator dalam pembangunan	Fungsi ganda dapat diperankan baik domestic maupun publik	Keterlibatan perempuan dalam perencanaan pembangunan akan menyeimbangkan kebutuhan masyarakat di suatu wilayah
Mengakomodir Tokoh adat	Memberikan legitimasi secara kultur terhadap program yang dijalankan	Mendapat penguatan dalam masyarakat untuk tidak bertentangan dengan nilai-nilai yang dikembangkan secara budaya	Penyesuaian nilai memungkinkan dilakukan untuk mengikuti perkembangan saman

Sumber : Hasil Olahan Data Primer, 2011.

Intisari yang dapat disimpulkan dari penjelasan di atas bahwa perubahan politik, ekonomi, dan sosial di Indonesia dan komitmen Indonesia untuk mencapai Tujuan Pembangunan Milenium, dengan sendirinya akan berdampak pada perkembangan dan pelaksanaan operasional PKK. Tuntutan akan fleksibilitas PKK untuk menjadi agen pembangunan dan agen perubahan

semakin kuat. Munculnya krisis ekonomi global dan lingkungan hidup (*eco system*) yang harus diatasi oleh pemerintah, menjadikan organisasi PKK sebagai agen pembangunan dan agen perubahan terdepan terutama dalam peningkatan kesejahteraan keluarga. Kiprah PKK di lingkungan masyarakat juga harus didorong sebagai salah satu ikon bergeraknya *civil society* dalam peningkatan kesejahteraan keluarga yang diperkuat dengan kader-kader yang harapannya menjangkau sampai di tingkat Desa/Kelurahan atau Kampung. Dengan kuatnya gerakan pemberdayaan keluarga dan perempuan di tingkat akar rumput melalui gerakan optimalisasi potensi pemberdayaan masyarakat, maka pelaksanaan pembangunan partisipatif khususnya dalam masyarakat kampung akan mempunyai *added-value* yang signifikan dan berafiliasi dengan pembangunan kampung secara keseluruhan yang terkontekskan dalam kemandirian kampung dalam merencanakan, melaksanakan dan mengevaluasi jalannya pembangunan yang terkontrol oleh setiap elemen masyarakat termasuk keterlibatan aktif kaum perempuan sebagai potensi pembangunan.

D. ARAHAN MANAJEMEN PERENCANAAN PROGRAM PKK KABUPATEN DALAM MENGEFEKTIFKAN PEMBERDAYAAN MASYARAKAT

Menurut Narayan (2002) dalam Salman (2003) bahwa sebuah program/kegiatan pembangunan dapat berefek pada keberdayaan, terdapat

sejumlah unsur yang harus diperhatikan. Unsur-unsur yang dimaksud adalah sebagai berikut :

Pertama, akses informasi. Aliran informasi dalam pengelolaan program/kegiatan idealnya berlangsung timbal balik. Masyarakat (miskin) harus dapat mengakses semua informasi tentang program/kegiatan yang berkaitan dengan diri mereka, di sisi lain, pengelolaan program/kegiatan harus memahami karakteristik dan aspirasi masyarakat (miskin). Aliran informasi ini idealnya berlangsung dari awal sampai berakhirnya program/kegiatan.

Kedua, inter-partisipatoris program/kegiatan merupakan wahana inter-partisipatoris antara sejumlah aktor yang terlibat. Di dalamnya, pemerintah, swasta, dan komunitas lokal saling berinteraksi dan menyesuaikan perilaku terpola mereka, dibawah fasilitas pengelola program/kegiatan. Pada sistem kemasyarakatan (*societal system*) dimana program/kegiatan bergulir, nilai dan norma program menjadi acuan bersama dari interaksi yang berlangsung, sedemikian rupa sehingga antara pemerintah, swasta dan komunitas terbangun saling kepercayaan (*trust*) dan jaringan kerja (*networking*), yang pada gilirannya interkoneksi itu menjelma menjadi modal sosial (*social capital*) bagi pembangunan.

Ketiga, unsur inklusifitas. Prinsip yang berlaku disini bahwa pembangunan bukanlah sesuatu yang eksklusif, yang hanya menjadi ruang yang terbuka bagi siapa saja untuk terlibat, menyumbang sumberdaya, memberikan kritik, atau ikut menikmati hasilnya. Ini terkait dengan sikap dan tindakan konsultan, LSM atau anggota komunitas yang terlibat sebagai pengelola program, untuk selalu terbuka bagi kehadiran dan keterlibatan pihak

lain dalam sistem kemasyarakatan lokalnya. Hanya sikap inklusiflah yang mengkondisikan orang miskin bisa menjadi bagian dari actor pembangunan.

Keempat, unsur akuntabilitas. Pengelolaan sebuah program harus bisa dipertanggungjawabkan, tidak hanya kepada publik tetapi juga kepada antar mitra kolaborasi dalam pengelolaan program. Unsur pemerintah, swasta dan komunitas dari sistem kemasyarakatan local yang ikut mengelola program harus bisa terukur akuntabilitasnya satu sama lain, lalu keseluruhan pelaku terlibat ini harus pula menunjukkan akuntabilitasnya kepada publik. Di pihak lain, pengelola program sendiri, pada tingkat manajerial maupun fasilitator, juga harus menunjukkan akuntabilitasnya kepada pengelola program maupun kepada publik secara umum.

Kelima, unsur kapasitas organisasi lokal. Program/kegiatan harus bergulir dalam kerangka yang menguatkan kapasitas organisasi lokal. Organisasi lokal tersebut mencakup organisasi pada dunia pemerintahan (pemerintahkecamatan, desa/kelurahan, badan perwakilan desa/dewan kelurahan dan sebagainya), dunia swasta (organisasi produsen, organisasi konsumen, organisasi jasa dan sebagainya) serta dunia komunitas/*civil society* (organisasi wanita, koperasi, forum gotong royong, kelompok arisan kerja, kelompok swadaya masyarakat, dan sebagainya). Dengan asumsi bahwa dunia *civil society* adalah ruang yang paling lemah kapasitas organisasionalnya selama ini, pengembangan organisasi masyarakat sipil (*civil society organizations*) menjadi tantangan utama dari program/kegiatan yang pro-pemberdayaan masyarakat, karena melalui entitas inilah salah satu jalur keberdayaan orang miskin bisa ditumbuhkan.

Berdasarkan hasil penelitian yang dilakukan maka dalam mengkreasi program PKK Kabupaten dalam pemberdayaan masyarakat kampung yang aplikatif dan komunikatif pada masyarakat, maka skenarioarahanmanajemen perencanaan strategis sebagai siklus operasional pemberdayaan dapat terkonsepkan sebagai berikut :

1) **Penyadaran Sosial.** Pada masyarakat perlu ditanamkan kesadaran kritis tentang potensi yang mereka miliki untuk bisa mengakses sejumlah daya pada ruang sosial, ruang politik maupun ruang psikologis. Bahwa ketidaksejahteraan yang mereka alami bukanlah sepenuhnya karena ketidakmampuan yang melekat pada diri mereka, melainkan karena bekerjanya struktur/kelembagaan yang melemahkan daya kemampuan mereka, dimana daya tersebut bisa diperoleh kembali bila dikalangan mereka tertanamkan kesadaran untuk memperjuangkannya. Konteks penyadaran ini juga akan menanamkan kesadaran kritis dan kepekaan masyarakat untuk menilai dan mengidentifikasi kebutuhannya, membangun semangat kolektifitas serta kepercayaan diri dari masyarakat. Selain itu, pada tahapan ini pula nilai/norma serta prinsip dasar dari program kegiatan disosialisasikan sehingga menimbulkan pemahaman mendasar pentingnya gerakan PKK dengan 10 program pokoknya dalam memberikan penguatan kapasitas masyarakat khususnya perempuan untuk menjadi lokomotif pembangunan.

2) **Pengembangan Organisasi ke Skala yang Lebih Mikro.** Hal ini dimaksudkan agar organisasi yang sampai pada level kampung akan menjadi arena partisipasi warga komunitas, saling konsultasi dan tukar pengalaman, dan pengambilan keputusan kolektif. Dalam konteks pembentukan dasawisma

(pembentukan kelompok 10 rumah tangga) harus terkongritkan agar mampu mengaktualisasi program secara efektif dan efisien.

3) Kaderisasi Pendamping. Setiap program PKK bermaksud menyambung dengan gerakan masyarakat setempat. Suatu mekanisme perubahan masyarakat yang menggerakkan potensi dirinya sendiri guna mencapai kemajuan-kemajuan berdasar pada pengalaman yang dikembangkan bersama selama program berlangsung. Setiap program harus mempersiapkan kader-kader pengembangan keswadayaan kampung yang akan mengambil alih tugas pendampingan setelah program berakhir. Ukuran keberhasilan kaderisasi adalah kemampuan kader local untuk memerankan dirinya sebagai pendamping bagi masyarakat yang penilaiannya dilakukan oleh masyarakat itu sendiri.

4) Dukungan Teknis atau Penghantaran Sumberdaya. Pembaharuan masyarakat setempat umumnya memerlukan bantuan suatu lembaga berdasarkan kompetensinya berdasarkan informasi dan teknologi yang dapat membantu mempercepat pembaharuan itu menjadi kenyataan sebagaimana tujuan dari program yang diberikan. Dalam konteks ini bahwa program PKK yang diberikan kepada masyarakat kampung tidak hanya kepada penguatan kemampuan domestic perempuan tetapi juga kemampuan public untuk mengambil peran dalam pembangunan kampung secara komprehensif yang didalamnya akan memacu kemampuan masyarakat khususnya perempuan mengambil peran-peran ekonomi keluarga sehingga *multi player* ekonomi dalam masyarakat semakin beragam. Organisasi pendukung teknis ini baik dari pemerintah maupun Lembaga Sosial Masyarakat (LSM).

5) Pengelolaan Sistem. Sekelompok masyarakat adalah system yang terkait dengan system yang lebih luas. Kebutuhan-kebutuhan sebagian diperoleh dari pihak lain. Dalam menjalankan program atau kegiatan usaha, masyarakat memerlukan modal, pengetahuan dan keterampilan baru yang relevan, namun tidak selalu tersedia dan atau tidak terpenuhi di tingkat kampung. Oleh sebab itu, pendampingan bertugas mengelola system, yaitu memperlancar upaya masyarakat memperoleh kebutuhan tersebut baik secara individu maupun secara berkelompok dalam system setempat yang berkelanjutan.

Dengan demikian, mengikuti proses sebagai scenario yang direkomendasikan, maka pemberdayaan masyarakat melalui peran PKK Kabupaten, akan menjadikan pemberdayaan yang dilakukan berlangsung secara partisipatoris, dalam arti masyarakat sendiri menjadi pelaku utama dari agenda-agenda perbaikan kehidupan melalui wadah organisasi mereka dalam hal ini PKK. Dalam proses tersebut daya kemampuan mereka akan terus meningkat sebagai hasil dari proses belajar melalui pengalaman (*expreince based learning process*). Pihak-pihak diluar masyarakat sebagai agen perubahan hanya berfungsi sebagai fasilitator, pendukung dan penguat dari *experience based learning process* yang berlangsung (Ohama, 2001).

BAB V

KESIMPULAN DAN SARAN

A. Kesimpulan

Adapun kesimpulan dari hasil penelitian yang telah dilakukan adalah sebagai berikut :

1. Eksistensi kelembagaan PKK Kabupaten pada tingkat kelompok masyarakat belum dilakukan secara optimal dalam menjalankan 10 program PKK berdasarkan pada penilaian terhadap kesadaran masyarakat, pengorganisasian dan peningkatan kapasitas sebagai indikator keberdayaan masyarakat di Kampung Soba.
2. Faktor determinan yang mempengaruhi eksistensi PKK Kabupaten dalam melakukan peran pemberdayaan masyarakat di Kampung Soba diantaranya program yang dijalankan pendekatannya otoritas monoton yang tidak bersifat lokalitas sebagai kelemahan dan organisasi yang ada dalam semua tingkatan wilayah sebagai potensi yang dapat melembaga dalam masyarakat.

3. Arahan manajemen perencanaan program PKK dalam melakukan pemberdayaan harus berlandaskan kepada kesadaran masyarakat, pengorganisasian sampai level kampung, kaderisasi pendamping, bantuan teknis/penghantaran sumberdaya dan pengelolaan sistem yang memberikan penguatan terhadap dimensi sosial dan ekonomi masyarakat.

B. Saran

Rekomendasi penelitian ini : karena gerakan PKK sangat bermanfaat, supaya tetap eksis perlu peraturan perundangan untuk menjamin kelancaran kegiatannya terutama alokasi dananya. Dewan Penyantun PKK di semua jenjang agar lebih peduli dalam membina PKK. Koperasi perlu ditingkatkan lagi, terutama untuk mendukung pelatihan keterampilan yang sifatnya ekonomis. Perlu peninjauan terhadap 10 program PKK agar dapat mengakomodasi kegiatan keadilan dan kesetaraan gender berdasarkan konteks lokal. Dengan demikian, gerakan PKK Kabupaten dalam melakukan pemberdayaan akan memfasilitasi partisipasi masyarakat yang berkomplementasi terhadap peningkatan semangat masyarakat (*community spirit*), hubungan harmoni masyarakat (*community harmony relationship*) dalam menjadi bagian atau aktor dari pembangunan, sehingga masyarakat akan tampil sebagai agen perubahan untuk pencapaian kesejahteraan secara bersama (*social well-being*).

DAFTAR PUSTAKA

- Adimihardja dan Harry. 2011. *Konsep dan Kebijakan serta Implementasi Pemberdayaan*. CSIS. Jakarta.
- Baattacharyya, 1990. *Participatory Method of Measuring Empowerment*. Modul Pelatihan Pemberdayaan.
- Bogardus, Emory S. 1954 *Sociology*, The Macmillan Company, 4th ed. New York.
- Boserup, Ester. 1970. *Womens Role in Economics Development New York*: George Allen & Unwin.
- Bulkis, Siti. 1990. *Pengaruh Sektor Informal Terhadap Status Sosial Wanita*. Kasus Wanita Peekerja Di Desa Tarikolot, Kec. Citeureup Kab. Bogor Propinsi Jawa Barat. IPB Bogor.
- Creswell, J.W. 1994. *Research Desain : Qualitative and Quantitative Approaches*. Sage Publications. London.
- Fernandez, 2002. *Working Together for a Change: Government, Business and Civic Partnertships for Poverty Reduction in Latin America and Caribbean*. Washington D.C: World Bank.
- Friedman, John. 1993. *Empowerment : The Politics Of Alternative Development*. Cambridge : Blackwell Publishers.
- Geertz, Clifford. 1981 *Aneka Budaya dan Komunitas di Indonesia*, Yayasan Ilmu-ilmu Sosial, A. Rahman Zainuddin (pent. ;) Jakarta.
- Hikma. 2001. *Transisi Strategis Pembangunan*. Makalah. Jakarta.
- Honadle and Van Sant. 1985. *A New Vision for Managing in Government*. California Press.
- Kartasasmita, Ginandjar. 1997. *Administrasi Pembangunan*. Jakarta: LP3ES.
- Kusnadi. 2000. *Nelayan: Strategi Adaptasi dan Jaringan Sosial*. Bandung: Humaniora Utama Press.
- Levy, M.J. 1971. *The Family Revolution In Modern China*, Octagon Book, New York.
- Linton, R. dalam Galud J. and Kolb, 1964. *A Dictionary of Social Sciences*, The Free Press, A Devision of The Mc Millan Publishing, Co.Inc. New York.

- Merton, R.K. 1956. *Social Theory and Structure*, The Press Co.Inc. New York.
- Moleong Lexy J., 1999. *Metodologi Penelitian Kualitatif*. Remadja Rosdakarya. Bandung.
- Narayan, Deepa. 2002. *Empowerment and Poverty Reduction: A Sourcebook*. Washington: The World Bank.
- Ndraha, T. 1996. *Pembangunan Masyarakat; Mempersiapkan Masyarakat Tinggal Landas*, Rineka Cipta, Jakarta.
- Ndraha, Taliziduhu, 1981, *Metodologi Penelitian Pembangunan Desa*, Jakarta, Bina Aksara.
- Ohama, Yutaka. 2001. *Participatory Approach*, JICA International Training For Participatory Local Development: Theories and Practices, Nagoya Aichi Jepang.
- Oakley and Marsden. 1984. *Capacity Building : An Approach to People Centred Development*. Oxfam. Ireland.
- Pootstchi, Iraj. 1998. *Rural Development and The Developing Countries*, The Alger Press Ltd, Osawa.
- Prijono, Onny S. dan Pranarka A.M.W. (ed.). 1996. *Pemberdayaan: Konsep, Kebijakan dan Implementasi*. Jakarta: Centre for Strategic and International Studies (CSIS).
- Robins, W, Jacobs. 1995. *Real Time Strategic Change : How to Involve an Entire Organization in Fast and Far-Reaching Change*. San Fracisco.
- Rondinelli.Denis, 1990.*Proyek Pembangunan Sebagai Manajemen Terpadu*. Bina Aksara, Jakarta.
- Sajogyo, Pudjiwati. 1983. *Peranan Wanita dan Kesejahteraan Keluarga Suatu Pendekatan Sosiologis*. Bogor: Seminar Pendayagunaan Energi dan Peningkatan Masyarakat Pedesaan.
- Salman.Darmawan.2003. *Pemberdayaan Masyarakat sebagai Kunci Keberhasilan PPK*. Makalah disampaikan dalam “sosialisasi pembinaan dan pengendalian program pengembangan kecamatan (PPK) fase II dan pelatihan penguatan kinerja tim kordinasi PPK kabupaten dan pelaku PPK kecamatan” BPMP-SulSel. Makassar.
- Salman, Darmawan. 2002. *Tahap Transisi dalam Transformasi Industrial pada Komunitas Maritim di Sulawesi Selatan : Studi tentang Pergeseran Hubungan Industrial pada komunitas Industri*

Pembuatan Perahu, Wisata Pantai dan Penangkapan Ikan.
(Disertasi) PPS-UNPAD. Bandung.

Sanderson, Stephen. 1993. *Sosiologi Makro*. Radjawali Press. Jakarta.

Sarundajang, S.H. 2001. *Pemerintahan Daerah Di Berbagai Negara*, Pustaka Sinar Harapan Jakarta.

Sen, Amartya, 2002. *Development as Freedom*. Oxford: Oxford University Press.

Singarimbun, Masri, Effendi Sofian, (ed), 1995. *Metode Penelitian Survei*. LP3ES. Jakarta.

Soehartono. Irawan, 2006. *Metode Penelitian Sosial*. PT. Remaja Rosdakarya. Bandung.

Soekanto, Soerjono. 1982. *Sosiologi, Suatu Pengantar*. Jakarta: Rajawali Press.

Soetrisno, Loekman, 1995. *Menuju Masyarakat Partisipatif*. Yogyakarta: Penerbit Kanisius.

Suharto, Edi. 1997. *Pembangunan, Kebijakan Sosial dan Pekerjaan Sosial: Spektrum Pemikiran*. Bandung : Lembaga Studi Pembangunan STKS (LSPSTKS).

Sulistiyani, Ambar Teguh, 2004. *Kemitraan dan Modul-modul Pemberdayaan*. Yogyakarta: Gava Media.

Supriatna. 2000. *Administrasi Publik*. Andi Offset. Yogyakarta.

Tampubolon, Mangatas. 2006. *Pendidikan Pola Pemberdayaan Masyarakat Dan Pemberdayaan Partisipasi Masyarakat Dalam Pembangunan Sesuai Tuntutan Otonomi Daerah*.
http://www.depdiknas.go.id/Jurnal/32/pendidikan_pola_pemberdayaan_mas.htm. Download 11 Desember 2011.

Tjokroamidjojo dan Mustopadidjaja. 1988. *Transformasi Pembangunan Desa*. P3PK. UGM. Yogyakarta.

Wahab, Isnaen, Muktar. 2002. *Gerakan Pemberdayaan Partisipatif*. Rajawali Pers. Jakarta.

Yin, Rober K. 1996. *Studi Kasus : Desain dan Metode*. Rajawali Pers. Jakarta.

